

Laporan Kinerja  
Inspektorat Jenderal

2022

Menuju Stabilitas Ekonomi  
Tetap Optimis & Waspada





"Transformasi bukan lagi sekedar pilihan, namun menjadi suatu kebutuhan organisasi.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pengawasan yang terintegrasi serta menjamin good governance pengelolaan negara, Inspektorat Jenderal terus berkomitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan tiga fungsi pengawasan Menteri Keuangan dan mendorong tercapainya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel."

- Awan Nurmawan Nuh, 2022 -

## PENGANTAR

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertanggung jawab dalam menjaga tata kelola, risiko, dan pengendalian intern Kemenkeu. Di samping itu, dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, Itjen Kemenkeu juga dihadapkan pada dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh APIP K/L lainnya yang ditandai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (PMK 18/PMK.09/2022). PMK tersebut menjadi milestone penting bagi Itjen Kemenkeu dalam upaya memperkuat peran pengawasan atas tiga fungsi Menteri Keuangan sebagai Chief Operating Officer (COO) atau pengguna anggaran/barang Kementerian Keuangan, Chief Financial Officer (CFO) atau Bendahara Umum Negara (BUN), dan wakil pemerintah dalam kepemilikan Kekayaan Negara yang

Dipisahkan (KND).

Itjen Kemenkeu terus berkomitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) fungsi pengawasan Menteri Keuangan dan mendorong tercapainya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Itjen Kemenkeu terus berupaya untuk merevitalisasi dan mengakselarasi berbagai strategi dan fokus pengawasan mengingat semakin luasnya lingkup pengawasan Itjen Kemenkeu setelah diterbitkannya PMK 18/PMK.09/2022. Pengawasan Itjen tidak hanya dilaksanakan di lingkup Kemenkeu saja, tetapi juga dapat menjangkau luar Kemenkeu seperti di Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN. Hal ini sesuai arahan Menkeu agar Itjen Kemenkeu turut mengawasi kinerja BUMN untuk menciptakan tradisi pengelolaan yang lebih transparan, lebih akuntabel, dengan tata kelola yang baik.

Pada tahun 2022, dalam menentukan prioritas pengawasan Itjen Kemenkeu senantiasa mempertimbangkan dinamika APBN dan faktor eksternal seperti: geopolitik,

climate change, potensi pandemi baru, dan digital economy. Selain itu penguatan budaya integritas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Itjen dalam melaksanakan pengawasan. Itjen telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan budaya integritas di lingkungan Kemenkeu antara lain penerapan Integrity Awareness Program, pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Kerangka Kerja Integritas (KKI) pada setiap lini. Dalam rangka mewujudkan sinergi pengawasan, Itjen juga turut berperan aktif dalam melakukan berbagai kegiatan pengawasan berkoordinasi dengan Pelaksana Program PEN, BPKP, APIP K/L/PD, SPI BUMN, SPI BLU, APH dan BPK dalam berbagai macam bentuk, baik secara bersama maupun one-on-one sesuai kebutuhan.

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan di atas, Itjen juga tetap melakukan pengawasan atas kegiatan yang telah dipilih melalui proses perencanaan pengawasan berbasis risiko, pelaksanaan pengawasan mandatory, pengawasan atas current issues yang menjadi perhatian Menteri Keuangan, dan berperan aktif dalam organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI). Itjen juga secara aktif berperan untuk meningkatkan kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga dan Daerah melalui forum berbagi pengalaman praktik pengawasan dalam berbagai bentuk, diantaranya sosialisasi, workshop, focus group discussion, bimbingan teknis, dan asistensi penerapan bidang pengawasan tertentu.

Dalam rangka melaksanakan tugas besar sebagai unit pengawas Kemenkeu dan mendukung pelaksanaan kegiatan 3 fungsi pengawasan Menteri Keuangan, Itjen senantiasa meningkatkan kapabilitas organisasi dan SDM, serta bertransformasi

sebagai strategic partner yang membantu organisasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Itjen juga berkomitmen untuk memberikan nilai tambah sebagai trusted advisor bagi organisasi dalam menghadapi tantangan di masa kini serta mengantisipasi berbagai macam risiko ketidakpastian di masa mendatang. Itjen akan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawalan keuangan negara, membangun ekosistem pengawasan APBN yang lebih terintegrasi, dan menciptakan pengawasan internal pengelolaan keuangan negara yang lebih agile dan adaptif. Selain itu, Itjen Kemenkeu berharap dapat menjadi role model dari segi integritas untuk menjadi solusi dari permasalahan organisasi.

Seluruh kinerja pengawasan Itjen Kemenkeu tahun 2022 tersebut kami tuangkan dalam laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan program "Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko" dan "Dukungan Manajemen", serta penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2022. Itjen terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja, antara lain: melalui penyajian yang lebih komprehensif atas evaluasi dan analisis ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, realisasi anggaran dan kaitannya dengan kinerja, serta hasil pengawasan tahun 2022 yang penting dalam mendukung strategi Kemenkeu. Highlight pengawasan Itjen tahun 2022 secara langsung dikaitkan dengan program Kemenkeu, yaitu: pengawasan pengelolaan fiskal; pengawasan pengelolaan penerimaan negara; pengawasan pengelolaan belanja negara; pengawasan pengelolaan

perpendaharaan, risiko dan kekayaan negara; pengawasan dukungan manajemen Kemenkeu serta pengawalan budaya integritas.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi kami untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Itjen Kemenkeu akan terus berupaya memberikan kontribusi yang positif dan bermakna nyata demi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Inspektur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik  
Awan Murmawan Nuh



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Itjen sebagai APIP Kementerian Keuangan senantiasa melakukan perbaikan untuk mewujudkan pengawasan yang memberi nilai tambah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Sesuai dengan praktik terbaik audit internal yang berlaku secara internasional, nilai tambah tersebut dicerminkan oleh peningkatan efektivitas tata kelola, proses manajemen risiko, dan pengendalian intern. Dengan paradigma baru yaitu menjaga APBN dan aparatur Kementerian Keuangan untuk tercapainya kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Negara, Itjen terus meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai strategic partner dan trusted advisor.

Sebagai unit Eselon I Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 Itjen menjalankan dua program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Itjen TA 2022, yaitu Program Pengelolaan Perpendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dan Program Dukungan Manajemen. Program Pengelolaan Perpendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko diukur dengan dua indikator kinerja program, yaitu Rata-rata Indeks Opini BPK atas LK BA 15 dan LK BA BUN dengan target 4 (WTP) dan Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BA BUN yang telah Ditindaklanjuti dengan target 92%. Target program tersebut dicapai melalui kegiatan Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara dengan dua indikator kinerja kegiatan, yaitu Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi 90,6%, dan Rata-rata Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan LK BA BUN dengan realisasi keseluruhan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Program Dukungan Manajemen diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu dengan realisasi 111,49; Persentase

Penyelesaian Proyek Strategis TIK dengan realisasi 100%; Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan Indeks Integritas yang mencapai nilai 89,45. Untuk mewujudkan target program tersebut disusun lima kegiatan, yaitu Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dengan indikator kinerja, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (realisasi 98,13%); Pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan indikator kinerja, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan yang mencapai 3,84; Pengelolaan Organisasi

miliar atau 97,04% dari alokasi anggaran sebesar Rp48,37 miliar. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dikatakan sangat efisien, karena dengan input anggaran yang lebih kecil dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target. Efisiensi anggaran ini dapat dicapai oleh Itjen sebagai hasil dari gerakan efisiensi antara lain dalam bentuk pengurangan besaran uang harian dan akomodasi perjalanan dinas, rapat dalam kantor, honorarium jasa profesi, dan efisiensi penggunaan energi.

Selama enam tahun terakhir, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 NKO Itjen sebesar 110,70. Pada tahun 2017, NKO Itjen mengalami

#### Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen Kemenkeu 2014-2022



dan SDM dengan indikator kinerja, Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM yang mencapai 116,93%; Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal dengan indikator kinerja, Indeks Efektivitas UKI (realisasi 92,06); dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan (realisasi 107,89%); dan Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK (realisasi 100%).

Pencapaian kinerja program tersebut menggunakan sumber daya anggaran Rp46,95

kenaikan menjadi sebesar 112,93. Pada tahun 2018 NKO Itjen menurun 4,93 poin menjadi 108 sebagai konsekuensi dari target IKU yang hampir keseluruhan mendekati titik maksimal capaian, sehingga ruang indeks capaian makin kecil. Capaian NKO ini kemudian meningkat di tahun 2019 sebesar 1,62 poin menjadi 109,62. Kemudian di tahun 2020, NKO Itjen kembali mengalami peningkatan sebesar 1,67 menjadi 111,29. Pada tahun 2021, NKO Itjen mengalami sedikit penurunan sebesar 1,33 poin menjadi 109,96. Pada tahun 2022, NKO Itjen mengalami penurunan sebesar 0,91 poin menjadi 109,05.

Sementara itu berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun

2022, Inspektor Jenderal memiliki 10 Sasaran Strategis dengan 25 IKU. Dari 25 IKU tersebut, capaian NKO Itjen tercapai sebesar 109,05. Di tahun 2022 Itjen mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, kecuali untuk IKU Indeks Integritas dan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi. Realisasi capaian IKU Indeks Integritas di bawah target disebabkan pencegahan korupsi masih dianggap sebagai peran lini kedua dan ketiga saja serta Isu efektifitas sosialisasi antikorupsi dan isu perlindungan pelapor masih menjadi isu yang paling mendapat perhatian responden. Selain itu, terdapat pengungkapan kasus korupsi pada tahun 2022 yang menjadi nilai pengurang (faktor koreksi). Realisasi capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi tidak mencapai target karena ekspektasi/harapan responden yang meningkat dimana Indeks konsultansi adalah 4,7 sedangkan ekspektasi responden 5, gap tersebut mengakibatkan penurunan indeks kepuasan.

Selama tahun 2022, peran pengawasan Itjen berfokus pada pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022. Selain itu, Itjen juga tetap memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kinerja Kemenkeu, terutama dalam pelaksanaan peran Menkeu sebagai BUN. Program penguatan budaya integritas mulai mengedepankan strategi pencegahan dan penindakan fraud di lingkungan Kementerian Keuangan. Strategi pencegahan dilakukan dengan peningkatan awareness atas integritas, di antaranya adalah kampanye melalui media sosial; FGD/Workshop bertema Integritas secara virtual, peringatan Hakordia, dan pengendalian gratifikasi.

Untuk mengawal kinerja Kemenkeu, Itjen melakukan pengawasan selaras dengan

kelompok program Kementerian Keuangan, yaitu: pengawasan kebijakan fiskal, pengawasan pengelolaan penerimaan negara; pengawasan pengelolaan belanja negara; pengawasan pengelolaan perbendaharaan, risiko dan kekayaan negara; serta pengawasan dukungan manajemen Kemenkeu. Dalam melakukan pengawasan kebijakan fiskal, Itjen melakukan pengawasan diantaranya atas pelaksanaan transparansi fiscal; Monitoring Persiapan & Penyelenggaraan Pertemuan Finance Track Presidensi G20; dan pengawasan TKDD. Pengawasan pengelolaan penerimaan negara yang dilakukan Itjen diantaranya terkait Pengawasan atas Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP); Pengawasan atas kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan; Pengawasan atas Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak; dan Perizinan Bongkar dan Timbun di Luar Kawasan Pabean; Audit atas Kegiatan Pengawasan dan Pelayanan Ekspor dan Impor Barang untuk Dipakai dengan Menggunakan Data Analytics; dan Audit Kinerja Pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada DJA. Selanjutnya dalam melakukan pengawasan pengelolaan belanja, Itjen melakukan pengawasan Pengawasan atas Transfer ke Daerah; Pengawasan atas Belanja Subsidi Energi Listrik; dan Pengawasan Belanja Subsidi Non Energi-Pupuk. Dalam pengawasan pengelolaan perbendaharaan, risiko, dan kekayaan negara Itjen melaksanakan pengawasan di antaranya Reviu PIPK dan LK BUN; Penjaminan BUMN; Sertifikasi BMN Tanah; serta monitoring dan evaluasi creative financing dan pembiayaan IKN baru. Sementara itu dari sisi sentral/dukungan manajemen Kemenkeu, Itjen melakukan pengawasan diantaranya Pengawasan PUG; Koordinasi & Pembinaan Tugas dan Fungsi UKI; Penguatan Tata Kelola Pengawasan Perpajakan.

Ditandai dengan terbitnya PMK 18/PMK.09/2022, memperluas cakupan pengawasan pengelolaan keuangan negara, yang dapat mencakup 87 Kementerian/Lembaga, 78 BUMN, 38 provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 74.961 Desa, yang mendapatkan dana BUN. Pada tahun 2022, Itjen telah melaksanakan pengawasan atas peran Menkeu sebagai wakil pemerintah dalam pengelolaan KND diantaranya melalui Pengawasan atas Pemberian PMN pada PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT KAI, dan PT Adhi Karya. Adanya penguatan lingkup pengawasan tersebut juga memberikan tantangan baru dalam penguatan integritas. Pada tahun 2022, agenda penguatan integritas yang dicanangkan oleh Itjen diharapkan dapat dilaksanakan dengan tiga strategi utama. Strategi pertama adalah dengan menguatkan peran dan fungsi investigasi oleh Itjen. Strategi ini meliputi penguatan aspek proses bisnis investigasi, sumber daya manusia, serta optimalisasi iii teknologi informasi dalam kegiatan investigasi. Strategi kedua adalah implementasikan kerangka kerja integritas (KKI) dengan efektif dan efisien serta menguatkan sistem pengendalian intern (SPI) yang selama ini telah diterapkan di Kemenkeu. Ketiga, melaksanakan pemeriksaan mendadak (Sadak) atau surprise audit sebagai inisiatif pencegahan fraud yang infrastrukturnya telah diatur dalam Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PER-1/IJ/2022.

Itjen senantiasa menerapkan berbagai inovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan antara lain melalui pengembangan dashboard impor – ekspor; Pemeriksaan Mendadak (SADAK) Pengembalian Pendahuluan dan Restitusi pada Inspektorat non Investigasi; pengembangan aplikasi E-Hukdis;

Penajaman Dashboard Profiling; dan Outlier Data Alpha.

Itjen turut berperan aktif dalam penguatan pengawasan K/L dan Pemda melalui forum berbagi pengalaman dalam berbagai bentuk workshop, focus group discussion, seminar nasional, dan asistensi atas praktik-praktik pengawasan tertentu. Itjen juga berperan aktif dalam organisasi profesi AAIPI dengan melakukan kegiatan penataan database keanggotaan AAIPI, pelaksanaan telaah sejawat eksternal ke Inspektorat Utama BRIN, pelaksanaan quality control telaah sejawat ekstern, dan pelaksanaan Kongres AAIPI Tahun 2021. Selain aktif dalam organisasi profesi AAIPI, beberapa pegawai Itjen juga terdaftar dalam keanggotaan organisasi profesi lain yaitu The Institute of Internal Auditors (IIA) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Semua kegiatan tersebut digunakan sebagai sarana memperkuat sinergi dalam mendukung strategi Kemenkeu dalam melaksanakan pengawasan atas peran dan fungsi Menteri Keuangan.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

## Daftar Isi

<b>I</b>	<b>Pendahuluan</b>	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1	<b>IV</b>	<b>Branding Pengawasan Itjen</b>	Inovasi Pengawasan	139
		Peran Strategis Itjen	2			Penghargaan/Apresiasi Prestasi	143
		Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	4			Knowledge Sharing	144
		Sistematika Penyajian Laporan	8			Kontribusi pada Profesi dan Organisasi Lain	145
		Sumber Daya Itjen	9	<b>V</b>	<b>Penutup</b>		149
<b>II</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	Rencana Strategis Itjen	13				
		Rencana Kerja, Rencana Kerja & Anggaran, dan Perjanjian Kerja	17				
		Evaluasi Renstra	19				
		Pengukuran Kinerja	22				
<b>III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	Capaian Kinerja Organisasi	27				
		Realisasasi Anggaran	102				
		<i>Highlight Hasil Pengawasan</i>	107				
		Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2020	133				



## Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Target Kinerja dalam Dokumen RKA .....	18
Tabel 2. 2 Perbandingan Target Kinerja dalam Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja .....	20
Tabel 2. 3 Target IKU Itjen Tahun 2022 .....	23
Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif .....	27
Tabel 3. 2 Capaian IKU Itjen Tahun 2022 .....	28
Tabel 3. 3 Capaian IKU SS Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan .....	29
Tabel 3. 4 Capaian IKU Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN .....	30
Tabel 3. 5 Perbandingan dengan Target Lainnya .....	32
Tabel 3. 6 Capaian IKU Indeks Integritas .....	33
Tabel 3. 7 Rincian Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan .....	35
Tabel 3. 8 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan .....	36
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam Renstra dan Kontrak Kinerja Itjen .....	37
Tabel 3. 10 Capaian IKU SS Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal .....	38
Tabel 3. 11 Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB .....	40
Tabel 3. 12 Kategori Hasil Penilaian PMPRB .....	40
Tabel 3. 13 Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi .....	41
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam Renstra dan Kontrak Kinerja Itjen .....	42
Tabel 3. 15 Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP .....	46
Tabel 3. 16 Rincian Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenkeu .....	46
Tabel 3. 17 Rincian Hasil Penilaian per Masing-Masing Komponen .....	47
Tabel 3. 18 Capaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022 .....	48
Tabel 3. 19 Rincian Indeks Efektivitas UKI per Inspektorat dan Klien Pengawasan .....	49
Tabel 3. 20 Capaian IKU Indeks Efektivitas UKI Tahun 2022 .....	49
Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI target IKU dalam Renstra dan KK Itjen .....	51
Tabel 3. 22 Capaian IKU SS Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas .....	51
Tabel 3. 23 Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan .....	52
Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan dalam Renstra dan Kontrak Kinerja Itjen .....	53
Tabel 3. 25 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Per Komponen .....	54
Tabel 3. 26 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti .....	54
Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti dalam Renstra dan Kontrak Kinerja Itjen .....	56
Tabel 3. 28 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi .....	57
Tabel 3. 29 Capaian IKU SS Pencegahan & Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal .....	58
Tabel 3. 30 Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan & Penindakan Pelanggaran Integritas .....	62

Tabel 3. 31 Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan IBI Tahun 2022 .....	63
Tabel 3. 32 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti .....	63
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan Target dalam Renstra dan Kontrak Kinerja Itjen .....	64
Tabel 3. 34 Capaian IKU SS Sinergi Pengawasan yang Efektif .....	65
Tabel 3. 35 Capaian IKU SS Kebijakan Fiskal yang Prudent serta Manfaat Kerja Sama Internasional dan Presidensi G-20 yang Optimal .....	67
Tabel 3. 36 Rincian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK .....	70
Tabel 3. 37 Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK .....	70
Tabel 3. 38 Capaian IKU SS Penjaminan Pengawasan-Pengendalian Intern yang Berkualitas .....	71
Tabel 3. 39 Nilai Hasil Telaah Sejawat Masing-Masing Inspektorat .....	72
Tabel 3. 40 Capaian IKU Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AIPI .....	73
Tabel 3. 41 Perbandingan target IKU dalam Renstra dan Kontrak Kinerja Itjen .....	74
Tabel 3. 42 Capaian IKU SS Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan .....	75
Tabel 3. 43 Capaian IKU Jumlah Pedoman Pengawasan .....	76
Tabel 3. 44 Perbandingan Target IKU Jumlah Pedoman Pengawasan dalam Renstra dan Kontrak Kinerja Itjen .....	77
Tabel 3. 45 Realisasi Proyek CA per Inspektorat .....	78
Tabel 3. 46 Capaian IKU Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit .....	79
Tabel 3. 47 Capaian IKU Persentase Implementasi PIJJ .....	81
Tabel 3. 48 Capaian IKU SS Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile .....	82
Tabel 3. 49 Capaian Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu .....	83
Tabel 3. 50 Perbandingan Hasil Self Assessment Kapabilitas Itjen Kemenkeu .....	86
Tabel 3. 51 Capaian IKU Nilai Internal Audit Capability Model (IACM) .....	87
Tabel 3. 52 Perbandingan Target IKU Nilai IACM dalam Renstra dan Kontrak Kinerja Itjen .....	87
Tabel 3. 53 Capaian IKU SS Penguatan Sumber Daya yang Optimal .....	89
Tabel 3. 54 Capaian IKU Tingkat Pengelolaan SDM .....	90
Tabel 3. 55 Capaian Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu .....	91
Tabel 3. 56 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran .....	93
Tabel 3. 57 Capaian IKU SS Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif .....	94
Tabel 3. 58 Tingkat Penyelesaian Proyek Strategis TIK .....	97
Tabel 3. 59 Capaian Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK .....	97
Tabel 3. 60 Capaian IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu .....	98
Tabel 3. 61 Rincian Realisasi IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem .....	98
Tabel 3. 62 Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan .....	101
Tabel 3. 63 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2022 .....	103
Tabel 3. 64 Realisasi Indikator Kinerja serta Anggaran Tahun 2022 .....	104
Tabel 3. 65 Usulan Pengaturan yang Perlu Diatur Lebih Lanjut pada PMK 227/PMK.09/2021 .....	112
Tabel 4. 1 Daftar Studi Banding dari K/L/Pemda Selama Tahun 2022 .....	144
Tabel 4. 2 Pegawai Itjen dalam Kepengurusan AAIPI .....	145
Tabel 4. 3 Pegawai Itjen Sebagai Anggota IIA dan IAI .....	146
Tabel 4. 4 Daftar Unit Penugasan Pegawai Itjen .....	148

## Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Itjen Tahun 2022 .....	2
Gambar 2. 1 Alur Penyusunan Renstra.....	14
Gambar 2. 2 Peta Strategi Itjen .....	23
Gambar 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2014-2022.....	27
Gambar 3. 2 Indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN Tahun 2017-2022 .....	31
Gambar 3. 3 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan 2018-2021 .....	37
Gambar 3. 4 Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 2020-2022.....	50
Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas UKI Tahun 2020-2022.....	55
Gambar 3. 6 Capaian per Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Tahun 2018-2022 .....	55
Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian IKU Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun 2019 s.d. 2022 .....	64
Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2022.....	71
Gambar 3. 9 Perbandingan Capaian IKU Nilai Hasil Telaah Sejawat SAIPI Tahun 2016-2022.....	74
Gambar 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Jumlah Pedoman Pengawasan Tahun 2019 s.d. 2022 .....	77
Gambar 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit Tahun 2020-2022 .....	80
Gambar 3. 12 Perbandingan Level IACM Per Elemen Tahun 2017 s.d 2022 .....	86
Gambar 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran .....	94

Lampiran 1	Kontrak Kinerja Inspektor Jenderal Tahun 2022
Lampiran 2	Sertifikasi Pegawai Itjen
Lampiran 3	Informasi Kinerja dan Anggaran Itjen Tahun 2022
Lampiran 4	Galeri Kegiatan Itjen Tahun 2022

## Daftar Lampiran

## BAB I | PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Peran Strategis Itjen
- C. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
- D. Sistematika Penyajian Laporan
- E. Sumber Daya Itjen



## A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

### 1. Tugas dan Fungsi

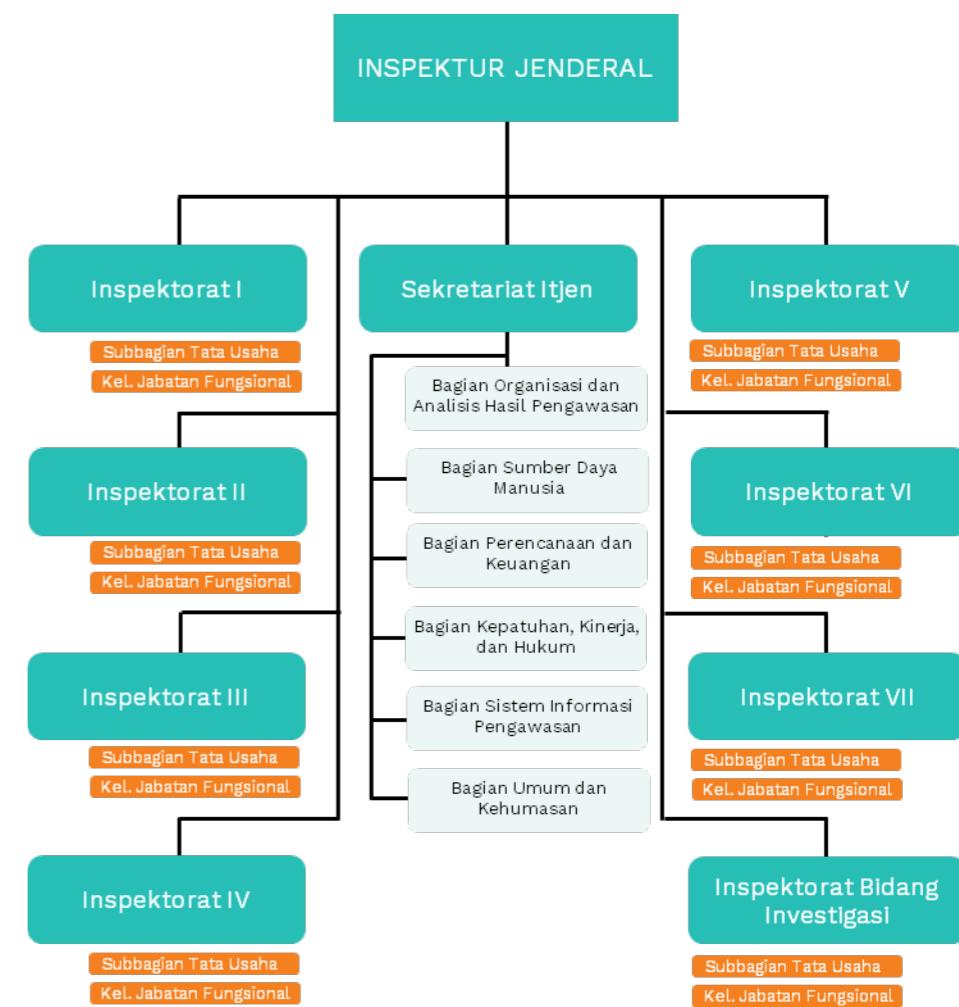
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK 118/PMK.01/2021), Itjen mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) pada Kementerian/Lembaga. Itjen sebagai Aparat Pengawas Inter Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenkeu yang didanai dari APBN.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Itjen menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b) pelaksanaan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan;
- d) koordinasi pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kementerian/Lembaga;
- e) pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
- f) pelaksanaan pembinaan dan asurans atas fungsi kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Keuangan;
- g) penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- h) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 2. Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Itjen dipimpin oleh Inspektorat Jenderal yang membawahi 9 (sembilan) Unit Eselon II, yaitu 8 (delapan) Inspektorat dan Sekretariat Itjen yang terdiri dari 6 (enam) bagian. Struktur organisasi Itjen secara detail dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: PMK-118/PMK.01/2021

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Itjen Tahun 2022

## B. Peran Strategis Itjen

Visi Kemenkeu sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mengawali pencapaian visi Kemenkeu, Itjen merumuskan visi sebagai APIP Kemenkeu agar sejalan dengan visi Kemenkeu. Visi baru yang dicanangkan Itjen adalah "Menjadi Trusted Advisor Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan 'Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan'".

Dalam menjalankan peran sebagai APIP Kemenkeu, Itjen mempunyai tugas untuk mengawal setiap proses perubahan dan pengembangan yang dilakukan oleh Kemenkeu untuk mewujudkan visi Kemenkeu. Selain itu, Itjen senantiasa terus melakukan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan internal. Dengan semakin kompleksnya aktivitas dan lingkungan fiskal (baik internal maupun eksternal) serta dampak risiko yang sempat meningkat akibat pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi dan konflik geopolitik global yang tidak stabil dampak ketegangan Rusia dan Ukraina, optimalisasi pengawasan atas pengelolaan fiskal memerlukan penguatan dan penyempurnaan fungsi-fungsi utama Itjen.

Pengawasan Itjen Kemenkeu memiliki karakteristik yang spesifik bila dibandingkan dengan APIP pada Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Hal ini terkait dengan kedudukan spesifik Menteri Keuangan dalam pengelolaan Keuangan Negara, yaitu selain sebagai Chief Operating Officer (COO) sebagaimana pimpinan K/L lain, juga sebagai Chief Financial Officer (CFO) yang mendapatkan kuasa dari Presiden untuk mengelola Keuangan Negara dan wakil pemerintah dalam kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND). Dengan demikian tugas pengawasan oleh Itjen juga memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan APIP K/L lainnya.

Peran strategis Itjen dalam membantu Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer atau Bendahara Umum Negara diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Itjen diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMN/lembaga lainnya yang didanai BA BUN serta kegiatan pada BUMN dan lembaga non BUMN.

Berbagai kalangan telah mengakui Kemenkeu sebagai motor reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu icon Kemenkeu untuk menciptakan kepercayaan publik (public trust) terhadap pengelolaan Keuangan Negara. Itjen mempunyai peran yang signifikan dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap kementerian dan pemerintahan pada umumnya dalam mengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. Itjen sebagai salah satu unit yang menghidupkan semangat reformasi birokrasi di Kemenkeu memiliki tugas cukup berat untuk mendukung agar motor reformasi selalu berjalan secara berkesinambungan.

Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan Keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sementara itu, peran audit internal yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) adalah untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan tata kelola (governance) organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Itjen terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Kemenkeu.

Peran pengawasan Itjen ini semakin dipertegas melalui Renstra yang ditetapkan dalam

Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-92/IJ/2020 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Berdasarkan Renstra tersebut, Itjen melakukan pengawasan mencakup tata kelola (governance), manajemen risiko, dan proses pengendalian internal di lingkungan Kemenkeu.

Untuk menjawab tantangan dan peran di atas, Itjen dituntut untuk selalu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan yang akan terjadi dan menjadi aparat yang akuntabel, yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang diemban secara transparan.

## C. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu organisasi yang sangat penting di Indonesia, memiliki policy, instrumen, kinerja, dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Kemenkeu dituntut dapat menyiapkan dinamika politik, makro nasional dan dampak dari digital disruption. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kemenkeu adalah merebak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pengembang amanah dalam merespon dinamika tersebut, Kemenkeu merumuskan Inisiatif Strategis (IS) dalam rangka percepatan transformasi digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kemenkeu tersebut, dalam Leaders' Offsite Meeting (LOM) pada 14-15 Januari 2022 telah ditetapkan 22 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 19 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analitik.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.01/2022 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, IS Kemenkeu terdiri atas:

1. 41 (empat puluh satu) IS Kemenkeu yang mulai diimplementasikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
2. 20 (dua puluh) IS Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017; dan
3. 7 (tujuh) IS Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan pendukung 87 (delapan puluh tujuh) IS RBTK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.

Terkait dengan implementasi atas 41 (empat puluh satu) IS RBTK sebagaimana disebutkan pada poin a terbagi menjadi 5 Tema, yaitu: Tema Sentral; Tema Fiskal; Tema Penerimaan; Tema Belanja; dan Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Pembiayaan. Dari 41 (empat puluh satu) IS RBTK tersebut Itjen terlibat sebagai Penanggung Jawab Utama pada 5 (lima) IS.

## 1. Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: *Collaborative Ways of Working*

IS ini bertujuan untuk mewujudkan budaya kerja Kemenkeu Satu yang kolaboratif dan berbasis digital guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan. Terobosan yang dilakukan meliputi: a) terwujudnya mekanisme pengelolaan kinerja baru yang selaras dengan kebijakan delayering dan terbentuknya squad team Kemenkeu berdasarkan Project, b) penguatan mental/karakter/budaya pegawai Kemenkeu, dan c) percepatan implementasi aplikasi terkait penjatuhan hukuman disiplin (e-Hukdis).

Latar belakang penetapan IS ini adalah: a) mewujudkan organisasi Kemenkeu yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, b) mewujudkan SDM Kemenkeu yang berkualitas dan berintegritas, c) perlu penyesuaian cara kerja baru yang lebih dinamis dan kolaboratif untuk memperkaya kompetensi dan pengalaman PNS Kemenkeu agar dapat berkinerja secara optimal dan efisien (al. kebijakan terkait dengan delayering dan squad team), d) perlunya standardisasi dalam pembentukan squad team, dan e) perlunya mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selama tahun 2022, capaian yang telah dilaksanakan Itjen adalah melakukan pengembangan aplikasi e-Hukdis.

## 2. Pemanfaatan *Emerging Technologies* dalam Kegiatan Pengawasan Itjen

IS ini bertujuan untuk mewujudkan data-driven organization melalui penyampaian informasi kondisi Governance, Risk, and Control (GRC) secara real-time berdasarkan hasil pengawasan berbasis pemanfaatan emerging technologies. Terobosan yang dilakukan adalah: a) penerapan data analytics dalam kegiatan pengawasan Itjen dengan melibatkan UE I, b) optimalisasi teknik dan metode berbasis emerging technologies lainnya dalam analisis dan pengujian data, dan c) optimalisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi Kemenkeu.

Latar belakang penetapan IS ini adalah: a) tantangan peningkatan jumlah, kecepatan kejelasan, dan variasi (4Vs of data) sebagai implikasi digitalisasi proses bisnis internal Kemenkeu maupun mitra ekstern Kemenkeu sebagai peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan Kemenkeu sebagai data-driven organization dalam mendukung kebijakan strategis maupun keputusan operasional; dan b) belum terimplementasikannya emerging technologies untuk memfasilitasi peran Itjen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peran Kemenkeu.

Selama tahun 2022, capaian yang telah dilaksanakan Itjen adalah hasil seluruh pengujian seluruh project CA/CM telah dimanfaatkan dalam kegiatan pengawasan.

## 3. Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan KND

IS ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan fiskal dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dalam rangka menghasilkan dampak dan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat dan kesinambungan fiskal nasional. Terobosan yang

dilakukan adalah: a) penyusunan regulasi terkait penguatan peran Itjen dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran BA BUN oleh Kementerian/Lembaga/BUMN/Pemda/Badan Lainnya dan pengawasan atas Kekayaan Negara Dipisahkan yang berada dibawah Kemenkeu, b) sinergi dan koordinasi dengan UE I lain, SPI BUMN, APIP dan/atau unit pada K/L/Pemda terkait, c) pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pengawasan pengelolaan anggaran BA BUN oleh Menkeu cq. Itjen, d) interkoneksi database pengawasan APIP K/L, UE I lain, dengan pengawasan Menkeu cq. Itjen, dan e) penyusunan mekanisme pengawasan PPA BUN atas BA BUN.

Latar belakang penetapan IS ini adalah: a) Menkeu (pengelola fiskal) melaksanakan fungsi BUN, berwenang melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran negara (UU No 17/2003 Psl 8 huruf f dan UU No 1/2004 Psl 7 ayat (2) huruf c, b) Menkeu selaku PA atas BA BUN berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN agar pelaksanaan anggaran BA BUN efisien, efektif, dan akuntabel, c) anggaran BUN yang signifikan 65,15% (2022) dari APBN, d) pelaksanaan pengawasan BA BUN berdasarkan PMK 204/2015 tidak efektif karena hanya bersifat koordinatif; dan e) perlu penguatan peran PPA BUN dalam pengawasan BA BUN.

Selama tahun 2022, capaian yang telah dilaksanakan Itjen adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK Nomor 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menkeu Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.
- b. Penetapan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PER- 11/IJ/2022 tentang Pedoman Pemanfaatan Aplikasi Sistem Manajemen Pengawasan Intern Berbasis Teammate Plus di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- c. Penyusunan konsep URS Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Pengelolaan BA BUN pada Aplikasi existing yang ada di Itjen yaitu Teammate+.
- d. Monitoring Atas Pelaksanaan Anggaran BUN Terkait Ketepatan Sasaran Penyaluran Subsidi Listrik Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada PT PLN (Persero).
- e. Pengawasan atas GRC pada 5 SMV Kemenkeu ((LPEI, PT Geo Dipa Energi, PT SMI, PT SMF, PT PII)).
- f. Pelaksanaan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Provinsi DIY.
- g. Pelaksanaan pengawasan belanja subsidi non-energi pupuk.
- h. Penguatan pengawasan melalui combined assurance bersama dengan DJPK, DJPb, Kemendagri (Itjen Kemendagri dan Ditjen Bina Pemdes), dan Kemendes (Itjen Kemendes, Ditjen PDP, Ditjen BPI, Ditjen PEI) dalam rangka pelaksanaan evaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan Dana Desa serta onsite visit pada 3 Kabupaten di Jawa Timur.
- i. Pengawasan PMN atas PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI), PT PAL Indonesia, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW), PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC), dan PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo).

#### 4. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service dan Government Platform*)

IS ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital. Terobosan yang dilakukan adalah: a) melaksanakan sertifikasi sistem elektronik dan dokumen elektronik yang dipergunakan dalam pelaksanaan anggaran, b) mewujudkan administrasi keuangan full elektronik yang legal dan aman, c) menginterkoneksi SAKTI dengan berbagai sistem pendukung sehingga jadwal pembayaran dapat dilakukan lebih akurat, d) membentuk unit pengelola kanal elektronik yang berfungsi memastikan kepatuhan pengguna SAKTI, e) simplifikasi dan otomasi validasi terhadap pelaksanaan belanja di Satker, dan f) mewujudkan infrastruktur data analytic yang lebih akurat pada pelaksanaan anggaran.

Latar belakang penetapan IS ini adalah: a) administrasi pelaksanaan anggaran masih berdasar hardcopy sehingga membebani pejabat perpendaharaan di satker, b) satker sulit memenuhi norma waktu dan jadwal pembayaran, dan c) sistem informasi pelaksanaan anggaran masih terpisah dengan berbagai sistem elektronik pendukung.

Selama tahun 2022, capaian yang telah dilaksanakan Itjen adalah melaksanakan quality assurance pengembangan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).

#### 5. Pengembangan *Dashboard Profiling* Kemenkeu untuk Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal

IS ini bertujuan untuk tersedianya perangkat pendukung kegiatan pengendalian dan pengawasan di lingkungan Kemenkeu yang berbasis risiko dalam rangka implementasi Kerangka Kerja Integritas (KKI) melalui kegiatan pencegahan, deteksi, respon, monitoring dalam bentuk Dashboard Profiling. Terobosan yang dilakukan adalah penggunaan data analytic dalam menentukan profil risiko pegawai dan unit yang berdasarkan dari data terintegrasi sebagai tulang punggung pelaksanaan KKI, pengendalian serta pengawasan di lingkungan Kemenkeu.

Latar belakang penetapan IS ini adalah: 1) perangkat-perangkat yang ada untuk mendukung implementasi KKI Kemenkeu serta kegiatan pengawasan dan pengendalian Kemenkeu masih belum terintegrasi secara optimal, dan 2) penggunaan data analytic dalam membuat keputusan mengingat adanya peningkatan jumlah data yang signifikan di Kemenkeu sebagai implementasi business process based on data driven.

Selama tahun 2022, capaian yang telah dilaksanakan Itjen adalah sebagai berikut:

- Pengintegrasian hasil data analytics ke dalam Dashboard Profiling.
- Penentuan Metode Risiko (Skoring) Pegawai.
- Penggunaan Dashboard Profiling oleh Itjen & pengembangan lanjutan Dashboard Profiling.
- Penyelesaian kegiatan modeling dan evaluasi data analytics.

Selain kelima IS tersebut, Itjen juga terlibat sebagai pendukung pada 12 IS yaitu:

- Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kehumasan (OSDMK) Kemenkeu.
- Layanan Digital Kementerian Keuangan.

- Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai Learning Organization.
- Pengembangan Enterprise Architecture Kementerian Keuangan.
- Joint Program Optimalisasi Penerimaan.
- Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System).
- Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara.
- Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- Platform Media Analitik.
- Optimalisasi BMN Kemenkeu Versi 2.
- Data Analitik Rekomendasi Expert Locator/Penyusunan Aset Intelektual.
- Penyelarasan Proses Bisnis – Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Partisipasi Itjen pada lima IS di atas secara periodik telah disampaikan ke CTO, yang meliputi update progres kegiatan, isu strategis yang dihadapi dan action plan yang akan dijalankan.

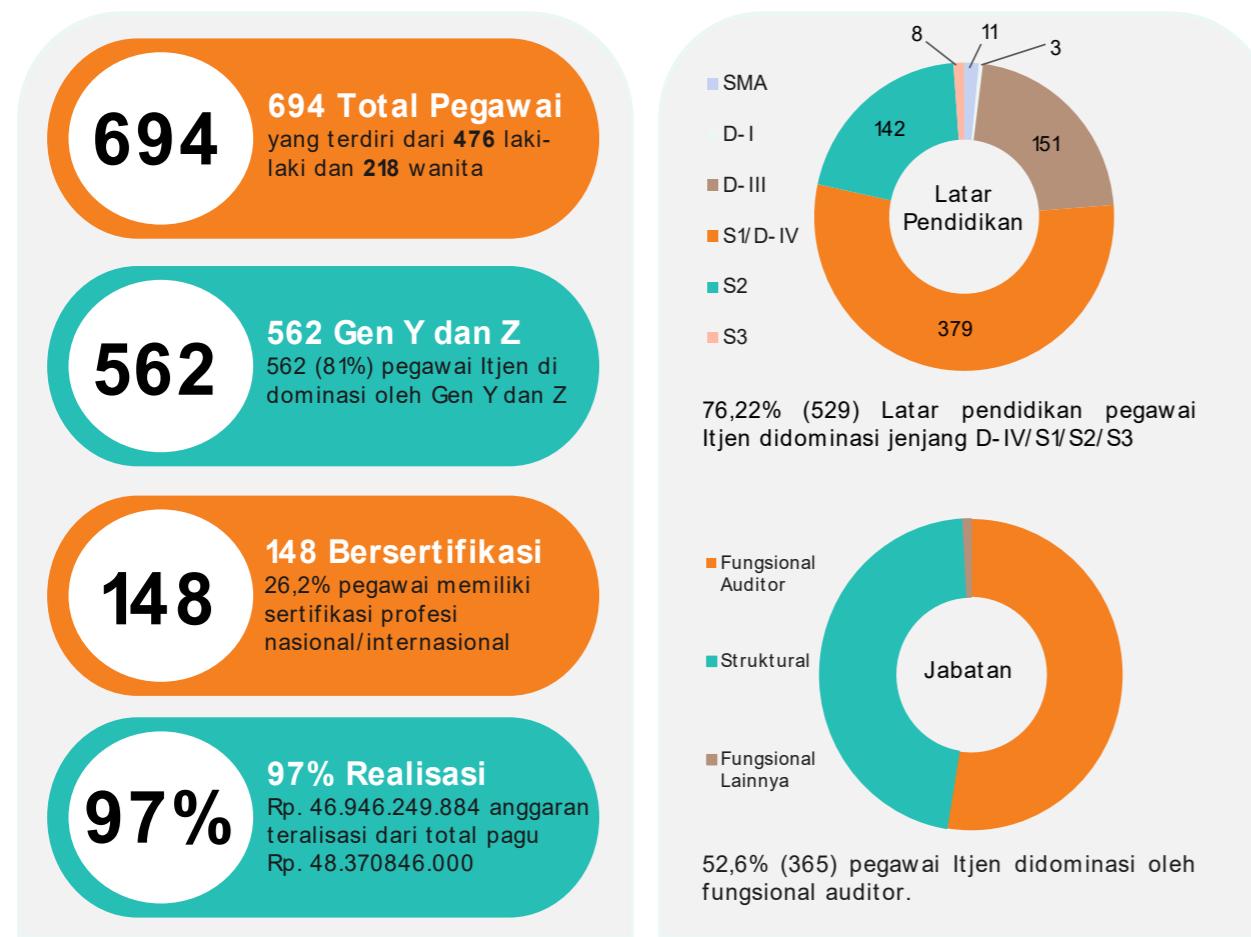
#### D. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Itjen ini bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja (performance result) dan membandingkannya dengan rencana kinerja (performance plans) tahun 2022. Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

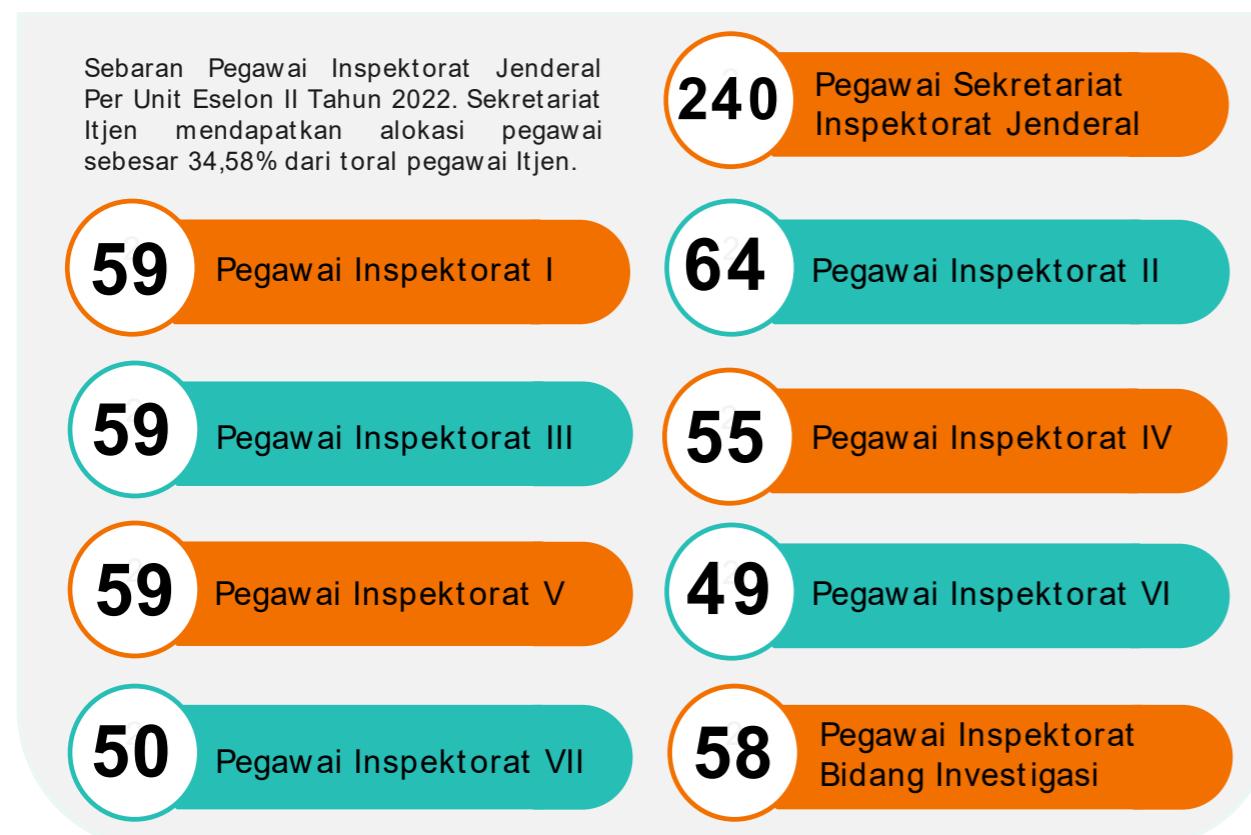
BAB I	Pendahuluan, menyajikan gambaran umum Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; Peran Strategis Itjen; Program RBTK; dan Kekuatan Sumber Daya.
BAB II	Perencanaan Kinerja, menyajikan skema alur pikir penyusunan Laporan Kinerja; Rencana Strategis; Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Evaluasi Renstra Itjen, dan Pengukuran Kinerja tahun 2022.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja Itjen yang secara langsung maupun tidak mendukung perbaikan kinerja Itjen dan instansi lainnya selama tahun 2022, pengawasan dalam mendukung tujuan Kemenkeu selama tahun 2022, tindak lanjut atas evaluasi SAKIP tahun 2021.
BAB IV	Branding Pengawasan Intern, menyajikan Inovasi Pengawasan, penghargaan/apresiasi/prestasi yang diperoleh Itjen, sharing knowledge yang dilakukan kepada K/L lain dan Pemda, serta kontribusi pegawai Itjen pada profesi dan organisasi lain.
BAB V	Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2022.

#### LAMPIRAN

## E. Sumber Daya Itjen



Halaman ini Sengaja Dikosongkan



## BAB II | PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Itjen
- B. Rencana Kerja, Rencana Kerja & Anggaran, dan Perjanjian Kinerja
- C. Evaluasi Renstra Itjen
- D. Pengukuran Kinerja



## A. Rencana Strategis Itjen

Sebagai unit audit internal Kemenkeu, Itjen terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk terus memberi nilai tambah bagi Kemenkeu. Perubahan tersebut dilakukan sejalan dengan perubahan yang dilakukan oleh Kemenkeu untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang semakin kredibel. Sebagai salah satu milestone perubahan, Kemenkeu telah merumuskan kembali dan menyempurnakan pernyataan visi yang lebih berorientasi outcome agar dapat lebih memenuhi harapan para stakeholder dalam pengelolaan Keuangan Negara dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024. Visi baru Kemenkeu, yaitu "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", diharapkan dapat men-drive seluruh aparatur Kemenkeu untuk menjadi prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan.

Untuk menyesuaikan dengan perubahan Visi Kemenkeu tersebut, Itjen juga telah menyempurnakan pernyataan visinya, dari sebelumnya "Menjadi unit audit internal yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Negara", menjadi:

### **Menjadi *Trusted Advisor* Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"**

Dalam pernyataan visi tersebut, menjadi "trusted advisor" berarti Itjen mengupayakan dan mempertahankan kepercayaan klien pengawasan (earn and sustain trust) melalui strategic listening untuk memahami sepenuhnya apa kebutuhan klien pengawasan, memberikan nasihat secara efektif (giving advice effectively) terhadap isu strategis yang sedang dihadapi oleh klien pengawasan, dan membangun hubungan (building relationships) dengan klien pengawasan secara profesional. Melalui visi tersebut Itjen juga berkomitmen untuk mengawal pengelolaan Keuangan Negara bukan hanya yang langsung dilaksanakan oleh unit-unit kerja Kemenkeu berkaitan dengan Bagian Anggaran 015, tetapi lebih luas lagi menyangkut pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), baik yang dilakukan oleh unit-unit kerja Kemenkeu maupun yang dilakukan oleh unit-unit kerja Kementerian/Lembaga lain melalui sinergi dan koordinasi dengan APIP Kementerian/Lembaga masing-masing.

Untuk mewujudkan visi dimaksud Itjen merumuskan kembali misi agar mencerminkan kegiatan inti dan mandat yang lebih tepat, yaitu:

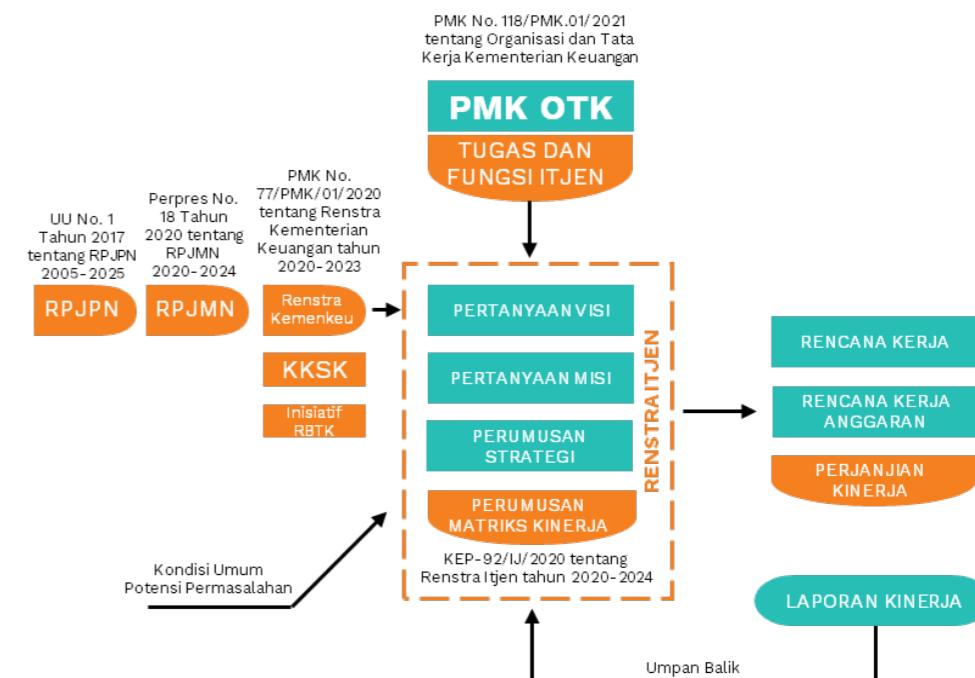
1. **Tata Kelola;** mewujudkan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik
2. **Efisiensi dan Efektivitas;** mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan Kementerian Keuangan
3. **Kepatuhan;** mendorong ketataan terhadap peraturan perundang-undangan
4. **Akuntabilitas;** mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

5. **Pelayanan;** mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik
6. **Integritas;** mencegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang

Melalui misi tersebut Itjen diharapkan mampu memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas serta fungsi dapat bebas dari praktik penyimpangan. Itjen juga dapat membantu manajemen Unit Eselon I lain untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar tools operasional, kontrol, dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik.

Visi dan Misi Itjen di atas telah tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 92/IJ/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, yang disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK), Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK), dan memperhatikan tugas dan fungsi Itjen yang diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018<sup>1</sup> tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Selain visi dan misi, Renstra Itjen juga memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, indikator serta target kinerja dan indikasi kebutuhan pendanaan Itjen untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.

Penyusunan Renstra Itjen juga mempertimbangkan kondisi umum, serta potensi dan permasalahan yang memiliki dampak besar dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Itjen selama periode 2020-2024. Secara umum alur penyusunan Renstra Itjen sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Alur Penyusunan Renstra

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkeu, Itjen sebagai APIP mempunyai beberapa potensi/kekuatan dan peluang serta beberapa kelemahan dan tantangan yang harus diantisipasi. Adapun uraian potensi/kekuatan,

permasalahan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki Itjen adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan eksternal, seperti: rentang kendali pengawasan yang luas; disrupti teknologi; dukungan akses data elektronik yang masih terbatas; belum meratanya pemahaman tentang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal; belum optimalnya pelaksanaan tugas unit kepatuhan internal; berkembangnya model bisnis baru Kemenkeu sebagai CFO; meningkatnya kompleksitas kasus fraud; besarnya alokasi belanja pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19; serta adanya kebijakan baru/perubahan kebijakan dan aturan.
2. Permasalahan internal, seperti: belum meratanya pemahaman auditor tentang tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; belum optimalnya komposisi jumlah auditor dan nonauditor; sinergi pengawasan antar inspektorat; serta belum lengkapnya pedoman penugasan asurans dan konsultansi.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut, Itjen mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan untuk memenuhi harapan para stakeholder sebagai berikut:

1. Dukungan penuh Menteri Keuangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen,
2. Pengawasan yang mencakup peran Menteri Keuangan sebagai CFO dan COO, serta wakil pemerintah dalam kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Visi dan misi yang memberikan arahan jelas,
4. Keterlibatan dalam AAIPI,
5. Terbentuknya Komite Audit,
6. Terbentuknya unit khusus audit TI dan audit investigasi,
7. Penerapan audit dengan memanfaatkan teknologi informasi, penerapan manajemen risiko dan audit berbasis risiko,
8. Diterapkannya three-lines of defense di Kementerian Keuangan,
9. Hasil penilaian mandiri IACM mencapai level 4,
10. Pegawai yang kompeten dan berkualitas, serta
11. Adanya transformasi digital pada Kementerian Keuangan.

Dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kemenkeu. Dari 5 (lima) tujuan tersebut, Itjen memperoleh amanat langsung pada pencapaian 2 (dua) tujuan, yaitu: 1. Tujuan keempat: Pengelolaan perpendidaraan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan 2. Tujuan kelima: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Dalam rangka mendukung 2 (dua) tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Itjen, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan perpendidaraan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali yaitu, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator kinerja berupa Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, yaitu pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

dengan indikator kinerja berupa Indeks Integritas Organisasi dan Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan Bagian Anggaran 015 Kementerian Keuangan (BA 015).

Selanjutnya sasaran strategis atas 2 (dua) tujuan yang dimandatkan pada Renstra Kemenkeu dan juga sasaran strategis lainnya untuk mencapai tujuan Kemenkeu telah dijabarkan menjadi 5 (lima) sasaran strategis Itjen, yaitu:

1. Sasaran strategis Penguatan Integritas dan Kinerja Kementerian Keuangan yang Optimal dengan indikator kinerja, a) Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN, b) Indeks Integritas, dan c) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan;
2. Sasaran strategis Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Berkualitas dengan indikator kinerja, a) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti, dan c) Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan;
3. Sasaran strategis Inovasi Pengawasan yang Efektif dengan indikator kinerja, a) Jumlah Pedoman Pengawasan, dan b) Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit;
4. Sasaran strategis Implementasi Pengawasan Intern yang Strategis dengan indikator kinerja, a) Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti, b) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, dan c) Indeks Efektivitas UKI;
5. Sasaran strategis Penjaminan Kualitas Pengawasan yang Berkelaanjutan dengan indikator kinerja, a) Nilai IACM (Internal Audit Capability Model), dan b) Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AIPI.

Selain visi dan misi, dalam Renstra Itjen juga memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Itjen untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.

Berdasarkan berbagai kondisi, potensi, dan permasalahan di atas, serta pencapaian Rencana Strategis sebelumnya, dalam rangka mencapai visi dan misi serta selaras dengan nilai-nilai Kemenkeu, Itjen menetapkan tujuan program tahun 2020-2024, yaitu Mewujudkan Pengawasan Yang Memberi Nilai Tambah Untuk Memastikan Pencapaian Tujuan Kemenkeu. Perwujudan tujuan tersebut dilakukan dengan cara:

1. memastikan pengelolaan keuangan Kemenkeu secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh Unit Eselon I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. memastikan seluruh arahan dan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu; dan
4. memastikan seluruh sasaran strategi pada empat perspektif yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu.

## B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra Itjen selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Kemenkeu. Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Renja Itjen selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Peta Strategi serta IKU Itjen dan unit-unit di dalamnya yang selanjutnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Itjen. Adapun indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Itjen diselaraskan dengan indikator yang ada di dokumen perencanaan penganggaran (RKA K/L-Rencana Kerja dan Anggaran K/L). Alur penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja Itjen sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.1.

Berdasarkan Renja dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan, Itjen menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi rincian anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Proses penyusunan Renja diawali dengan arahan dari Sekretariat Jenderal pada Forum Sekretaris terkait perencanaan penganggaran tahun 2022, dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan Resource Forum yang merupakan sarana koordinasi antara fungsi pengelola sumber daya dan fungsi teknis yang diinisiasi oleh fungsi perencanaan kinerja dan anggaran di lingkungan Itjen. Forum ini diselenggarakan dalam rangka penetapan target kinerja dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis Itjen serta memberikan panduan dalam rangka penyusunan Renja Itjen. Resource Forum dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Renja lingkup Kemenkeu dalam mengimplementasikan Penganggaran Berbasis Kinerja. Resource Forum dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (sense of ownership) dalam proses perencanaan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (resources).

Resource Forum melibatkan unit-unit di Itjen, yaitu unit-unit di Sekretariat Itjen yang membidangi perencanaan dan keuangan, manajemen kinerja dan risiko, organisasi dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sistem informasi, dan umum serta inspektorat.

Pelaksanaan Resource Forum diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 6/MK.1/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Resource Forum dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Resource Forum bersifat terbuka, dua arah, berbasis bukti dan berorientasi pada perbaikan ke depan serta fokus pada pencapaian outputs dan outcomes. Resource Forum dilaksanakan sebagai bahan dalam pelaksanaan Bilateral Meeting dan Trilateral Meeting.

Sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas penyusunan Renja, penyelenggaraan Resource Forum diselaraskan dengan kebijakan, isu strategis pemilik sumber daya, dan arahan Inspektur Jenderal sehingga pelaksanaan dialog difokuskan pada outcome, output, aktivitas, input, serta indikator kesuksesan dari suatu output dan outcome. Resource Forum mengacu pada beberapa perspektif yaitu historis pencapaian tahun lalu, proyeksi pelaksanaan anggaran tahun berjalan, dan usulan rencana kerja serta inisiatif strategis tahun yang akan datang.

Untuk tahun 2022 dalam RKA Itjen ditetapkan bahwa Itjen menjalankan Program Dukungan Manajemen dan Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dengan anggaran sebesar Rp48.370.846.000,00.

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dengan anggaran Rp2.329.141.000,00 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Rata-rata Indeks Opini BPK atas LK BA 15 dan LK BA BUN dengan target 4 dari skala 4 (WTP) dan Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti dengan target 92%. Target program tersebut akan dicapai melalui kegiatan Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara.
2. Program Dukungan Manajemen diukur dengan anggaran Rp46.041.705.000,00 yang dicapai melalui 5 (lima) kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:a.
  - a. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum, diukur dengan indikator kinerja, yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target 95,5. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp16.857.011.000;
  - b. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, diukur dengan indikator kinerja, yaitu Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dengan target 3,5 (skala 4). Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp405.258.000;
  - c. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM, diukur dengan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dengan target 100. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp19.518.181.000;
  - d. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Indeks Efektivitas UKI dengan target 80 (skala 100) dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti dengan target 97. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp9.198.347.000; dan
  - e. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi, diukur dengan indikator kinerja, yaitu Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK dengan target 90. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp62.908.000.

Adapun target kinerja untuk program dan masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA Itjen tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Target Kinerja dalam Dokumen RKA**

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Uraian	Anggaran Target
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran
	Uraian	Target	
1. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Percentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	92%	Rp2.329.141.000
	Rata-rata Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan LK BA BUN	4 (skala 4)	
	Program Dukungan Manajemen		
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Percentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu	95	Rp16.857.011.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5 (skala 4)	Rp405.258.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Percentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	98,8	Rp19.518.181.000
		80	
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Indeks Efektivitas UKI	(skala 100)	Rp9.198.347.000
	Percentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97	
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Percentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	90	Rp62.908.000

## C. Evaluasi Renstra Itjen

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dan mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian Renstra Tahun 2020–2024 terhadap target jangka menengah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dalam Pasal 15 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra K/L. Dalam Pasal 12 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja K/L dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra K/L dan RPJM Nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra dilakukan proses penyesuaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang lebih mencerminkan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Mengacu pada hasil forum Trilateral Meeting Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu c.q. DJA, disepakati bahwa proses penyesuaian ini tidak perlu

dilakukan dengan melakukan perubahan Renstra Kemenkeu, namun cukup dengan melakukan penyesuaian target dalam dokumen Renja maupun pada Kontrak Kinerja Menteri Keuangan. Hal tersebut mengingat Pasal 20 Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024 yang menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2020-2024 berjalan dapat dilakukan sepanjang (1) terdapat UU yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L.

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan Renja pada tahun-tahun berikutnya, apabila terdapat kondisi di mana terdapat perundang-undangan yang mengharuskan perubahan atas target kinerja pada Renja/RKA K/L Kemenkeu, disepakati bahwa Kemenkeu selaku K/L cukup menyampaikan informasi perubahan tersebut kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu c.q. DJA untuk selanjutnya ditetapkan dalam dokumen kesepakatan selanjutnya forum Trilateral Meeting.

Hal tersebut juga berlaku dalam proses evaluasi Renstra seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu termasuk Itjen. Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan pada Renstra Itjen. Namun, Itjen melakukan penyesuaian atas Sasaran Strategis dalam Peta Strategi Itjen sebagai hasil evaluasi pimpinan agar Sasaran Strategis dapat lebih menggambarkan tugas fungsi atau output dan outcome yang diharapkan dari Itjen. Selain itu, dilakukan penyesuaian target kinerja pada Renstra Itjen 2020-2024 ke dalam Renja dan Kontrak Kinerja Inspektor Jenderal.

Berikut adalah perbandingan target kinerja pada Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja Inspektor Jenderal tahun 2022 pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Perbandingan Target Kinerja dalam Dokumen Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja**

Sasaran Strategis	Renstra		Renja		Kontrak Kinerja		
	IK	Target	IK	Target	Sasaran Strategis	IK	Target
Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Optimal	Rata-rata Indeks Opi-ni BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN	4 (skala 4)	Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN	4 (skala 4)	Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Ber nilai Tambah	Rata-rata Indeks Opi-ni BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN	4 (skala 4)
	Indeks Persepsi Integritas	91	Indeks In-tegritas	91		Indeks In-tegritas	91
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	4,55 (skala 5)	-	-		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	4,55 (skala 5)

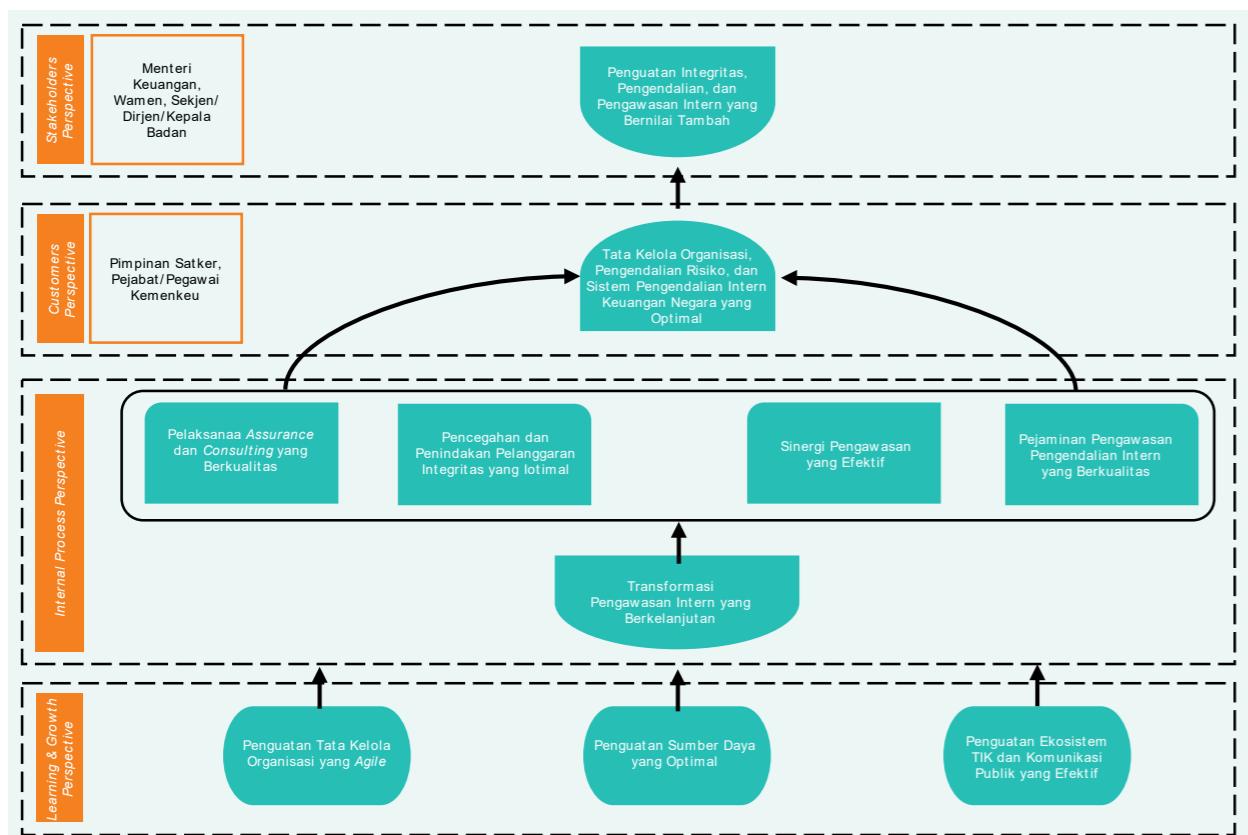
Renstra		Renja		Kontrak Kinerja			
Sasaran Strategis	IK	Target	IK	Target	Sasaran Strategis	IK	Target
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	80,01	-	-	Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal	Indeks Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%	-	-	Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	5	-	-	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	5
Inovasi Pengawasan yang Efektif	Jumlah Pedoman Pengawasan	7	-	-	Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan	Jumlah Pedoman Pengawasan	7
	Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit	60%	-	-	Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit	Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit	80%
Implementasi Pengawasan Intern yang Strategis	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	60%	-	-	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	65%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92%	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	92%	Sinergi Pengawasan yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92%
	Indeks Efektivitas UKI	70	-	-	Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal	Indeks Efektivitas UKI	80

Renstra		Renja		Kontrak Kinerja			
Sasaran Strategis	IK	Target	IK	Target	Sasaran Strategis	IK	Target
Penjaminan Kualitas Pengawasan	Nilai IACM	4	-	-	Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile	Nilai IACM	4
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AIPPI	92	-	-	Penjaminan Pengawasan yang Berkualitas	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AIPPI	92

Seluruh indikator kinerja yang ada di Renstra telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja dengan target yang juga sesuai dengan target Renstra. Namun terdapat beberapa indikator kinerja dengan target pada Kontrak Kinerja yang lebih tinggi dibandingkan Renstra dengan pertimbangan hasil realisasi tahun sebelumnya dan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

## D. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra dan Renja dijabarkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2022, baik pada level Irjen maupun level Pejabat Eselon II. Kontrak Kinerja dilengkapi dengan peta hubungan antar Sasaran Strategis (SS) dalam bentuk Peta Strategi yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Peta Strategi Itjen tahun 2022 mencakup sepuluh SS sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Peta Strategi Itjen 2022

Sebagai alat ukur atas pencapaian sembilan SS di atas, telah ditetapkan 25 (dua puluh lima) IKU seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Target IKU Itjen Tahun 2022

Sasaran Strategis		IKU		Target
1	Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	1a-CP	Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BUN	4 (skala 4)
		1b-CP	Indeks Integritas	91 (skala 100)
		1c-N	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	4,55 (skala 5)
2	Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal	2a-CP	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85
		2b-CP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP <sup>(*)</sup>	4 (skala 5)
		2c-N	Indeks Efektivitas UKI	80

Sasaran Strategis	IKU		Target
3	Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas	3a-N	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan
		3b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
		3c-N	Indeks Kepuasan Layanan Konsultansi <sup>(*)</sup>
4	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal	4a-N	Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas <sup>(*)</sup>
		4b-N	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
		5a-CP	Persentase Communique G-20 usulan Indonesia yang Disepakati <sup>(*)</sup>
5	Sinergi Pengawasan yang Efektif	5b-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
		6a-N	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAPI
		7a-N	Jumlah Pedoman Pengawasan
7	Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan	7b-N	Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit
		7c-N	Persentase Implementasi PIJJ <sup>(*)</sup>
		8a-CP	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu
8	Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile	8b-N	Nilai Internal Audit Capability Model (IACM) (skala 5)
		9a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM <sup>(*)</sup>
		9b-CP	Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu <sup>(*)</sup>
9	Penguatan Sumber Daya yang Optimal	9c-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran
		10a-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK
		10b-CP	Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu <sup>(*)</sup>
10	Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif	10c-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan <sup>(**)</sup> (skala 5)

Sumber: Kontrak Kinerja Inspektur Jenderal 2022

Keterangan:

<sup>(\*)</sup> : Merupakan IKU baru di tahun 2022

<sup>(\*\*)</sup>: Pada tahun 2021 bernama "Indeks Efektivitas Komunikasi Publik"

Sepuluh SS dan dua puluh lima IKU tersebut beserta target dan trajectory masing-masing terangkum dalam Kontrak Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada Lampiran 1.

## BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi  
Tahun 2022
- B. Realisasi Anggaran
- C. Highlight Hasil Pengawasan
- D. Tindak Lanjut atas Evaluasi  
SAKIP Tahun 2021



## A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja Itjen Kemenkeu tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target/rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh bahwa Nilai Kinerja Organisasi Itjen adalah sebesar 109,05. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif**

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	25%	108,58
Customer	15%	107,36
Internal Process	30%	110,51
Learning & Growth	30%	108,83
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>	<b>100%</b>	<b>109,05</b>

Seluruh perspektif mendapatkan nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi terdapat pada Internal Process Perspective dan Learning and Growth sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. NKO Itjen 2022 mengalami penurunan sebesar 0,91 dibanding NKO 2021 109,96. Penurunan tersebut disebabkan adanya 2 (dua) IKU yang tidak memenuhi target. Selama tahun 2022, Itjen berhasil mencapai 23 dari 25 target kinerja yang ditetapkan dan 19 di antaranya melebihi target yang ditetapkan. Adapun realisasi IKU yang di bawah target, yaitu Indeks Integritas dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi. Adapun beberapa penyebab yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

- IKU Indeks Integritas disebabkan masih terdapat pegawai yang menganggap bahwa pencegahan korupsi adalah peran lini kedua dan ketiga saja serta isu efektivitas sosialisasi antikorupsi dan isu perlindungan pelapor masih menjadi risiko yang paling mendapat perhatian responden.
- IKU Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi disebabkan karena ekspektasi/harapan responden yang meningkat dimana Indeks konsultansi adalah 4,7 sedangkan ekspektasi responden 5, gap tersebut mengakibatkan penurunan indeks kepuasan.

Rincian NKO pada tahun 2016-2022 dapat dilihat pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2016-2022**

Pada tahun 2022, Itjen menetapkan 10 (sepuluh) SS dengan total 25 IKU. Capaian IKU Itjen tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Capaian IKU Itjen Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks capaian
<b>Stakeholder Perspective (25%)</b>				
1	Penguatan Integritas, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN	4	4	120 <sup>1</sup>
<b>Customer Perspective (15%)</b>				
2	Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal	85	88,69	104,34
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	4	4,074	101,85
	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	80	92,06	115,08
<b>Internal Process Perspective (30%)</b>				
3	Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas	5	5	100
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	97%	107,89%	111,23
	Percentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	4,59	4,55	99,13
4	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal	2	2	100
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas	65%	84,09%	120
5	Sinergi Pengawasan yang Efektif	70%	94,05%	120
	Percentase Communique G-20 usulan Indonesia yang Disepakati	92%	96,88%	105,30
6	Penjaminan Pengawasan-Pengendalian Intern yang Berkualitas	92	95,89	104,23
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AIPI	7	9	120
7	Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan	80%	97%	120
	Jumlah Pedoman Pengawasan	80%	99,77%	120
	Percentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit	100	116,93%	116,93
<b>Learning &amp; Growth Perspective (30%)</b>				
8	Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile	92%	100%	108,70
	Percentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	4	4	100
	Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	100	116,93%	116,93
9	Penguatan Sumber Daya yang Optimal			
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM			

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks capaian
	Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	91,75%	111,49	120
	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	98,13	102,75
10	Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif			
	Tingkat Penyelesaian Proyek Strategis TIK	90%	100%	111,11
	Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu	100%	107,5%	107,50
	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,55	3,84	108,17
	<b>Nilai Kinerja Organisasi Itjen 2022</b>			<b>109,05</b>

Penjelasan capaian IKU selama tahun 2022, baik untuk Stakeholder dan Customer Perspective maupun perspektif lainnya secara keseluruhan adalah sebagaimana dalam uraian berikut.

### SASARAN STRATEGIS 1: PENGUATAN INTEGRITAS, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL YANG BERNILAI TAMBAH

Sasaran Strategis ini terkait dengan tujuan pengawasan Itjen untuk berperan serta dalam meningkatkan integritas dan kinerja Kemenkeu. Sasaran ini juga mendukung 2 (dua) dari 5 (lima) program Kementerian Keuangan yaitu Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dan Program Dukungan Manajemen. Sasaran strategis ini dijabarkan dalam 3 indikator kinerja seperti dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Capaian IKU SS Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah**

<b>SS 1: Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah</b>				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1a	Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BA BUN	4	4	120
1b	Indeks integritas	91	89,45	98,3
1c	Indeks kepuasan pemangku kepentingan	4,55	4,61	101,32

#### 1a. Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BUN

Opini dari BPK RI adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi Bendahara Umum Negara (BUN) dan Laporan Keuangan BA 015 Tahun Anggaran 2021. Opini BPK atas LK BA 015 dan LK BA BUN dikonversi dalam indeks 1 s.d. 4, di mana:

- 1 = Tidak Wajar (Adverse),
- 2 = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer),
- 3 = Wajar Dengan Pengecualian,
- 4 = Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk Wajar Dengan Pengecualian, dikonversi dalam indeks:

- 3,00 = 4 pengecualian atau lebih,
- 3,25 = 3 pengecualian,

3,50 = 2 pengecualian,  
3,75 = 1 pengecualian.

Perhitungan IKU dihitung dengan bobot LK BA 015: LK BA BUN adalah 50%:50%.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 49a/LHP/XV/05/2022 tanggal 28 Mei 2022 dan Nomor 45.a/LHP/XV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, BPK RI menyatakan bahwa LK BA 015 dan LK BA BUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan BPK atas LK BA BUN dan LK BA 015 di tahun 2022 menunjukkan bahwa LK BA 015 dan LK BA BUN tahun anggaran 2021 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, baik dari posisi keuangan Bendahara Umum Negara tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, maupun perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Seluruh komponen tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dengan demikian realisasi IKU Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BA BUN pada tahun 2022 adalah sebesar 4 dari target nilai indeks 4 dengan indeks capaian IKU didapat sebesar 120 (konversi 120). Adapun rincian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Capaian IKU Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN**

Inspektorat Jenderal	Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	Ia-CP	Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP	
Target	-	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	-	4 (WTP)	Max/TLK	
Realisasi	-	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	-	4 (WTP)		
Capaian	-	120	120	120	-	120		

Untuk memastikan bahwa LK BA 015 dan LK BA BUN yang disusun menyajikan informasi yang andal dan akuntabel, Itjen melaksanakan beberapa kegiatan pengawasan berupa:

1. Reviu atas LK BA BUN Tahun Anggaran 2021, antara lain:
  - a. Reviu LK UAKBUN Daerah;
  - b. Reviu LK UAP BUN BA 999.01 (Pengelolaan Utang), 999.02 (Pengelolaan Hibah), 999.04 (Pemberian Pinjaman), 999.99 (Transaksi Khusus), LK BUN Pusat TK UAPBUN AP, LK UBL (Unit Badan Lainnya); dan
  - c. Reviu atas LK Konsolidasian BUN.
2. Reviu PIPK atas Pelaporan Keuangan TA 2021, antara lain:
  - a. Reviu PIPK pada UAKBUN Daerah, LK BA 999.01, LK BA 999.02, LK BA 999.04, LK BA 999.99; dan
  - b. Reviu PIPK LK BUN Pusat TK UAPBUN AP, LK UAPBUN UBL, dan LK BUN Konsolidasian TA 2021.
3. Reviu laporan keuangan dan reviu PIPK BA 15.
4. Pendampingan terhadap pelaksanaan pemeriksaan BPK (tripartied meeting).

Adapun beberapa tantangan yang terjadi dan dapat menjadi potensi tidak tercapainya target IKU ini adalah:

- Audit scope yang luas dari BPK RI sehingga Itjen harus berkomunikasi secara intensif dan terbuka dengan Klien pengawasan guna mengantisipasi area-area yang dinilai rawan dan berpotensi menjadi temuan.
- Frekuensi permintaan reviu Laporan Keuangan cukup sering sehingga penyelesaian atas setiap kegiatan reviu dituntut untuk cepat dan akurat, namun sumber daya yang tersedia terbatas.
- Kondisi luar biasa akibat pandemi Covid-19 membuat Pemerintah harus bekerja cepat menyusun kebijakan-kebijakan untuk penanggulangan ekonomi, yang apabila tidak dikawal proses pelaksanaannya akan berpotensi menjadi temuan pada pemeriksaan BPK tahun 2023.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, Itjen melakukan extra effort untuk memastikan tercapainya IKU ini, melalui:

- memetakan risiko-risiko temuan yang dapat mempengaruhi opini LK serta menyusun mitigasi risiko dengan memanfaatkan media video meeting untuk pembahasan;
- melaksanaan Reviu LK menggunakan aplikasi e-review yang memanfaatkan IT Based Reviu dan data analytics yang membantu dalam memperluas cakupan reviu dan dalam penentuan sampel satker.
- mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembahasan saat penyusunan tanggapan dan tindak lanjut rekomendasi BPK serta memonitor proses pelaksanaan audit BPK;
- meningkatkan koordinasi dengan mitra pengawasan, baik pada saat reviu maupun pelaksanaan audit oleh BPK RI melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- menyusun pedoman dan memberikan masukan terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kemenkeu dan Pemerintah terkait penanggulangan ekonomi sebagai dampak Covid-19.

Pada tahun 2022, LK BA 015 dan LK BA BUN berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama empat tahun berturut-turut. Menjaga pencapaian opini agar tetap WTP bukan tanpa kerja keras, karena diperlukan kerja sama dan sinergi dari seluruh Unit Eselon I agar prestasi ini dapat tetap dipertahankan. Realisasi Indikator Kinerja terkait indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BA BUN telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Indeks opini dalam kurun waktu 2017-2023, disajikan dalam Gambar 3.2.



IKU Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN sejalan dengan program pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 terkait Sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa pemerintah menargetkan opini WTP sebanyak 92% atas Laporan Keuangan K/L tahun 2020.

Dengan diperolehnya opini WTP dari BPK untuk LK BA 015 dan LK BA BUN, Kemenkeu turut mendukung pencapaian target dalam RPJMN tersebut. Adapun rincian target dan capaian IKU ini di level kementerian dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Perbandingan dengan Target Lainnya

1a-CP Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN	2020		2021		2022	
	T	R	T	R	T	R
Renstra Itjen	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
Renstra Kemenkeu	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
RPJMN	91% K/L memperoleh WTP	96,5% K/L memperoleh WTP	92% K/L memperoleh WTP	97,7% K/L memperoleh WTP	92% K/L memperoleh WTP*	97,7% K/L memperoleh WTP*

\*LHP LKPP 2021

Itjen sendiri memperoleh IKU tersebut melalui cascading dari KK Menteri Keuangan (Kemenkeu-Wide). Kontribusi Itjen terhadap capaian opini WTP atas LK BA 15 dan LK BA BUN dilakukan melalui kegiatan reviu dan pendampingan penyusunan LK BA 015 dan LK BA BUN dimulai sejak TA 2008.

Pada tahun 2023, Itjen akan berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas LK BA 015 dan LK BUN mengingat telah tercapainya target dan mencapai indeks opini BPK tertinggi. Hal ini dilakukan dengan menjaga kualitas kegiatan pengawasan seperti reviu atas LK BA 015 dan LK BUN dan reviu atas PIPK dan pemanfaatan teknologi, serta pendampingan terhadap pelaksanaan pemeriksaan BPK.

### 1a. Indeks Integritas

IKU Indeks Integritas bertujuan untuk memotret kejadian-kejadian yang dinilai memengaruhi penilaian internal (pegawai Kemenkeu) maupun eksternal (pengguna jasa/layanan Kemenkeu) terhadap integritas Kemenkeu. Salah satu cara untuk mengukur indeks integritas yaitu melalui penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas (SPI). Semakin tinggi nilai indeks integritas suatu instansi, maka menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik juga. Indeks Integritas merupakan gabungan dari komponen penilaian internal, komponen penilaian eksternal, komponen Focus Group Discussion (FGD) dan dikurangi faktor koreksi.

Pelaksanaan SPI Kemenkeu pada periode tahun 2018-2021 dilakukan oleh Itjen selaku Unit in Charge (UIC) mulai dari pelaksanaan dan pengolahan survei, sampai dengan pelaporan hasil SPI. Pada tahun 2022, terdapat perubahan metode dalam pelaksanaan SPI yaitu untuk pengiriman tautan survei, penggunaan platform, dan pengolahan data, sepenuhnya dilaksanakan oleh KPK. Adapun untuk pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan In Depth Interview pasca pelaksanaan survei tetap dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2022, Inspektorat Jenderal Kemenkeu memperoleh nilai dari komponen penilaian internal, eksternal dan FGD sebesar 91,04, namun terdapat pengurangan karena masih ditemukan kejadian pelanggaran integritas (faktor koreksi) sehingga nilai akhir indeks integritas yang diperoleh Inspektorat Jenderal sebesar 89,45 dari target 91 (skala 0-100). Capaian atas IKU Indeks Integritas pada tahun 2022 masih berada di bawah target dalam Renstra Itjen 2020-2024, yaitu 91 seperti pada Tabel 3.6.

**Tabel 3. 6 Capaian IKU Indeks Integritas**

Inspektorat Jenderal	Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah						
	1b-CP Indeks Integritas						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	-	-	-	-	91	91	
Realisasi	-	-	-	-	89,45	89,45	Max/TLK
Capaian	-	-	-	-	98,30	98,30	

Capaian IKU sebesar 89,45 tersebut menunjukkan bahwa upaya dan komitmen penguatan integritas merupakan sesuatu yang harus terus-menerus digalakkan antara lain dengan melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan.

Perubahan metode penilaian di tahun 2022 memunculkan tantangan baru bagi Itjen dalam pencapaian target IKU Indeks Integritas, sehingga dalam rangka untuk memastikan tercapainya target IKU Indeks Integritas, Itjen telah melakukan beberapa extra effort, di antaranya:

1. melakukan kegiatan pencegahan secara berkelanjutan dan memastikan bahwa kampanye anti korupsi telah dilaksanakan oleh mitra pengawasan secara berkala melalui berbagai media;
2. melakukan koordinasi dengan KPK secara intens dan berkelanjutan dalam pemantauan progres pengiriman survei dan membahas solusi dari kendala yang dihadapi;
3. melaksanakan kegiatan FGD dengan responden internal maupun eksternal dan In Depth Interview dengan beberapa perwakilan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
4. menjaga komunikasi dan melakukan koordinasi dengan UKI Eselon I terkait pemantauan survei daring dan kendalanya.

Pada tahun 2023, akan dilakukan perubahan formula penghitungan Indeks Integritas menyesuaikan perubahan yang dilakukan oleh KPK, yaitu dengan memasukkan unsur apresiasi yang terdiri atas tindak lanjut hasil SPI tahun 2022 dan realisasi kegiatan pencegahan. Perubahan formula tersebut lebih mendorong Itjen untuk melakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan indeks integritas sesuai dengan target yang ditetapkan, diantaranya melalui:

1. peningkatan peran aktif pimpinan dalam memberikan keteladanan dan mengimplementasikan pesan anti korupsi,
2. penerapan Kerangka Kerja Integritas,
3. pemanfaatan profiling dan Fraud Risk Scenario,
4. peningkatan kualitas pengelolaan SDM,
5. penguatan sistem pencegahan korupsi, dan
6. melakukan koordinasi dalam merancang rencana tanggap isu integritas hasil survei 2022.

#### 1b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Indeks kepuasan pemangku kepentingan adalah hasil dari survei kepuasan yang dilakukan Itjen kepada Menteri, Wakil Menteri, Komite Audit, dan/atau Pimpinan Unit Eselon dan NonEselon I atas kinerja Itjen selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan atas kinerja Itjen secara umum yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan, atas kegiatan pengawasan yang dilakukan Itjen selama tahun berjalan.

Pengukuran survei terhadap pemangku kepentingan Itjen menggunakan skala 1 s.d. 5 dan hasilnya dihitung sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan. Pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020, IKU ini mengalami penyesuaian target yaitu dari 4,5 (target Renstra) menjadi 4,40. Pada tahun 2021, target tersebut ditetapkan sama yaitu 4,40 mengingat kondisi pandemi yang masih terjadi sehingga risiko ketidakpastian yang dapat menghambat pelaksanaan tugas masih ada. Namun, pada tahun 2022 target IKU mengalami penyesuaian kembali mengingat pandemi Covid-19 yang berangsur membaik, sehingga target IKU ini ditetapkan sama seperti rencana strategis Itjen.

Rincian hasil survei per komponen dan per Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Rincian Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan

No.	Komponen	MK	WMK	DJBC	DJPB	DJPPR	DJKN	BKF	DJA	DJK	BPPK	LNSW	Komite Audit
1	Keselarasan Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Itjen dalam mendukung tujuan unit Saudara	NA	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4,33
2	Sinergi antara Itjen dengan seluruh unit dalam menciptakan hubungan yang sehat dan mendukung pencapaian tujuan unit Saudara	NA	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4,33
3	Peran aktif Itjen dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan unit Saudara	NA	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Kontribusi Itjen dalam mendukung penyelesaian permasalahan/isu strategis di lingkungan unit Saudara	NA	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4,33
5	Kontribusi Itjen dalam mencegah, mendekripsi, dan menindak penyimpangan integritas di lingkungan unit Saudara	NA	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4,33
6	Ketepatan waktu, kualitas, dan manfaat hasil pengawasan Itjen dalam mendukung pengambilan keputusan strategis unit Saudara	NA	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4

No.	Komponen	MK	WMK	DJBC	DJPB	DJPPR	DJKN	BKF	DJA	DJK	BPPK	LNSW	Komite Audit
7	Kapabilitas Itjen selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap unit Saudara	NA	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
Rata-Rata		NA	4,43	5	4,71	5	5	5	4,29	4,71	5	5	4,47
			4,43										4,80
Inspektorat Jenderal													4,61

Dengan demikian realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pemangku kepentingan adalah 4,61 dari target 4,55 dengan indeks capaian sebesar 101,32. Adapun rincian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 3.8.

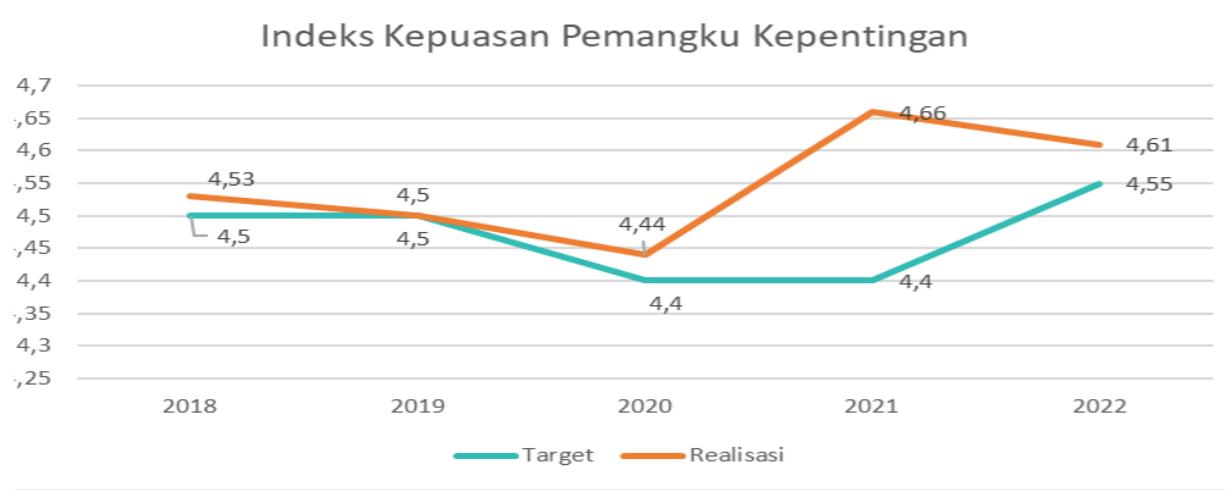
Tabel 3. 8 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Inspektorat Jenderal	Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah 1c-N Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan							
	T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4,55 (skala 5)	4,55 (skala 5)	
Realisasi	-	-	-	-	-	4,61	4,61	Max/TLK
Capaian	-	-	-	-	-	101,32	101,32	

Tantangan yang dihadapi Itjen dalam mencapai target IKU ini adalah proses pengawasan dengan penyesuaian kondisi Covid-19 memberikan risiko adanya ketidaknyamanan dan ketidakpuasan klien pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Itjen melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang ada dengan penyesuaian yang memang perlu dilakukan serta monitoring dan pemberian arahan oleh pimpinan. Selain itu, untuk memastikan tercapainya target IKU ini, Itjen juga melakukan extra effort, di antaranya:

1. Bersikap lebih proaktif dalam melakukan asistensi di masa penanganan pandemi, karena klien pengawasan akan membutuhkan pertimbangan dan pandangan dari Itjen dalam mengambil kebijakan terutama di bidang anggaran, penerimaan, belanja, dan pembiayaan selama masa pandemi.
2. Menjaga komunikasi tujuan pengawasan selama masa pandemi dilakukan dengan tidak menghambat klien pengawasan yang sedang menangani kebijakan Covid-19.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta koordinasi dengan seluruh APIP K/L dan Pemerintah Daerah terkait pengawasan program PEN.

Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan skor 4,61 menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan secara umum merasa puas dengan kinerja Itjen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Itjen masih dapat berperan baik dalam meningkatkan integritas dan kinerja Kemenkeu walaupun dengan keterbatasan yang ada di tengah pandemi Covid-19 ini. Berikut adalah tren Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Itjen yang dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan 2018-2022

Capaian IKU ini mengalami penurunan sebesar 0,05 dari capaian tahun 2021 sebesar 4,66. Akan tetapi, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan target pada Renstra Itjen 2020-2024 sebesar 4,55 seperti dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam Renstra Itjen 2020-2024 dan Kontrak Kinerja Itjen

Indikator Kinerja	Target		Realisasi
	Renstra	Kontrak Kinerja	
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	4,55	4,55	4,61

IKU ini bukan merupakan cascade dari KK Menteri Keuangan dan tidak terdapat dalam RPJMN maupun target-target nasional lainnya. Oleh karena itu capaian atas target ini tidak dapat dibandingkan dengan target level kementerian maupun level nasional.

Pada tahun 2023, target IKU ini akan disesuaikan kembali dengan target pada Renstra yaitu 4,55. Untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, Itjen sebagai strategic partner akan memperkuat sinergi & koordinasi antar unit eselon I, meningkatkan pemahaman proses bisnis klien pengawasan yang senantiasa berkembang, & memperkuat fungsi Itjen sebagai early warning system organisasi. Selain itu, sesuai dengan harapan pimpinan, Itjen juga berperan aktif dalam pengawasan atas fungsi Menteri Keuangan sebagai BUN dan wakil pemerintah dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

## SASARAN STRATEGIS 2: TATA KELOLA ORGANISASI, PENGELOLAAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN INTERN KEUANGAN NEGARA YANG OPTIMAL

Sasaran strategis ini terkait dengan misi utama Itjen sebagai unit pengawas intern dalam mewujudkan Governance, Risk, and Control (GRC) dalam pengelolaan keuangan negara yang optimal di lingkungan Kementerian Keuangan, melalui kegiatan pengawasan dengan cara memberikan asurans, advis, dan wawasan berbasis risiko dan objektif. Rincian capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Capaian IKU SS Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal

### SS 2: Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2a Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85	88,69	104,34
2b Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4	4,074	101,85
2c Indeks Efektivitas UKI	80	92,06	115,08

#### 2a. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan kegiatan validasi/verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terhadap hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah beserta unit kerja di dalamnya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pengukuran kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment) yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020.

Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (self-assessment) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kemenkeu sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRB melalui dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil. Komponen Penilaian PMPRB sejak 2020 adalah sebagai berikut:

##### 1. Komponen Pengungkit

###### a. Reform (30%);

b. Mandatory (20%);

c. Kewajiban (10%);

## 2. Komponen Hasil (40%)

Berikut adalah agenda yang telah dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi selama tahun 2022:

1. Pemetaan dan permintaan Narasi, Dokumen, dan Person in Charge (PIC) dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun 2022 kepada seluruh UIC melalui ND-642/IJ.1/2022 tanggal 23 Februari 2022;
2. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Itjen Tahun 2022 (Link Itjen: <https://bit.ly/ITJENPMPRB2022>, Link Pusat: <https://bit.ly/PUSATPMPRB2022>);
3. Bedah LKE Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 bersama dengan CTO, Inspektorat VII, dan seluruh asesor UE-I sebagai salah satu strategi optimalisasi pencapaian hasil PMPRB Tahun 2022 pada tanggal 17 s.d. 18 Maret 2022 berdasarkan UND-55/IJ.8/2022 tanggal 11 Maret 2022;
4. Penyampaian tanggapan dan rencana tindak lanjut atas LHE RB Kemenkeu 2021 yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal melalui ND-1599/IJ.1/2022 tanggal 10 Juni 2022;
5. Finalisasi pengisian LKE PMPRB Kementerian Keuangan Tahun 2022 dan telah disampaikan kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB (S-102/SJ/2022);
6. Rapat Pleno Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Keuangan Tahun 2022 pada tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan UND-8/TRBTKP.3/200 tanggal 9 Juni 2022;
7. Pembahasan persiapan evaluasi RB dan SAKIP 2022 Kementerian Keuangan pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan UND-15/TRBTKP.3/2022 tanggal 22 September 2022;
8. Evaluasi dan pendalaman atas RB dan SAKIP 2022 Kementerian Keuangan pada 29 September 2022 berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB tanggal 16 September 2022; dan UND-16/TRBTKP.3/2022 tanggal 22 September 2022.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi pada Komponen Penilaian PMPRB Kemenkeu Tahun 2020 dan 2021.

Tabel 3. 11 Rincian Hasil Evaluasi Komponen Penilaian PMPRB

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
I	Pemenuhan (20%)			
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,88	1,94
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,13	1,15
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,37	2,44
4.	Penataan Tatalaksana	2,50	2,32	2,38
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	3,00	2,83	2,91
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,11	2,15
7.	Penguatan Pengawasan	2,50	2,21	2,27
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,16	2,21
	Total Area Pemenuhan (I)	20,00	17,03	17,45
II	Hasil Antara (10%)			
	Total Area Hasil Antara (II)	10,00	8,39	8,46
III	Reform (30%)			
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,27	2,16
2.	Deregulasi Kebijakan	3,00	2,76	2,57
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	3,88	3,97
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	3,75
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	4,50	3,2	3,29
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,28	3,09
7.	Penguatan Pengawasan	3,75	3,43	3,22
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,35	3,12
	Total Area Reform (III)	30,00	25,91	25,17
	Total Komponen Pengungkit (A= I + II + III)	60,00	51,33	51,09
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	9,17	9,21
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,30	9,44
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,63	9,24
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,21	9,71
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	36,30	37,60
	Indeks Reformasi Birokrasi (A + B)	100,00	87,63	88,69

Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 7 kategori penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Kategori Hasil Penilaian PMPRB

No	Kategori	Nilai		Interpretasi
		Angka		
1	AA	> 90-100	Istimewa	
2	A	> 80-90	Memuaskan	

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
3	BB	> 70-80	Sangat Baik
4	B	> 60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50-60	Cukup (Memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 2022 diukur berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 oleh KemenPANRB. Berdasarkan Surat Menteri Pidayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/42/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, hasil penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Keuangan Tahun 2021 telah ditetapkan sebesar 88,69 (skala 100) dengan kategori "A". Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenkeu mendapatkan kategori memuaskan, yang berarti Kemenkeu telah memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja tetapi belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran reformasi birokrasi, baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja

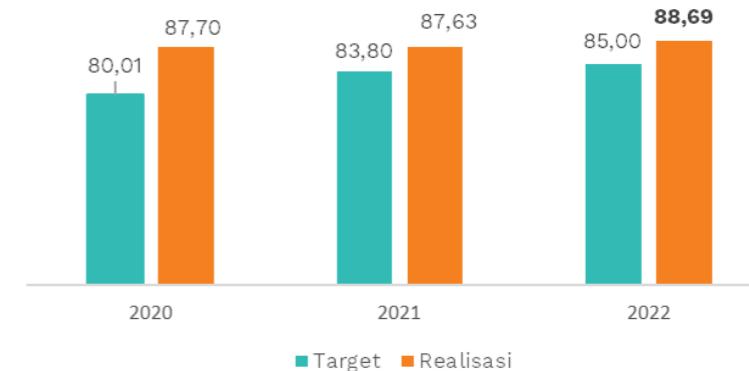
IKU ini memiliki target sebesar 85 di tahun 2022. Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 88,69, capaian IKU ini menjadi 104,34. Rincian capaian IKU dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.

Tabel 3. 13 Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Inspektorat Jenderal	Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal						
	2a-CP Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	85	
Realisasi	-	-	-	-	-	88,69	Max/TLK
Capaian	-	-	-	-	-	104,34	

Tercapainya Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi ikut mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, yaitu membentuk organisasi yang agile, efektif, dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik.

Realisasi IKU pada tahun 2022 sebesar 88,69 mengalami kenaikan 1,06 poin dari realisasi tahun 2021 sebesar 87,63. Perbandingan capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dari tahun 2020-2022 disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 3. 4 Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 2020-2022

Realisasi sebesar 88,69 tersebut juga melebihi target Renstra Itjen 2020-2024 seperti dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut.

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam Renstra Itjen 2020-2024 dan Kontrak Kinerja Itjen

Indikator Kinerja	Target		Realisasi
	Renstra	Kontrak Kinerja	
Nilai Evaluasi Birokrasi	80,2	85	88,69

IKU ini merupakan cascade dari Kemenkeu-Wide dengan target IKU sebesar 85. Dengan realisasi indeks capaian sebesar 104,34, Itjen turut mendukung pencapaian target IKU tingkat Kemenkeu-Wide.

Beberapa inovasi dan hal yang dilakukan Itjen untuk mencapai nilai 88,69 atau kategori A, di antaranya:

#### 1. Manajemen Perubahan

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta menindaklanjuti hasil evaluasi;
- Sosialisasi/Internalisasi Road Map/ Rencana Kerja Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan dan disampaikan baik secara langsung maupun melalui nota dinas kepada seluruh pejabat/pegawai di Lingkungan Itjen;
- Itjen telah memiliki Duta Transformasi (Agent of Change (AOC)) yang terdiri dari Change Leader dan Lighthouse Team;
- Berperan sebagai penganggung jawab fungsi pengelolaan reformasi birokrasi telah ditetapkan menjadi fungsi Sekretaris Itjen melalui PMK 217/PMK.01/2018 sebagaimana telah dicabut dengan berlakunya PMK 118/PMK.01/2021 yang memuat delapan area perubahan;

- Pelaksanaan Kegiatan Penguatan program Knowing Your Employee dan Penguatan Integritas Aparatur. Penguatan Integritas Aparatur dilakukan melalui Pemanfaatan Penyalah Antikorupsi dan penyempurnaan Kerangka Kerja Integritas.
- 2. Deregulasi Kebijakan
  - Inspektorat Jenderal, telah melakukan identifikasi, analisis, dan revisi kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat baik di lingkungan Inspektorat Jenderal maupun di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain:
    - a. Koordinasi dengan Biro Hukum Setjen Kemenkeu terkait usulan revisi PMK Whistleblowing melalui ND-404/IJ/2021 tentang Penyampaian Daftar Rencana Pembentukan PMK/KMK Kebijakan Tahun 2022; dan
    - b. Penetapan revisi PMK TKPI melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.09/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
  - Pelaksanaan kajian organisasi Itjen tahun 2021, antara lain meliputi evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, evaluasi jenjang organisasi, evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja, evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan mandat, evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
- 4. Penataan Tata Laksana
  - Penetapan beberapa SOP, baik revisi SOP maupun penyusunan SOP baru.
  - Evaluasi dan pemutakhiran proses bisnis dan SOP di lingkungan Itjen sebagai respons atas penetapan PMK Nomor 118/PMK.01/2021.
  - Penyusunan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dan pelaksanaan evaluasi SOP terkait PPID.
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
  - Transformasi digital pada proses bisnis utama, antara lain:
    - a. Penerapan Aplikasi Teammate+;
    - b. Pengawasan intern jarak jauh atau remote auditing;
    - c. Penerapan data analytics;
    - d. Pemanfaatan teknologi script pada aplikasi ACL untuk continuous audit;
    - e. Penggunaan aplikasi E-Mawas PNBP;
- 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - Perhitungan kebutuhan pegawai di Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan dengan menyusun Laporan Analisis Beban Kerja Inspektorat Jenderal.
  - Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan pelaksanaan kegiatan pelatihan/workshop/in house training.
  - Telah dilaksanakan penyusunan Program Kerja Pemantauan Kode Etik dan Disiplin (PKED) secara Daring dan mulai dilaksanakan pada tahun 2021.
  - Analisis jabatan atas seluruh jabatan struktural di lingkungan Itjen (baik sekretariat maupun inspektorat) telah selesai dilaksanakan, sehingga telah dihasilkan Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Itjen sesuai dengan amanat PMK 118/PMK.01/2021.
  - Analisis jabatan bagi jabatan fungsional di lingkungan Itjen masih dalam proses analisis dan pembahasan internal.
  - Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi.
  - Pelaksanaan evaluasi jabatan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ.
- 6. Penguatan Akuntabilitas
  - Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan renstra, penetapan kinerja, pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.
  - Pelaksanaan kegiatan pengembangan terkait akuntabilitas kinerja.
  - Pemutakhiran data kinerja secara berkala.
- 7. Penguatan Pengawasan
  - Pelaksanaan sosialisasi, antara lain Pengendalian Gratifikasi Pihak Eksternal Itjen; Survei Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Itjen; Penggunaan Aplikasi WISE, Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Itjen.
  - Penyusunan Keputusan Inspektur Jenderal nomor 19/IJ/2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
  - Penetapan revisi atas PMK 7/PMK.09/2019, yakni PMK 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
  - Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Itjen secara berkala.

- Evaluasi Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) dan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) Inspektorat Jenderal.

- Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi WISE Kementerian Keuangan.
- Asistensi pembangunan ZI WBK/WBBM.

#### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan di lingkungan Itjen, sehingga standar pelayanan yang sebelumnya ditetapkan melalui KEP-177/IJ/2014 telah dicabut dan ditetapkan kembali melalui KEP-199/IJ/2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2023, Itjen akan kembali melakukan monitoring dan koordinasi dengan pihak terkait atas Penilaian Mandiri Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB), terutama terkait komponen-komponen penilaian yang perlu diperbaiki pemenuhannya.

#### 2b. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri Keuangan selaku pimpinan Kementerian Keuangan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui KMK tersebut, Kementerian Keuangan menggunakan pendekatan Model Tiga Lini yang merupakan penyempurnaan dari pendekatan Tiga Lini Pertahanan. Pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawab utama dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern adalah manajemen operasional sebagai Lini Pertama. Kemudian, untuk membantu Lini Pertama sekaligus memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tersebut telah diimplementasikan secara efektif, dilakukan pemantauan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) selaku Lini Kedua. Sedangkan Lini Ketiga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan asuransi yang independen dan objektif serta konsultansi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

Tabel 3. 15 Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No.	Komponen	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
a.	Kualitas Sasaran Strategis	1	
b.	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2	Struktur dan Proses	25	30%
a.	Lingkungan Pengendalian	8	
b.	Penilaian Risiko	2	
c.	Kegiatan Pengendalian	11	
d.	Informasi dan Komunikasi	2	
e.	Pemantauan	2	
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	7	30%
a.	Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi	2	
b.	keandalan pelaporan keuangan	1	
c.	pengamanan aset negara	3	
d.	ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	1	

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan Kementerian Keuangan, dan telah melalui proses evaluasi oleh BPKP, pada tahun 2022 didapatkan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan sebesar 4,074, berada pada tingkat "Terkelola dan Terukur" atau tingkat 4 dari skala 5. Dengan perolehan tingkat maturitas "Terkelola dan Terukur", menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, serta pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP "terkelola dan terukur" telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Rincian hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Keuangan Tahun 2022 yang telah dilakukan evaluasi oleh BPKP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 16 Rincian Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenkeu

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan	5	2,000
2	Struktur dan Proses	3,863	1,159
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3,050	0,915

	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		4,074
- MRI			4,50
- IEPK			3,26
- Kapabilitas APIP			4

Adapun rincian hasil penilaian per masing-masing komponen yang dinilai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 17 Rincian Hasil Penilaian per Masing-Masing Komponen

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai Unsur
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2,50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2,50
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100%		5,00
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40%		2,000
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>			
Lingkungan Pengendalian	30%	3,67	1,10
Penilaian Risiko	20%	4,52	0,91
Kegiatan Pengendalian	25%	3,73	0,93
Informasi dan Komunikasi	10%	4,00	0,40
Pemantauan	15%	3,50	0,53
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100%		3,86
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30%		1,159
<b>PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP</b>			
Efektivitas dan Efisiensi			
Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	15%	5	0,75
Capaian Output	15%	5	0,75
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10%	3	0,30
Keamanan Fisik	5%	2	0,10
Keamanan Hukum	10%	2	0,20
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan - BPK-RI	20%	1	0,20
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100%		3,05

BOBOT HASIL	30%		0,915
TOTAL NILAI MATORITAS PENYELENGGARAAN SPIP			4,074

Sehingga rincian capaian IKU ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 18 Capaian IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022

Inspektorat Jenderal	Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal							
	2b-CP Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP	
Target	-	-	-	-	4	4		
Realisasi	-	-	-	-	4,07	4,07		
Capaian	-	-	-	-	101,85	101,85		
								Max/TLK

IKU ini merupakan cascade dari Kemenkeu-Wide. Target IKU ini merupakan target baru di tahun 2022 sehingga tidak mempunyai data banding dari tahun sebelumnya.

## 2c. Indeks Efektifitas UKI

Dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Kemenkeu menggunakan pendekatan model tiga lini yang merupakan penyempurnaan dari pendekatan Three lines of defense (Tiga Lini Pertahanan). Pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawab utama dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern adalah manajemen operasional sebagai Lini Pertama. Kemudian, untuk membantu Lini Pertama sekaligus memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tersebut telah diimplementasikan secara efektif, dilakukan pemantauan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) selaku Lini Kedua. Sedangkan Lini Ketiga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan asuransi yang independen dan objektif serta konsultansi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) merupakan suatu indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI untuk membantu manajemen dalam rangka memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas UKI di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian indeks efektivitas UKI dilakukan oleh auditor pada Inspektorat I s.d. VII sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan penilaian, hasil penilaian oleh setiap Inspektorat dilakukan penjaminan kualitas (quality assurance). Quality assurance atas hasil penilaian Inspektorat I s.d. VI dilakukan oleh Inspektorat VII pada akhir bulan Desember 2022. Sedangkan quality assurance atas hasil penilaian Inspektorat VII dilakukan quality

assurance oleh Inspektorat Bidang Investigasi pada awal bulan Januari 2022. Hasil penilaian yang telah dilakukan quality assurance menjadi realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Efektivitas UKI tahun 2022 dan merupakan mirroring realisasi pada Unit Eselon I. Rincian hasil penilaian/indeks per Inspektorat dan Klien Pengawasan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.19.

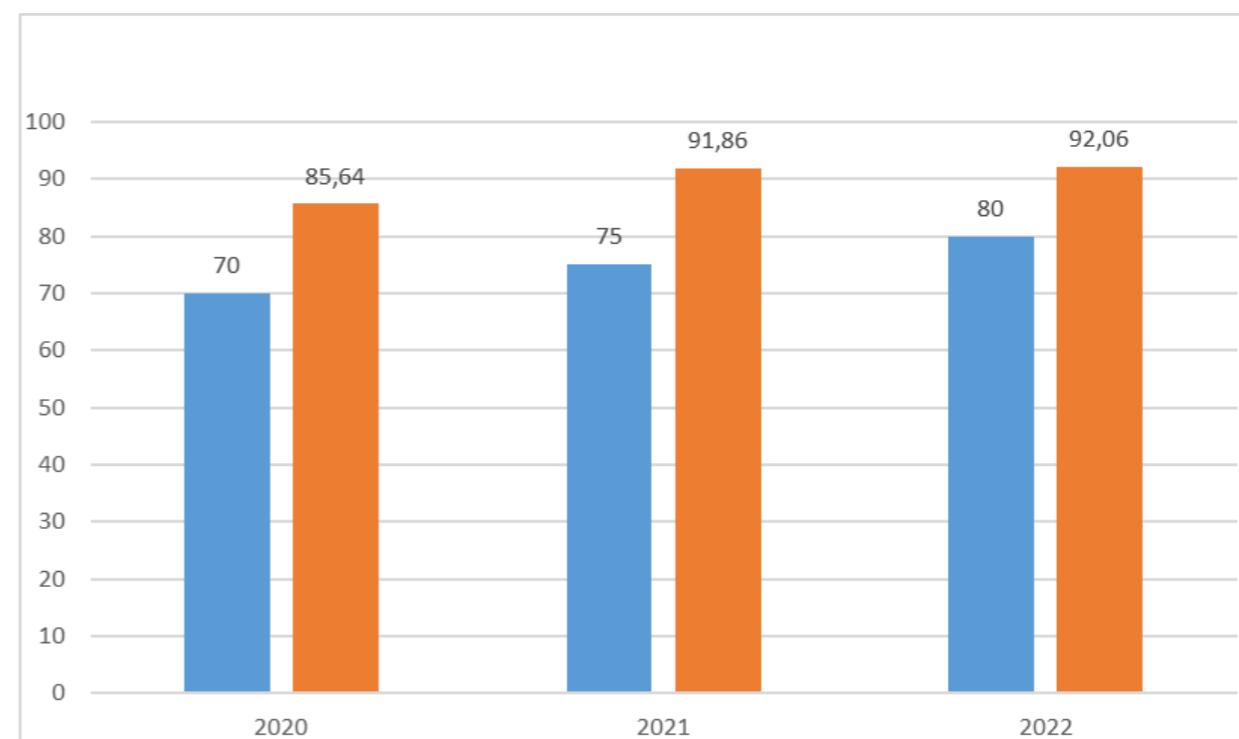
**Tabel 3. 19 Rincian Indeks Efektivitas UKI per Inspektorat dan Klien Pengawasan**

No	Nama Unit	Indeks	Indeks Klien Pengawasan	
1	Inspektorat I	88,90	DJP	88,90
2	Inspektorat II	91,46	DJBC	86,53
			LNSW	96,38
3	Inspektorat III	93,51	DJPb	91,60
			DJPPR	95,42
4	Inspektorat IV	91,87	DJKN	89,56
			BKF	94,18
5	Inspektorat V	92,31	DJA	92,53
			DJPK	92,09
6	Inspektorat VI	91,04	Sekretariat Jenderal	91,45
			BPPK	90,62
7	Inspektorat VII	95,35	Sekretariat Itjen	95,35
Inspektorat Jenderal		92,06		

Realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI merupakan rata-rata realisasi Inspektorat I s.d. VII, dengan hasil sebesar 92,06 dari target 80 sehingga indeks capaian sebesar 115,08%. Adapun rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 3.32. Tercapainya IKU Indeks Efektivitas UKI menunjukkan kapabilitas Itjen dalam memperkuat komitmen UKI Eselon I untuk membantu manajemen dalam pemantauan implementasi pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu.

2. pembahasan komponen penilaian dengan UKI tingkat Eselon I (UKI-E1) pada seluruh Unit Eselon I, untuk mendapatkan perangkat penilaian yang akurat;
3. melakukan asistensi dan pembinaan terhadap UKI-E1 melalui Auditor Mitra UKI;
4. pembahasan Hasil penilaian IKU dengan klien pengawasan agar diperoleh kesepakatan, dan dilakukan quality assurance untuk memastikan bahwa penilaian telah dilakukan sesuai pedoman.

Salah satu tantangan dalam penilaian IKU ini adalah transisi KMK sebelumnya pada ketentuan baru. Beberapa hal masih mengacu pada KMK sebelumnya sehingga kurang selaras terhadap perubahan ketentuannya. Adapun untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat VII selaku auditor mitra UKI Itjen akan melakukan asistensi sepanjang tahun dan berkoordinasi dengan UKI Itjen.



**Tabel 3. 20 Capaian IKU Indeks Efektivitas UKI Tahun 2022**

Inspektorat Jenderal	Implementasi Pengawasan Intern yang Strategis 2c-N Indeks Efektivitas UKI							
	T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	-	80	
Realisasi	-	-	-	-	-	-	92,06	Max/TLK
Capaian	-	-	-	-	-	-	115,08	

Untuk memastikan pencapaian target IKU, Itjen melakukan berbagai upaya, yaitu:

1. penyempurnaan pedoman penilaian IKU Indeks efektivitas UKI pada tahun 2022 agar sesuai dengan perubahan ketentuan terkait penerapan dan pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana ditetapkan melalui KMK-322/KMK.09/2021 dan KMK-477/KMK.09/2021

IKU ini pertama kali diterapkan pada tahun 2020. Target dan realisasi IKU 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Perbandingan capaian IKU mulai tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagaimana disajikan pada Gambar 3.9. Selain itu, IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal pada level Kemenkeu-One hanya terdapat pada Itjen sehingga realisasinya juga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Unit Eselon I lain pada level Kemenkeu-One. Pada Unit Eselon I lain IKU ini hanya mandatory pada level Kemenkeu-Two. Adapun perbandingan target IKU Indeks Efektivitas UKI pada Kontrak Kinerja Itjen dengan target pada Renstra disajikan dalam Tabel 3.21.

**Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI target IKU dalam Renstra dan Kontrak Kinerja**

Indikator Kinerja	Renstra	Target	Realisasi
Indeks Efektivitas UKI	70	80	92,06

### SASARAN STRATEGIS 3: PELAKSANAAN ASSURANCE DAN CONSULTING YANG BERKUALITAS

SS ini terkait dengan tugas dan fungsi utama Itjen sebagai unit pengawas intern dalam melakukan kegiatan pengawasan baik berupa asurans maupun konsultansi dengan memberikan rekomendasi yang strategis, pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi, serta pemberian saran dan jasa lainnya yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi Kementerian Keuangan. Rincian capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 3.20.

**Tabel 3. 22 Capaian IKU SS Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas**

SS 3: Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3a Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	5	5	100
3b Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%	107,89%	111,23
3c Indeks Kepuasan Layanan Konsultansi	4,59	4,55	99,13

#### 3a. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

Jumlah rekomendasi adalah rekomendasi hasil pengawasan Itjen selama tahun berjalan berdasarkan area pengawasan yang tercantum dalam PKPT dan telah dikelompokkan sesuai Tema Program RSPP Kementerian Keuangan. Rekomendasi Inspektor Jenderal, sebanyak 5 (lima) rekomendasi sesuai dengan tema program RSPP Kementerian Keuangan dan dikirimkan ke Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Inspektur Jenderal. Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan atas 5 (lima) tema Program RSPP Kementerian Keuangan tersebut berisi rangkuman kumpulan Ikhtisar Hasil Area Pengawasan beserta Rekomendasi sesuai tema program RSPP yang disusun dan disampaikan oleh UIC Area Pengawasan kepada Koordinator. Dalam hal Ikhtisar Hasil Area Pengawasan belum tersedia sampai dengan periode pelaporan capaian IKU, maka bukti capaian IKU menggunakan ND Koordinator ke Inspektur Jenderal. IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pengawasan Itjen dalam membantu meningkatkan kinerja Unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan sebesar 100 dengan rincian pada Tabel 3.23.

**Tabel 3. 23 Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan**

Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas						
	3a-N Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-22	Max/TLK
	-	-	-	-	5	5	
Target	-	-	-	-	5	5	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	100,00	100,00	
Capaian	-	-	-	-	100,00	100,00	

Tantangan dalam mencapai IKU ini adalah terbatasnya pelaksanaan penugasan ke lapangan, refocusing kegiatan pengawasan, dan Automatic Adjustment (AA) di masa pandemi COVID-19. Meskipun terdapat keterbatasan tersebut, Itjen tetap mengupayakan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan dengan melakukan beberapa penyesuaian, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi yang mendukung peran Itjen untuk melaksanakan fungsi pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022, antara lain: corporate finance, pengukuran kinerja organisasi BUMN, tata kelola terkait subsidi dan kompensasi, dan tata kelola terkait Special Mission Vehicle (SMV) di Kemenkeu.
2. Memperluas ruang lingkup koordinasi dalam melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022, yaitu tidak hanya dengan internal Kemenkeu, tetapi juga dengan eksternal Kemenkeu (K/L/D dan BUMN).
3. Membentuk squad team di lingkup internal Itjen melalui KEP-61/IJ/2022 tentang Pembentukan Tim Dukungan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pengawasan Badan Penyelenggara Asuransi/Jaminan Sosial dan Badan Pengelola Dana Masyarakat.
4. Memutakhirkan kegiatan pengawasan dan efektivitas penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 dengan melakukan perubahan atas perencanaan tahunan kegiatan pengawasan melalui revisi program kerja pengawasan tahunan.
5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai program kerja dan dalam upaya meningkatkan koordinasi dengan mitra pengawasan.
6. Melakukan kegiatan pengawasan secara jarak jauh atau remote audit karena masih diberlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Realisasi capaian 5 rekomendasi hasil pengawasan tersebut juga mencapai target di Renstra Itjen sebanyak 5 rekomendasi. Berikut adalah perbandingan target IKU dalam renstra dan kontrak kinerja Itjen beserta realisasinya pada Tabel 3.24.

**Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan dalam Renstra Itjen 2020-2024 dan Kontrak Kinerja Itjen 2022**

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target KK 2022	Realisasi
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	5	5	5

Tercapainya IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan ini menunjukkan keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Itjen dalam membantu meningkatkan kinerja Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu untuk mendukung perbaikan organisasi Kemenkeu. IKU ini bukan merupakan cascade dari KK Menteri Keuangan dan tidak terdapat dalam RPJMN ataupun target-target nasional lain sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan target tingkat kementerian dan nasional.

Pada tahun 2023, untuk mencapai target IKU ini Itjen akan melakukan pengawasan terkait 5 program RSPP Kementerian Keuangan. Namun tidak hanya jumlah rekomendasi, namun diharapkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan semakin meningkat.

### 3b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Itjen, berupa:

1. Persentase Policy recommendation (polrec) hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 100% (bobot 30%)

Policy recommendation adalah langkah tindak yang disampaikan secara tertulis oleh Inspektur Jenderal atau Inspektur atas nama Inspektur Jenderal kepada Sekjen/Dirjen/Kepala Badan untuk mengubah peraturan/keputusan/ketentuan yang sudah ada dan/atau membuat peraturan/keputusan/ketentuan baru. Yang dimaksud persentase ditindaklanjuti adalah progres tindak lanjut yang dilakukan oleh unit eselon I terhadap policy recommendation dari Itjen sesuai dengan yang telah disepakati.

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen (data Teamcentral dan Teammate+ minus polrec) dengan target 97% (bobot 40%)

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Itjen yakni rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang selesai ditindaklanjuti klien pengawasan & ditetapkan/dinyatakan tuntas baik melalui Teamcentral atau Teammate+ (dasar: PMK 109/PMK.09/2021 tentang TKPI).

3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hukuman disiplin oleh IBI dengan target 100% (bobot 30%)

Terdapat 2 komponen penilaian persentase tindak lanjut rekomendasi hukdis, yaitu hasil tindak lanjut rekomendasi hukdis berdasarkan laporan audit internal Itjen atau Tim Pemeriksa (Bobot 30%) dan koordinasi, bimbingan dan konsultasi permasalahan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi

hukuman disiplin (Bobot 70%).

Sampai dengan Triwulan IV, capaian masing-masing komponen IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti seperti pada Tabel 3.25.

**Tabel 3. 25 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Per Komponen**

Komponen IKU	Triwulan IV Bobot	Capaian per komponen
Persentase polrec hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	30%	111,33%
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen	40%	99,06%
Persentase tindak lanjut rekomendasi hukuman disiplin (IBI)	30%	116,23%
Realisasi IKU	100%	107,89%

Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di tahun 2022 sebesar 107,89% dari target 97%, sehingga indeks capaian adalah sebesar 111,23 seperti pada Tabel 3.26.

**Tabel 3. 26 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti**

Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas 3b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti							Max/TLK
	T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-22	
Target	35%	40%	40%	60%	97%	97%	97%	
Realisasi	90,02%	86,83%	86,83%	104,32%	107,89%	107,89%	107,89%	
Capaian	120	120	120	120	120	111,23	111,23	

Di tahun 2022, pencapaian IKU ini masih menghadapi beberapa tantangan meskipun pandemi Covid-19 berangsur membaik. Tantangan yang dihadapi antara lain komitmen klien pengawasan yang masih kurang, UIC, perubahan situasi dan kondisi menimbulkan hal-hal baru yang tidak sejalan lagi dengan temuan, perubahan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai, hasil pengawasan tidak memberi nilai, dan masih terdapat pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin. Meskipun demikian, realisasi IKU ini tetap memenuhi target yang ditetapkan. Itjen melakukan berbagai upaya untuk mencapai target yang ditetapkan dan mengatasi tantangan yang ada di antaranya:

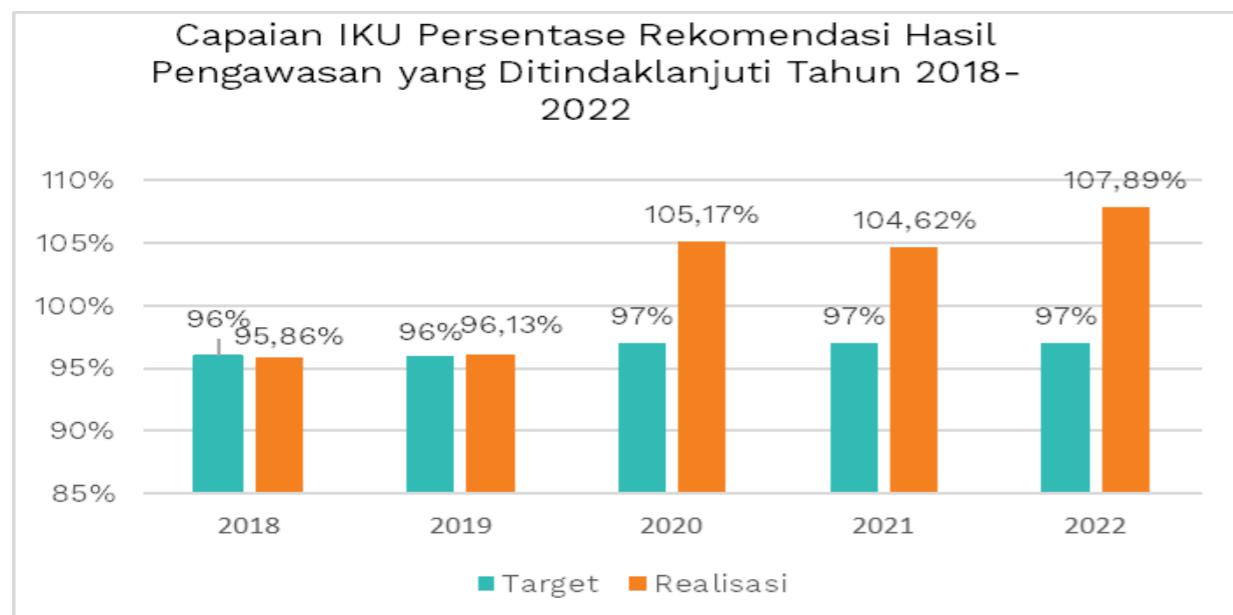
1. Melakukan pembahasan TL polrec secara berkala dan melakukan penilaian tindak lanjut melalui Teamcentral tepat waktu.
2. Berkoordinasi dengan KI Klien Pengawasan, diantaranya dengan memberikan mandatory IKU tersebut ke unit yang menangani Kepatuhan Internal pada setiap Unit Eselon I.
3. Melakukan pembahasan dengan klien pengawasan untuk melakukan pemetaan dan

perencanaan ulang penyelesaian rekomendasi.

#### 4. Monitoring TeamCentral dan Teammate+ atas rekomendasi polrec maupun non polrec.

IKU ini baru dibuat pada tahun 2018 dengan menggabungkan 3 indikator pada SS Kepatuhan klien Pengawasan yang Tinggi tahun 2017, yaitu IKU Persentase Rekomendasi BPK yang Telah Ditindaklanjuti, IKU Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti, dan IKU Persentase Rekomendasi Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti. Berikut adalah rincian target dan realisasi dari ketiga IKU tersebut selama 4 tahun terakhir sebagaimana disajikan pada Gambar 3.4.

Sejak tahun 2018, capaian IKU ini terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Itjen dan Unit-unit Eselon I dalam mengupayakan perbaikan kebijakan serta organisasi Kemenkeu melalui penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Itjen.



Gambar 3.6 Capaian per Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Tahun 2018-2022

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti sebesar 107,89% juga telah melebihi target pada Renstra Itjen sebesar 97% seperti dapat dilihat pada Tabel 3.27.

**Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti dalam Renstra Itjen 2020-2024 dan Kontrak Kinerja Itjen**

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target KK	Realisasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%	97%	107,89%

IKU ini tidak terdapat dalam Kontrak Kinerja Menteri Keuangan, RPJMN, maupun target-target nasional lainnya sehingga capaianya tidak dapat dibandingkan.

Pada tahun 2023, melihat capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti yang selalu meningkat setiap tahunnya, upaya yang selama ini dilakukan akan terus dilakukan dan ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya. Diantaranya dengan mempertahankan kegiatan asistensi tindak lanjut pengawasan Itjen, pemantauan tindak lanjut di tiap unit eselon I, pembahasan tindak lanjut serta koordinasi dengan UKI klien pengawasan.

#### 3c. Indeks Kepuasan Layanan Konsultansi

IKU Indeks Kepuasan Layanan Konsultansi bertujuan untuk menilai Kepuasan Klien Pengawasan terhadap Kegiatan Konsultansi Inspektorat Jenderal. Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan atau stakeholders lainnya. Kepuasan layanan diukur berdasarkan 11 (sebelas) aspek pelayanan publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 4 (empat) aspek pengukuran terkait e-services yang merupakan indikator pelayanan public digital (e-government). Selain itu pelaksanaan survey juga bekerja sama dengan Tim Peneliti Independen yang berasal dari Universitas Padjadjaran. Pada tahun 2022, pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Konsultansi dilaksanakan atas layanan

Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun aspek pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) aspek pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009, yaitu:
  - a. Keterbukaan;
  - b. Informasi Layanan;
  - c. Kesesuaian Prosedur;
  - d. Sikap Pegawai;
  - e. Kemampuan/Keterampilan Pegawai;
  - f. Lingkungan Pendukung;
  - g. Akses Layanan;
  - h. Waktu;
  - i. Pembayaran/biaya Sanksi/Denda
  - j. Keamanan; dan
  - k. Lingkungan.

2. 4 (empat) aspek pengukuran e-services, yaitu:

- a. e-service efficiency;
- b. e-service reliability;
- c. e-service customer support; dan
- d. e-service security.

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi tahun 2022 adalah sebesar 4,55 dari target 4,59. Ketidaktercapaian target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi antara lain disebabkan meningkatnya ekspektasi pengguna layanan. Hal tersebut berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim survey kepada Pengguna Layanan, nilai kualitas menunjukkan angka sebesar 4,7 dengan nilai harapan 5,0. Nilai harapan tersebut meningkat signifikan dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi nilai akhir skor indeks yang diperoleh Inspektorat Jenderal.

Perbandingan target dan capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi sebagaimana terlampir pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi

Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas						
	3c-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	4,59	4,59	
Realisasi	-	-	-	-	4,55	4,55	
Capaian	-	-	-	-	99,13	99,13	Max/TLK

Sementara itu, IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat merupakan IKU baru di tahun 2022. Namun, dalam rangka menunjang tercapainya target IKU Itjen kemenkeu melakukan perubahan metode pemberian layanan konsultansi, sebelumnya layanan dilakukan secara luring akan tetapi sejak pandemi covid -19 layanan dilakukan juga secara daring.

Pada tahun 2023, untuk memenuhi nilai harapan dari stakeholders, Itjen akan meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pendidikan dan pelatihan sebagai sarana meningkatkan kompetensi pemberi layanan apabila diperlukan.

## SASARAN STRATEGIS 4: PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN INTEGRITAS YANG OPTIMAL

SS ini terkait dengan kemampuan Itjen dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran integritas melalui kegiatan pencegahan korupsi yang efektif dan tepat sasaran, penindakan pelanggaran yang akurat, operasi saber pungli, serta tindak lanjut pengaduan yang optimal. Rincian capaian dari SS ini dapat dilihat pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29 Capaian IKU SS Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal

SS 4: Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4a	Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas	2	2	100
4b	Percentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	65%	84,09%	120

### 4a. Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas

IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan Pelanggaran Integritas adalah IKU yang menghitung rekomendasi hasil pengawasan Itjen selama tahun berjalan berdasarkan area pengawasan yang tercantum dalam PKPT terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran integritas. Pengukuran realisasi merupakan output akhir dari area pengawasan pencegahan dan penindakan di PKPT. Selama tahun 2022, sebagai output dari kegiatan pencegahan dan penindakan, Itjen telah menerbitkan 2 (dua) rekomendasi berupa laporan hasil pencegahan dan laporan hasil penindakan pelanggaran integritas dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Pencegahan

Laporan hasil pencegahan memuat upaya yang dilakukan Itjen dalam mencegah terjadinya pelanggaran integritas. Upaya pencegahan dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, antara lain:

- a. Koordinasi Pencegahan serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas Kegiatan Sosialisasi/ Internalisasi oleh Unit Eselon I, LNSW, dan BLU

Dalam rangka implementasi KMK-323/KMK.09/2021 dan untuk mewujudkan peran aktif Lini Pertama, Lini Kedua, dan Lini Ketiga, Itjen mengimbau UE I/II/III, LNSW, dan BLU untuk melaksanakan sosialisasi antikorupsi. Inspektorat Jenderal telah menyusun Pedoman Sosialisasi Antikorupsi yang berisikan tata cara pelaksanaan sosialisasi dengan menyertakan tujuh pilihan tema yaitu tema Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System, Kerangka Kerja Integritas, Budaya Antikorupsi, Kode Etik Kementerian Keuangan, dan Bijak Bermedia Sosial.

Itjen juga meminta komitmen seluruh pimpinan unit untuk menjadi pembawa materi sosialisasi. Hal ini merupakan bentuk konkret implementasi tone-at-the-top agar pesan

antikorupsi dapat dengan tegas ditangkap oleh jajaran pegawai. Selain itu, Itjen juga melaksanakan monev atas pelaksanaan sosialisasi antikorupsi tersebut.

Di samping kegiatan sosialisasi pada unit kerja, Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal selaku Lini Ketiga juga tetap melaksanakan pembekalan nilai integritas. Pembekalan nilai integritas tersebut, antara lain dilaksanakan pada kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru PKN STAN, Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan, dan dukungan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBK/WBBM).

#### b. Pembentukan Helpdesk Pencegahan

Sesuai dengan roadmap Helpdesk Pencegahan tahun 2021 s.d. 2023, Itjen telah menyusun pedoman pelaksanaan Helpdesk Pencegahan pada tahun 2021. Selanjutnya, selama tahun 2022 telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka pembentukan Helpdesk Pencegahan berupa:

##### 1) Studi Tiru dalam rangka pembentukan Helpdesk Pencegahan

Pada tahun 2022, Itjen melakukan studi tiru yang bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan fraud dari beberapa instansi/badan hukum yang telah memiliki sistem pencegahan/antifraud. Itjen melaksanakan studi tiru pada PT Pertamina Persero dan Otoritas Jasa Keuangan.

##### 2) Penyusunan Frequently Asked Questions (FAQ)

Sebagai salah satu fitur dalam helpdesk pencegahan, FAQ merupakan komponen penting untuk mempermudah pelayanan konsultasi terkait situasi integritas yang dialami oleh pegawai. FAQ terbagi dalam 8 tema dan disusun dari peraturan/kebijakan yang terkait tema FAQ serta dokumentasi tanya jawab dari kegiatan Irjen Menyapa dan Sosialisasi Antikorupsi. Sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan, FAQ tersebut akan terus diperbarui seiring dengan adanya perubahan peraturan dan/atau dinamika yang ada.

##### 3) Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) Helpdesk Pencegahan.

Pada tahun 2022 Itjen melakukan perubahan atas SOP Helpdesk Pencegahan dengan melakukan beberapa penyesuaian pada dasar hukum, output, dan prosedur kerja. Saat ini konsep SOP tersebut sedang dalam proses reviu sebelum dilakukan penetapan.

#### c. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)

Dalam penyelenggaraan peringatan Hakordia tahun 2022, Itjen berkolaborasi dengan seluruh Unit Eselon I, LNSW, dan BLU/Special Mission Vehicles (SMV) untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan Road to Hakordia, meliputi:

- 1) 16 webinar/sharing session dengan tema integritas;
- 2) Lelang gratifikasi sebagai tindak lanjut pelaporan gratifikasi dan bagian dari pencegahan korupsi;
- 3) Edukasi generasi muda di tingkat SD s.d. SMA melalui kurikulum antikorupsi pada Kementerian Keuangan Mengajar ke-7 tahun 2022;

4) Lima lomba bertemakan integritas yaitu cipta puisi, jingle antikorupsi, call for paper bertemakan good governance dalam pencegahan fraud, film, dan video animasi edukatif;

5) e-Quiz untuk mengukur pemahaman antikorupsi; dan

6) Kampanye Antikorupsi melalui kegiatan funbike oleh Komunitas Sepeda Kementerian Keuangan.

#### d. Pelaksanaan 9 Aksi Pencegahan Korupsi dalam mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Dari 12 Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK), Kementerian Keuangan turut melaksanakan 9 Aksi PK dengan berkolaborasi bersama Kementerian/Lembaga lain, yaitu:

- 1) Perbaikan Tata Kelola Impor/Eksport melalui Sistem Database yang Akurat dan Mutakhir serta Mekanisme Pengawasan Melekat di Sektor Pangan Strategis dan Kesehatan;
- 2) Pemanfaatan Data Beneficial Ownership untuk Penanganan Perkara Tipikor, TPPU, Terorisme, dan Kejahatan Pajak;
- 3) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik;
- 4) Implementasi e-Payment dan e-Catalogue;
- 5) Peningkatan Penerimaan Negara melalui Pemberhanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai;
- 6) Pemanfaatan Big Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektorial Berbasis NIK;
- 7) Penguatan Tata Laksana dan Pengawasan di Kawasan Pelabuhan;
- 8) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional; dan
- 9) Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum.

Itjen selaku Focal Point dan Admin JAGA Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan pelaporan progress Aksi PK yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Dengan dilakukannya pemantauan dan pelaporan Aksi PK, diharapkan dapat menutup celah praktik korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan dan nasional.

#### 2. Kegiatan Penindakan

Selain kegiatan pencegahan, Itjen juga tetap mengintensifkan strategi penindakan terhadap pelanggar integritas. Kegiatan penindakan merupakan salah satu bentuk penguatan integritas di Kementerian Keuangan, dengan harapan agar punishment/sanksi berupa hukuman disiplin dapat memberikan deterrent effect kepada pegawai serta memberikan peringatan di level organisasi untuk membenahi tata kelolanya sehingga kejadian pelanggaran disiplin bisa terhindarkan di kemudian hari. Strategi penindakan dilakukan antara lain melalui:

a. Penanganan Pengaduan

Sepanjang tahun 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan 19 kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan 4 kegiatan penindakan berupa audit investigasi yang memberikan 9 rekomendasi hukuman disiplin.

Berdasarkan temuan-temuan hasil audit investigasi, beberapa modus yang perlu menjadi perhatian antara lain penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan penerimaan suap.

b. Spotcheck

Sepanjang tahun 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatan pengawasan langsung (spotcheck) sebagai early warning system dan monitoring atas kegiatan impor dan ekspor. Kegiatan spotcheck dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemeriksaan fisik barang di bidang kepabeanan.

Ruang lingkup spotcheck dan pengawasan kegiatan kepabeanan berupa permintaan atensi atas dugaan importasi tidak sesuai pemberitahuan yang tersebar pada 4 (empat) pelabuhan besar yaitu KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC TMP Cikarang, KPPBC TMP Tanjung Emas, dan KPPBC TMP Tanjung Perak. Dari hasil kegiatan spotcheck, dihasilkan nota pembetulan (notul) yang meningkatkan potensi penerimaan negara dan pencegahan barang-barang larangan terbatas (lartas) tanpa izin masuk ke luar wilayah pabean.

Selain itu, dihasilkan juga beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan dan rencana kerja yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan barang kepabeanan ke depannya.

c. Clearance

Dalam rangka mendukung pengelolaan SDM yang berintegritas dan transparan, Itjen telah melakukan proses penelusuran rekam jejak (clearance) baik berdasarkan riwayat hukuman disiplin, riwayat pengaduan, rekam jejak digital, informasi transaksi keuangan, maupun informasi lainnya. Hasil dari penelusuran tersebut dijadikan pertimbangan dalam proses mutasi, promosi, manajemen talenta, pengusulan beasiswa, dan pengusulan unit untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Selama tahun 2022, telah dilakukan clearance terhadap 11.126 pejabat/pegawai dan 605 unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

d. Saber Pungli

Itjen melakukan kegiatan pemantauan atas layanan unit-unit dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan tugas pemberantasan pungutan liar (saber pungli) di lingkungan Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian sejumlah kasus, yakni dengan KPK dan POLRI.

Dalam melaksanakan strategi penindakan, Itjen berkoordinasi secara intensif dengan APH dan/atau kelompok masyarakat dan pihak lain, menjalin kerjasama yang rutin dan masif dengan instansi penyedia data yang digunakan untuk kepentingan penindakan, seperti KPK, PPATK, atau instansi lainnya, serta membuat pengaturan yang lebih jelas dan spesifik terkait personil/SDM yang menjalankan tugas kegiatan pengawasan maupun non

pengawasan.

Realisasi berupa dua laporan tersebut telah mencapai target. Dengan demikian, capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas adalah sebesar 100.

**Tabel 3. 30 Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas**

Inspektorat Jenderal	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal						
	4a-N Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	2	2
Realisasi	-	-	-	-	-	2	2
Capaian	-	-	-	-	-	100	100

Meskipun capaian telah mencapai target, Itjen akan senantiasa melanjutkan upaya penguatan dan komitmen integritas yang telah dilaksanakan.

#### 4b. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti adalah informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu (secara langsung maupun tidak langsung) yang diadministrasikan melalui Aplikasi Whistleblowing System (WISE) dan ditindaklanjuti oleh pengelola pengaduan masyarakat Kemenkeu, yaitu:

1. Itjen, berupa pengaduan yang dianalisis dan ditindaklanjuti oleh tim pengkaji sampai dengan Nota Dinas Kajian kepada Inspektorat Bidang Investigasi, dengan ketentuan paling lambat 30 hari setelah pengaduan tersebut diterima oleh IBI (sesuai ketentuan Perpres Nomor 76 Tahun 2013 dan KMK nomor 149/KMK.09/2011) melalui Aplikasi WISE (termasuk pelimpahan pengaduan dari Unit Eselon I lain).
2. Unit Kepatuhan Internal Eselon I selaku Unit Pengelola Pengaduan Eselon I terkait, berupa pengaduan yang berasal dari pelimpahan pengaduan dari Itjen d.h.i. IBI, kemudian dianalisis dan ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I terkait dan disampaikan tanggapan atas pengaduan tersebut kepada IBI baik berupa Nota Dinas Pimpinan Unit Kepatuhan Internal maupun melalui Aplikasi WISE yang memuat hasil kajian atas pengaduan tersebut.

Pada tahun 2022, IBI menerima capaian realisasi sebesar 84,09% atau telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 65% dari pengaduan yang diterima, dengan indeks capaian sebesar 120,00. Berikut data tindak lanjut pengaduan masyarakat selama tahun 2022 pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31 Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan IBI Tahun 2022

Status Pengaduan Layak TL	Jumlah	Ditindaklanjuti Tepat Waktu	On Progress	Terlambat	%
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(ii)/(i)x50%
	112				
ITJEN	(77 Fraud, 35 Non-fraud)	103	9	0	45,98%
Pelimpahan ke UKI	(87 Fraud, 493 Non-fraud)	580	138	0	38,10%
Total	692	545	147	0	84,09%

Dengan realisasi sebesar 84,09% dari target 65%, capaian IKU ini adalah 120. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Inspektorat Jenderal	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal						
	4b-N Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	65%	65%	65%	65%	65%	65%	
Realisasi	62,27%	68,25	68,25	71,80	84,09%	84,09%	Max/TLK
Capaian	95,80%	105%	105%	110,46%	120,00	120,00	

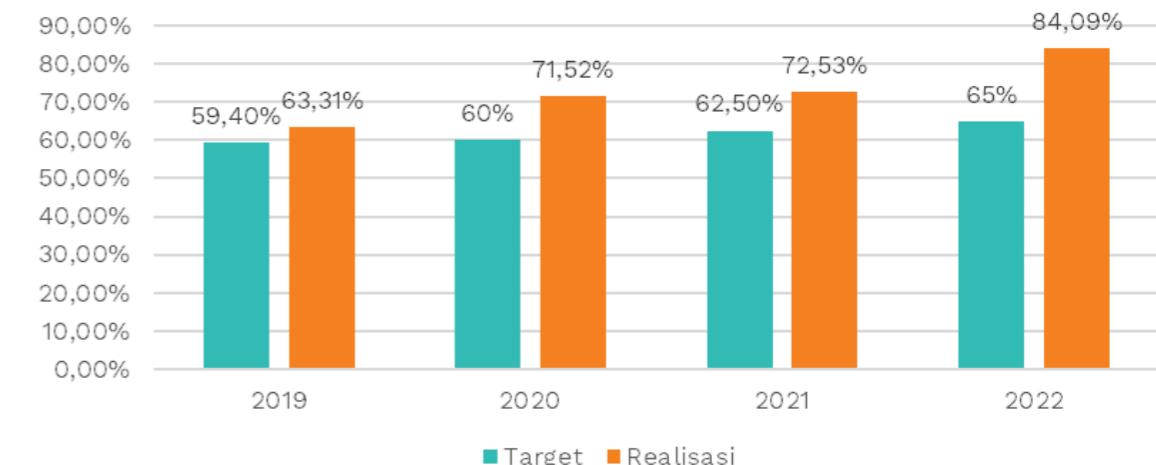
Selama tahun 2022 terdapat beberapa isu utama dalam pelaksanaan tindak lanjut pengaduan yaitu:

1. Saluran Pengaduan yang dikelola Kemenkeu belum sepenuhnya terintegrasi pada satu data; dan
2. Tindak lanjut pengaduan masih belum optimal, salah satunya dibatasi oleh kondisi pandemi Covid-19.

Kendala pelaksanaan tindak lanjut pengaduan tentu dapat berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat pada saluran pengaduan maupun layanan lainnya. Namun untuk mengatasi hal tersebut IBI telah melakukan beberapa tindakan yaitu dengan melakukan monitoring atas tindak lanjut penanganan pengaduan pada Tim Pengkaji IBI maupun UKI Eselon I, pengembangan aplikasi WISE untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tindak lanjut, serta melakukan pembahasan awal proses Integrasi aplikasi WISE dengan saluran pengaduan internal

Target IKU ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 s.d. 2022, namun juga diikuti dengan capaian yang memenuhi target dan naik setiap tahunnya. Perbandingan target dan capaian IKU ini di tahun 2019 s.d. 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Capaian IKU Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun 2019 dan 2022



Gambar 3.7 Perbandingan Capaian IKU Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun 2019 s.d. 2022

Dengan meningkatnya capaian Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti menunjukkan bahwa Itjen semakin berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan yang strategis untuk perbaikan organisasi Kemenkeu.

Realisasi sebesar 84,09% tersebut juga melebihi target di Renstra Itjen sebesar 60%. Berikut adalah perbandingan target IKU dalam renstra dan kontrak kinerja Itjen beserta realisasinya pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan Target dalam Renstra Itjen 2020-2024 dan Kontrak Kinerja Itjen

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Kontrak Kinerja	Realisasi
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	60%	65%	84,09%

Tercapainya IKU Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti menunjukkan komitmen Itjen dalam pencegahan & penindakan praktik penyimpangan yang ada di Kemenkeu.

IKU ini tidak terdapat dalam KK Menteri Keuangan dan RPJMN sehingga capaianya tidak dapat dibandingkan dengan target kementerian maupun target nasional.

Pada tahun 2023, Itjen d.h.i IBI akan melakukan pengembangan dan perbaikan aplikasi sesuai kebutuhan, melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I khususnya terkait integrasi, pertukaran data, dan sosialisasi pengelolaan WISE, serta melakukan pendampingan tindaklanjut pengaduan secara jarak jauh menggunakan media teknologi kepada UKI UE 1.

## SASARAN STRATEGIS 5: SINERGI PENGAWASAN YANG EFEKTIF

SS ini terkait dengan kapabilitas Itjen sebagai unit pengawas intern dalam membangun sinergi yang efektif baik dengan mitra pengawasan maupun dengan unit pengawas eksternal agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Rincian capaian dari SS ini dapat dilihat pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34 Capaian IKU SS Sinergi Pengawasan yang Efektif

SS 5: Sinergi Pengawasan yang Efektif				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5a	Persentase Communique G-20 usulan Indonesia yang Disepakati	70%	94,05%	120
5b	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92%	96,88%	105,30

### 5a. Persentase Communique G-20 usulan Indonesia yang Disepakati

IKU Persentase Communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati mengukur kesepakatan final atas aksi/ kebijakan yang diambil atas isu-isu prioritas yang dibahas dalam rapat Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG). Communique G20 usulan Indonesia diidentifikasi dari kata kunci yang relevan atas isu prioritas pada Jalur Keuangan yang diusulkan Indonesia yang tercantum dalam konsep/rumusan communique terakhir yang disampaikan kepada member sebelum pembahasan pada tingkat deputy (Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD Meeting). IKU ini bertujuan memastikan arah pembahasan dan hasil akhir pembahasan/kesepakatan sesuai dengan target Presidensi G20, terutama pada Jalur Keuangan.

Pada awal tahun 2022 disepakati dokumen yang menjadi acuan dalam pengukuran IKU ini adalah dokumen communique yang merupakan salah satu output dari pertemuan FMCBG Meeting. Adanya isu geopolitik dunia yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina, mempengaruhi dinamika pembahasan isu-isu di G20. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia sebagai koordinator jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia harus lebih tanggap dan berhati-hati untuk menyikapi perkembangan yang ada atas isu-isu tersebut, termasuk mengantisipasi apabila belum tercapainya kesepakatan di dalam FMCBG yang biasanya dinarasikan/ dituangkan dalam sebuah communique. Sebagai respons atas situasi tersebut, dalam Rapat Level Pimpinan Kemenkeu dan Bank Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2022, Menteri Keuangan menyampaikan arahan agar dapat mereview ulang pengukuran IKU Persentase Communique G-20 ini, untuk mengantisipasi keputusan para anggota G20 yang tidak menerbitkan Communique ke-2 pada 3rd FMCBG. Kepala BPK mengusulkan agar dapat dipertimbangkan opsi untuk menggunakan Chair's Summary/ Chair's Statement 3rd FMCBG sebagai dokumen pengganti yang dapat disetarakan untuk pemenuhan IKU tersebut. Berdasarkan hal-hal dimaksud, pada tanggal 7 Juli 2022, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan

Iklim dan Multilateral mengusulkan perubahan manual IKU, yaitu dengan menambahkan dokumen Chair's Summary/ Chair's Statement yang menjadi acuan dalam pengukuran IKU, dengan trajectory dan target tetap sama.

Dalam rangka untuk pencapaian target presidensi, serangkaian strategi dilakukan oleh Kementerian Keuangan, diantaranya melakukan mapping negara dalam kategori wajib negosiasi serta monitoring kondisi global. Monitoring rencana kerja G20 di bawah Presidensi Indonesia, termasuk rencana kerja dan pembahasan isu substansi pada level teknis melalui working group dan workstream pada finance track. Melakukan konsultasi dengan negara troika melalui serangkaian pertemuan online, dan melakukan konsultasi dengan para co-chair melalui surat elektronik terkait dengan naskah communique dan/atau chair summary. Serta, menyampaikan communique kepada member dan organisasi-organisasi internasional selama beberapa kali putaran untuk mendapat tanggapan.

Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari pertemuan working group, deputies, minister, dan beberapa agenda side events. Kegiatan working group terdiri dari Framework Working Group (FWG), International Financial Architecture Working Group (IFAWG), Infrastructure Working Group (IWG), Sustainable Finance Working Group (SFWG), Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), dan FSB Task Force. Kegiatan pada level deputies terdiri dari Finance and Central Bank Deputies' Meeting (FCBD), Joint Finance and Health Task Force (JFHTF), Joint Finance and Health Deputies' Meeting (JFHDM), dan Joint Finance-Agriculture Deputies Meeting (JFADM). Sementara kegiatan rapat pada tingkat menteri diantaranya Finance Minister and Central Bank Governor Meeting (FMCBG), Joint Finance and Health Ministers's Meeting (JFHMM), dan Joint Finance and Agriculture Ministers's Meeting (JFAMM).

Pada communique pertama yang merupakan salah satu output utama dari 1st FMCBG Meeting, terdapat 14 paragraf yang antara lain membahas mengenai ekonomi global dan risiko makroekonomi, isu kesehatan global, perpajakan internasional, infrastruktur, dan sustainable finance. Dari identifikasi yang dilakukan atas kata kunci dalam communique, Indonesia mengusulkan 308 kata kunci pada communique dimaksud. Terdapat 279 kata kunci yang disepakati dalam FMCBG Meeting yang pertama (90,6% disepakati). Dalam 3rd FMCBG sebagian anggota G20 berpandangan bahwa communique pada saat itu akan sulit dihasilkan dan disepakati karena situasi geopolitik. Presidensi Indonesia diberikan masukan oleh members untuk menyiapkan output alternatif, yaitu Chair's Summary. Sehingga pada 3rd FMCBG, output yang dihasilkan adalah Chair's Summary. Chair's Summary hasil pertemuan 3rd FMCBG terdiri dari empat topik utama, yaitu Addressing our immediate global economic challenges, continuing to support all vulnerable countries, supporting long term growth, and preserving financial stability. Dari identifikasi yang dilakukan atas kata kunci dalam chair's summary, Indonesia mengusulkan 43 kata kunci, dan 40 kata kunci diterima pada final chair's summary 3rd G20 FMCBG (93,02%). Selanjutnya pada 4th FMCBG juga dihasilkan chair's summary. Identifikasi atas chair's summary hasil 4th FMCBG terdapat 137

kata kunci yang diusulkan, dan terdapat 135 kata kunci yang disepakati (98.54%). Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35 Capaian IKU SS Sinergi Pengawasan yang Efektif

Inspektorat Jenderal	Sinergi Pengawasan yang Efektif 5a-CP Persentase Communique G20 usulan Indonesia yang Disepakati						
	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	70%	-	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	90,6%	-	90,6%	93,02%	91,81%	98,54%	
Capaian	120	-	120	120	120	120	Max/Avg

Selain communique dan Chair's Summary Presidensi G20 Indonesia telah berhasil menghasilkan berbagai capaian konkret pada tahun 2022. Adapun capaian konkret dimaksud antara lain:

#### 1. Penguatan Arsitektur Kesehatan Global

Presidensi Indonesia melalui serangkaian pertemuan Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) telah berhasil mengesahkan pembentukan Pandemic Fund (Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response / FIF-PPR) sebagai bentuk kemitraan kolaboratif antara negara donor, negara yang berhak menerima pendanaan, yayasan, filantropi, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan pengelolaan dana oleh Bank Dunia (WB) serta WHO sebagai pimpinan teknis. Pandemic Fund bertujuan untuk memperkuat arsitektur kesehatan global dalam mendorong aksi pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi di masa datang khususnya bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang melalui skema pendanaan berupa hibah.

#### 2. Transisi Energi yang Berkelanjutan

Dalam keketauannya, Indonesia juga telah menerapkan "lead by example" melalui pembentukan skema mobilisasi dan pengelolaan pembiayaan (Country Platform) bagi mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM) di Indonesia. ETM merupakan bentuk nyata dalam mendukung implementasi Kerangka Transisi Keuangan (Transition Finance Framework), sebagai skema dalam rangka memobilisasi dan mengelola pembiayaan bagi mekanisme transisi energi yang adil dan terjangkau (a just and affordable energy transition). Indonesia telah meluncurkan ETM Country Platform Indonesia dalam mendukung percepatan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) melalui penutupan (early retirement) sejumlah pembangkit listrik batu bara (PLTU) dan mendorong investasi pembangkit energi bersih. PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ditunjuk sebagai pengelola ETM Country Platform Indonesia. Indonesia telah menerima dukungan pembiayaan untuk ETM dari Climate Investment Funds (CIF) sebesar USD 500 juta yang akan ditingkatkan hingga USD 4 miliar, serta indikasi pendanaan sebesar USD 20 miliar dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diinisiasi oleh G7.

#### 3. Transformasi Digital

Pada isu prioritas transformasi digital, Presidensi Indonesia telah berhasil mendorong dukungan sistem pembayaran untuk menyiapkan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital melalui pengembangan Central Bank Digital Currencies (CBDC) dalam rangka memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan. Selain itu juga menerapkan Regional Payment Connectivity (RPC) di beberapa negara ASEAN sebagai inisiatif transformasi digital. Sementara itu di lingkup nasional, presidensi G20 Indonesia telah meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok rentan melalui Yogyakarta Financial Inclusion Framework untuk memanfaatkan digitalisasi sektor keuangan dalam mendorong produktivitas pada kelompok marginal atau rentan, yang mencakup UMKM, perempuan dan pemuda.

#### 4. Perpajakan Internasional

Pada isu international taxation, Presidensi Indonesia mendorong kerja sama perpajakan internasional melalui pengesahan Asia Initiative Bali Declaration sebagai wadah kerja sama transparansi perpajakan di Kawasan. Selain itu negara G20 telah berkomitmen untuk mempercepat implementasi kesepakatan atas hak pajak antar-negara dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital (Pilar 1) dan untuk menerapkan tarif pajak minimum secara global (Pilar 2) serta mendukung komitmen untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan.

#### 5. Ketahanan Pangan

Pada isu food security, Presidensi Indonesia menginisiasi forum G20 Joint Finance and Agriculture Ministers' Meeting (JFAMM) dalam mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang menjadi persoalan di banyak negara. G20 meminta World Bank Group (WBG) dan Food and Agriculture Organization (FAO) melakukan pemetaan kesenjangan respon global atas isu-isu yang terkait kerawanan pangan, termasuk memetakan dan mengidentifikasi kesenjangan atas kebutuhan pendanaan.

#### 6. Deliverables Lainnya

Capaian Presidensi Indonesia pada aspek lainnya di jalur keuangan yaitu membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh IMF yang sudah berhasil memobilisasi USD 81,6 miliar dari target USD 100 miliar. Dalam hal menghadapi situasi keuangan global yang penuh tekanan khususnya krisis pada negara miskin dan berkembang, Presidensi Indonesia telah mendorong implementasi program restrukturisasi utang melalui Kerangka Umum Pengelolaan Utang (Common Framework for Debt Treatment). Dalam rangka penyediaan dana pembangunan yang semakin diperlukan oleh negara miskin dan berkembang guna menghadapi berbagai krisis, seperti pandemi, pangan, energi dan perubahan iklim. Presidensi Indonesia telah mendorong peningkatan kapasitas pendanaan bank

pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) melalui penyelesaian laporan Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework/CAF), berisi rekomendasi pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan oleh MDBs dalam memperkuat kapasitas pendanaannya. Mengembangkan pembangunan infrastruktur melalui perumusan Indikator Investasi Infrastruktur yang Berkualitas (Quality Infrastructure Investment Indicators) dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur berkualitas untuk mendukung perekonomian yang lebih efisien, inklusif dan berkelanjutan, melalui pembiayaan infrastruktur yang lebih mudah diakses dan terjangkau, serta meningkatkan peranan swasta. Serta, memperkuat ketahanan keuangan dan jaring pengaman sistem keuangan global (Global Financial Safety Net/GFSN). Mendorong quota-based IMF bagi penyediaan sumber daya yang memadai yang bertujuan agar IMF dapat menjalankan peran sentralnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global.

Hasil konkrit Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan merupakan bukti nyata partisipasi aktif dan strategis Kementerian Keuangan dalam forum G20, yang merupakan bukti kehadiran dan keterlibatan Kementerian Keuangan dalam Nawa Cita 1 tema kedua, yaitu "Memperkuat Peran Dalam Kerja sama Global dan Regional. Selain itu, hasil-hasil konkrit dimaksud merupakan realisasi dari strategi Kementerian Keuangan berupa penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif dalam upaya Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Rencana aksi dan/atau rencana mitigasi yang telah dilakukan, antara lain, sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan 4 kali agenda FMCBG G20 Indonesia (Jakarta 17-18 Februari 2022; Washington DC, 20 April 2022; Bali 15-16 Juli 2022; dan Washington DC, 12-13 Oktober 2022).

### 5b. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Tindak lanjut rekomendasi BPK adalah rekomendasi dari BPK yang harus selesai ditindaklanjuti Itjen dalam tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran IKU ini dilakukan atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan dalam LKPP, LK BA BUN, LK BUN, dan LK BA 15, serta hasil audit kinerja dan PDTT yang menjadi tanggung jawab Itjen.

Pada tahun 2022, terdapat 8 rekomendasi BPK RI yang menjadi dasar penghitungan IKU. Seluruh rekomendasi tersebut berasal dari jenis pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atas Kinerja dan PDTT: 4 rekomendasi
2. Pemeriksaan atas LK BA 015: 4 rekomendasi

Sampai dengan triwulan IV 2022 realisasi IKU mencapai 96,88 % dari target 92%, dengan penjelasan per masing-masing bobot IKU sebagai berikut:

- a. Realisasi 50%: Penyampaian Tanggapan Pertama
- b. Realisasi 75%: Penyampaian TL Berikutnya
- c. Realisasi 95%: Rekomendasi diusulkan sesuai/TPTD berdasarkan hasil tindak lanjut oleh Itjen melalui penilaian internal (5 Rekomendasi)
- d. Realisasi 100%: Rekomendasi Sesuai/TPTD pada BA Hasil Pembahasan BPK RI dan/atau rekomendasi sesuai/TPTD pada Buku PTL BPK RI (3 Rekomendasi)

Rincian persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dilihat pada Tabel 3.36.

**Tabel 3. 36 Rincian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK**

	Bobot Realisasi				Total	Realisasi IKU	Capaian
	50%	75%	95%	100%			
	0	0	5	3	8	96,88%	105,3

Adapun rincian realisasi capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 3.37.

**Tabel 3. 37 Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK**

Inspektorat Jenderal	Implementasi pengawasan intern yang strategis 5b-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK							Pol/KP
	T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-20	
Target	-	30%	30%	-	92%	92%		
Realisasi	-	91,46%	91,46%	-	96,88%	96,88%		Max/TLK
Capaian	-	120,00	120,00	-	105,3	105,3		

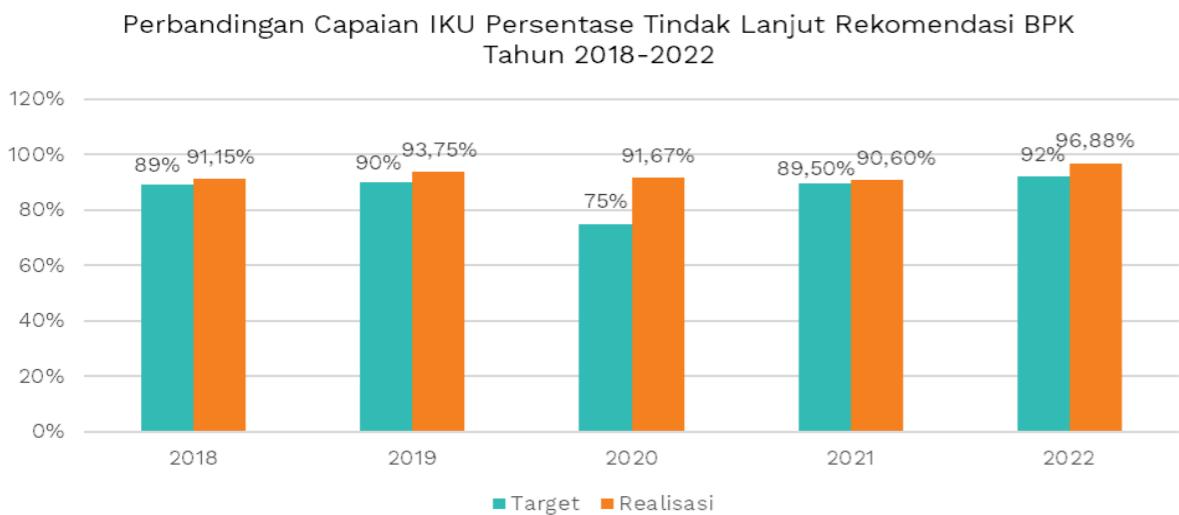
Capaian tersebut menunjukkan upaya Itjen dalam penyelesaian rekomendasi dari BPK sehingga membuktikan Itjen sebagai unit internal audit yang capable. Itjen senantiasa berupaya untuk menuntaskan seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK agar permasalahan yang muncul dapat dituntaskan dan tidak akan muncul kembali pada tahun berikutnya. Hal tersebut tercermin dari capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK tahun 2018 s.d. 2022 yang selalu memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan.

Dalam hal peningkatan Capaian IKU yang cenderung stabil dari tahun sebelumnya, tidak dapat dianggap merepresentasikan kinerja Itjen yang tidak stabil, hal tersebut mencerminkan dinamika tantangan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul ketika menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pada beberapa temuan, terdapat permasalahan-permasalahan yang membutuhkan waktu dalam upaya penyelesaiannya antara lain rekomendasi yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi dan sikap kooperatif berbagai pihak, permasalahan yang muncul tidak terdokumentasikan, serta rekomendasi yang bersifat penetapan kebijakan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Itjen melakukan berbagai upaya untuk tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

1. pemetaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih harus ditindaklanjuti;
2. penelaahan dokumen tindak lanjut yang akan diserahkan oleh UE I kepada BPK RI,

3. koordinasi pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan BPK,
4. menyelenggarakan transformative strategic forum, dan
5. pemantauan berkala atas TLRHP BPK RI bersama UE I di lingkungan Kemenkeu dan pihak terkait lainnya.



Gambar 3.8 Perbandingan Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2022

#### SASARAN STRATEGIS 6: PENJAMINAN PENGAWASAN-PENGENDALIAN INTERN YANG BERKUALITAS

SS ini terkait dengan kapabilitas Itjen sebagai unit pengawas intern dalam melakukan peningkatan dan pengendalian atas kualitas pengawasan intern di Kementerian Keuangan, yaitu mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Rincian capaian dari SS ini dapat dilihat pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38 Capaian IKU SS Penjaminan Pengawasan-Pengendalian Intern yang Berkualitas

SS 5: Penjaminan Pengawasan-Pengendalian Intern yang Berkualitas				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
6a Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAPI	92	95,8	104,23	

#### 6a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAPI

Dalam rangka menjalankan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Pengawasan Intern sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Inspektor Jenderal Nomor KEP-148.1/IJ/2017, Itjen telah melaksanakan penilaian mandiri (self periodic assessment) atas kegiatan pengawasan intern tahun 2020 dalam bentuk telaah sejawat antar Inspektorat. Penilaian mandiri dilaksanakan untuk mengevaluasi kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) serta penerapan kode etik oleh seluruh auditor di setiap Inspektorat selama periode pengawasan Semester II tahun 2021 s.d. Semester I tahun 2022. Hasil penilaian tersebut diharapkan dapat memberikan saran perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern Itjen.

IKU Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAPI mengalami penyesuaian target pada tahun 2020 dari 92 menjadi 90. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan pertimbangan penerapan WFH menurunkan aktivitas pengawasan yang bersifat assurance serta agar tidak menurunkan kualitas pengawasan dengan target yang terlalu tinggi, target dibuat seperti tahun sebelumnya dengan pengetatan kriteria penilaian. Pada tahun 2021, ditetapkan target sama dengan tahun 2020 mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Namun demikian pada tahun 2022, target IKU tersebut disesuaikan kembali menjadi 92 mengingat kondisi pandemic Covid-19 yang berangsur membaik.

Secara keseluruhan, hasil penilaian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern Itjen terhadap SAIPI adalah 95,89% (skala 0% – 100%) dengan kategori simpulan Sangat Baik. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari hasil telaah sejawat seluruh Inspektorat, dengan rincian pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39 Nilai Hasil Telaah Sejawat Masing-Masing Inspektorat

No.	Unit yang Ditelaah	Unit yang Menelaah	Nilai 2022 (%)
1	Inspektorat I	Inspektorat Bidang Investigasi	95,03
2	Inspektorat II	Inspektorat III	96,43
3	Inspektorat III	Inspektorat VII	96,44
4	Inspektorat IV	Inspektorat II	94,67
5	Inspektorat V	Inspektorat VI	97,72
6	Inspektorat VI	Inspektorat I	96,30
7	Inspektorat VII	Inspektorat V	94,21
8	Inspektorat Bidang Investigasi	Inspektorat IV	96,30
Nilai Inspektorat Jenderal (Rata-Rata Seluruh Inspektorat)			95,89
			(Sangat Baik)

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai hasil telaah sejawat Standar Audit AAPI adalah sebesar 95,89 dari target 92 dengan capaian sebesar 104,23%. Dengan tercapainya target IKU, menunjukkan Itjen senantiasa berupaya dalam peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern dengan memberikan saran perbaikan antar Inspektorat. Adapun rincian capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 3.40.

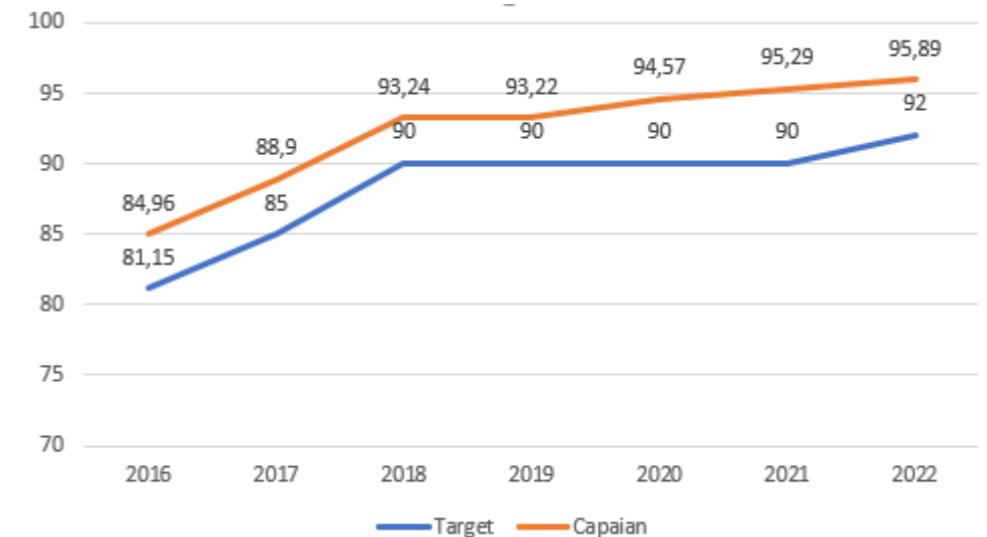
Tabel 3. 40 Capaian IKU Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAPI

Inspektorat Jenderal	Penjaminan Kualitas Pengawasan						Max/TLK
	6a-N Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAPI						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	92	-	92	
Realisasi	-	-	-	95,89	-	95,89	
Capaian	-	-	-	104,23%	-	104,23%	

Keberhasilan pencapaian IKU ini terutama didukung dengan kegiatan peningkatan pemahaman auditor terkait dengan standar audit intern, serta penerapannya ke dalam praktik pengawasan intern. Untuk itu, dilaksanakan sosialisasi serta internalisasi standar audit secara berkesinambungan. Penguatan mekanisme reviu berjenjang dan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan juga terus dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Manajemen Pengawasan Intern (SMPI) dalam perencanaan, maupun pelaksanaan pengawasan. Di samping itu, tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan telaah sejawat internal juga dipantau melalui SMPI untuk improvement berkelanjutan.

Itjen sebagai sebuah organisasi juga terus mengembangkan berbagai kebijakan dan mekanisme yang mendukung pemenuhan Standar Audit dalam aktivitas pengawasan intern. Pengaturan terkait dengan independensi dan objektivitas secara eksplisit dituangkan dalam Piagam Pengawasan Intern dan terus dijaga melalui pemantauan kode etik auditor. Mekanisme pelaporan, penanganan, dan monitoring terkait benturan kepentingan yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas auditor juga telah ditetapkan. Kualifikasi dan standar kompetensi auditor juga telah diatur sehingga penilaian pada auditor yang melakukan pengawasan intern dapat dilakukan secara cermat dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam standar audit. Semua hal tersebut dilakukan untuk menjaga & meningkatkan pemenuhan standar audit intern dalam aktivitas pengawasan intern Itjen.

Secara umum, realisasi IKU ini selalu tercapai dan mengalami kenaikan dari tahun 2016 s.d. 2022, kecuali untuk tahun 2019 realisasi mengalami sedikit penurunan. Berikut perbandingan antara target dengan realisasi dari tahun 2016 s.d. 2022 pada Gambar 3.11.



Gambar 3. 9 Perbandingan Capaian IKU Nilai Hasil Telaah SAIPI Tahun 2016-2022

Realisasi Nilai Hasil Telaah Sejawat SAIPI tersebut juga telah mencapai target pada Renstra sebesar 92 seperti dapat dilihat pada Tabel 3.41.

Tabel 3. 41 Perbandingan target IKU dalam Renstra Itjen 2020-2024 dan Kontrak Kinerja Itjen

Indikator Kinerja	Renstra	Kontrak Kinerja Itjen	
	Target	Target	Realisasi
Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAUPI	92	92	95,89

IKU ini tidak di-cascade dari IKU Kemenkeu-Wide serta tidak terdapat dalam RPJMN atau target nasional lain sehingga capaianya tidak dapat dibandingkan dengan target kementerian & nasional.

Pada tahun 2023, target IKU ini akan disesuaikan kembali sesuai dengan target Renstra. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan Itjen sesuai dengan standar audit, sosialisasi dan internalisasi standar audit secara berkesinambungan perlu ditingkatkan mengingat bertambahnya jumlah auditor baru. Selain itu, Sistem Manajemen Pengawasan Intern (SMPI) akan dioptimalkan pemanfaatannya.

## SASARAN STRATEGIS 7: TRANSFORMASI PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKELANJUTAN

SS ini mengukur peran Itjen sebagai unit pengawas intern dalam menciptakan dan/atau mengembangkan sistem pengawasan intern secara responsif dan berkelanjutan, sesuai dengan kondisi dan isu terkini. Rincian capaian IKU pada SS ini dapat dilihat pada Tabel 3.42.

**Tabel 3. 42 Capaian IKU SS Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan**

SS 7: Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7a Jumlah Pedoman Pengawasan	7	9	120
7b Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit	80%	97%	120
7c Persentase Implementasi PIJJ	80%	99,77%	120

### 7a-N Jumlah Pedoman Pengawasan

IKU ini bertujuan untuk mendorong Itjen untuk menciptakan pedoman pengawasan yang dapat membantu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi hasil pengawasan yang berkualitas. Pedoman pengawasan yang telah selesai dan ditetapkan tahun 2022 yaitu:

1. Pedoman Pemeriksaan Mendadak (Sadak) Dalam Kerangka Pengawasan Intern (PER-1/IJ/2022 tanggal 10 Maret 2022)
2. Pedoman Teknis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (PER-2/IJ/2022 tanggal 28 Maret 2022)
3. Pedoman Penentuan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) dalam KMK Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara (KMK 105/KMK.01/2022)
4. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 308/KMK.09/2022 tanggal 5 Agustus 2022)
5. Revisi Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor PER-2/IJ/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. (PER-9/IJ/2022 tanggal 12 September 2022)
6. Pedoman Penilaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (ND-817/IJ.8/2022 tanggal 18 Oktober 2022)
7. Pedoman Pemanfaatan Aplikasi Sistem Manajemen Pengawasan Intern Berbasis Teammate Plus di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (PER-11/IJ/2022 tanggal 31 Oktober 2022)
8. Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan (PER-14/IJ/2022 tanggal 16 Desember 2022)
9. Rencana Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2023 (KMK Nomor 523/KMK.09/2022 tanggal 30 Desember 2022)

Dengan demikian, realisasi capaian IKU Jumlah Pedoman Pengawasan pada tahun 2022 adalah sebanyak 9 (sembilan) pedoman dan telah melebihi target sebanyak 7 (tujuh) pedoman dengan capaian sebesar 120. Adapun rincian realisasi capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 3.43.

**Tabel 3. 43 Capaian IKU Jumlah Pedoman Pengawasan**

Inspektorat Jenderal	Inovasi Pengawasan yang Efektif						
	7a-N Jumlah Pedoman Pengawasan						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	7	7	
Realisasi	-	-	-	-	9	9	Max/TLK
Capaian	-	-	-	-	120	120	

Beberapa faktor pendukung keberhasilan IKU ini antara lain:

1. Pemahaman akan substansi/proses bisnis terkait pedoman;
2. Pemahaman akan lingkungan organisasi;
3. Kontekstualisasi teori dalam praktik nyata;
4. Komitmen tim terhadap rencana kerja yang telah disusun yang telah dilengkapi dengan jadwal waktu pelaksanaan;
5. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan para stakeholders serta pembahasan rancangan pedoman secara intensif; dan
6. Dukungan dan komitmen pimpinan di Kementerian Keuangan.

Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan pedoman, antara lain:

1. Perkembangan lingkungan yang dinamis mempengaruhi beberapa aspek dalam proses perumusan pedoman, antara lain aspek sumber daya yang terpengaruh akibat perubahan fokus organisasi, aspek substansi pedoman, maupun compatibility/practicality dari pedoman;
2. Banyaknya tugas lain yang bersifat insidentil berupa current issue yang belum dijadwalkan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa cara telah dilakukan, antara lain:

1. Penyusunan timeline untuk perumusan pedoman;
2. Tinjauan literatur terkait dengan substansi pedoman;
3. Diskusi kolaboratif antara penyusun pedoman dengan user atau pihak yang akan menjalankan pedoman serta pihak lain yang dapat menjadi subject matter experts; dan
4. Piloting atas pedoman sebelum diterapkan.

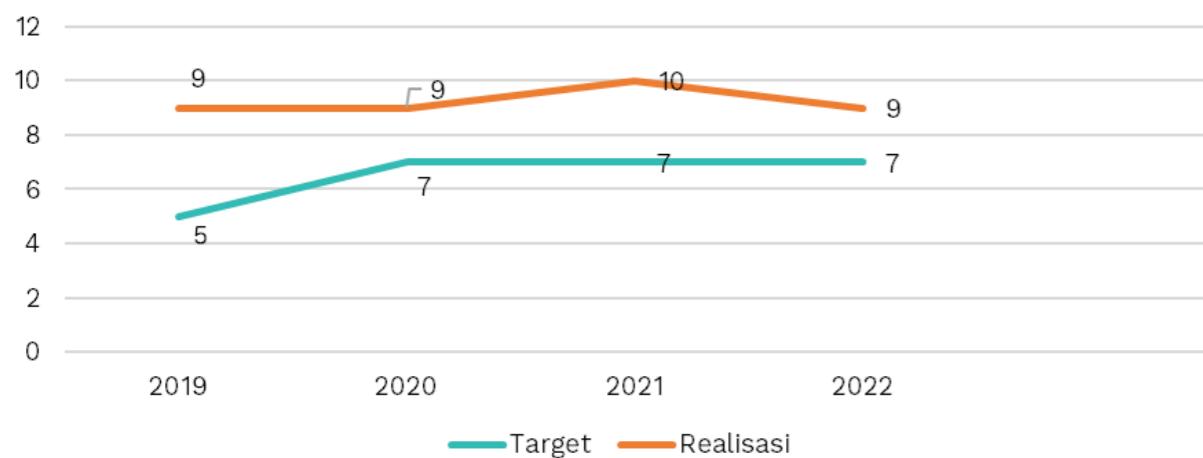
Capaian 9 pedoman tersebut juga melebihi target di Renstra Itjen sebanyak 7 pedoman. Berikut adalah perbandingan target IKU dalam Renstra dan Kontrak Kinerja Itjen beserta realisasinya pada Tabel 3.44.

**Tabel 3. 44 Perbandingan Target IKU Jumlah Pedoman Pengawasan dalam Renstra Itjen 2020-2024 dan Kontrak Kinerja Itjen 2022**

Indikator Kinerja	Renstra		KK Itjen 2022	
	Target	Target	Realisasi	
Jumlah Pedoman Pengawasan	7	7	9	

Penyusunan pedoman-pedoman pengawasan ini menunjukkan bahwa Itjen terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan memperbarui pedoman/peraturan terkait pengawasan yang telah ada maupun menyusun pedoman pengawasan yang baru dengan menyesuaikan perubahan kondisi organisasi serta penerapan teknologi informasi dalam pengawasan internal. Tercapainya IKU Jumlah Pedoman Pengawasan menunjukkan Itjen mampu menciptakan pedoman pengawasan yang dapat membantu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi hasil pengawasan yang berkualitas untuk memberikan nilai tambah bagi tercapainya tujuan organisasi. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU ini mengalami kenaikan. Adapun perbandingan target dan realisasi IKU tahun 2019 s.d. 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.5.

**Realisasi IKU Jumlah Pedoman Pengawasan Tahun 2019-2022**



**Gambar 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Jumlah Pedoman Pengawasan Tahun 2019 s.d. 2022**

IKU Jumlah Pedoman Pengawasan tidak terdapat di dalam KK Menteri Keuangan, RPJMN, maupun target nasional lainnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target Kementerian dan nasional.

#### 7a. Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit

Pengawasan berbasis Continuous Audit (CA) adalah kegiatan pengawasan berkelanjutan yang dilakukan dengan dukungan data elektronis yang berasal dari aplikasi/sistem Informasi internal dan/atau

eksternal Kemenkeu. Pengawasan berbasis CA dalam hal ini selaras dengan penerapan data analytics di Itjen, yang juga meliputi CA/ Continuous Monitoring (CM), TABK, dan audit TIK terintegrasi. Cara pengukuran IKU ini adalah menghitung jumlah penerapan CA sebagai proyek DA dengan level 4 atau yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah total proyek CA sebagai proyek DA dengan level 4 atau yang lebih tinggi sesuai target akhir Roadmap Penerapan DA Itjen sebagaimana ditetapkan dalam Kep-161/IJ//2019.

Pemanfaatan Data Analytics (DA) dalam siklus kegiatan pengawasan telah menjadi kebutuhan Inspektorat Jenderal (Itjen) saat ini. DA menjadi teknik dan metologi audit yang dipandang memberikan nilai tambah dan hasil yang lebih bermanfaat untuk organisasi. Kebutuhan Itjen untuk berubah agar tetap relevan di era digital dan kesadaran akan manfaat DA bagi pengawasan merupakan "drivers" atau pendorong organisasi berubah untuk menerapkan DA.

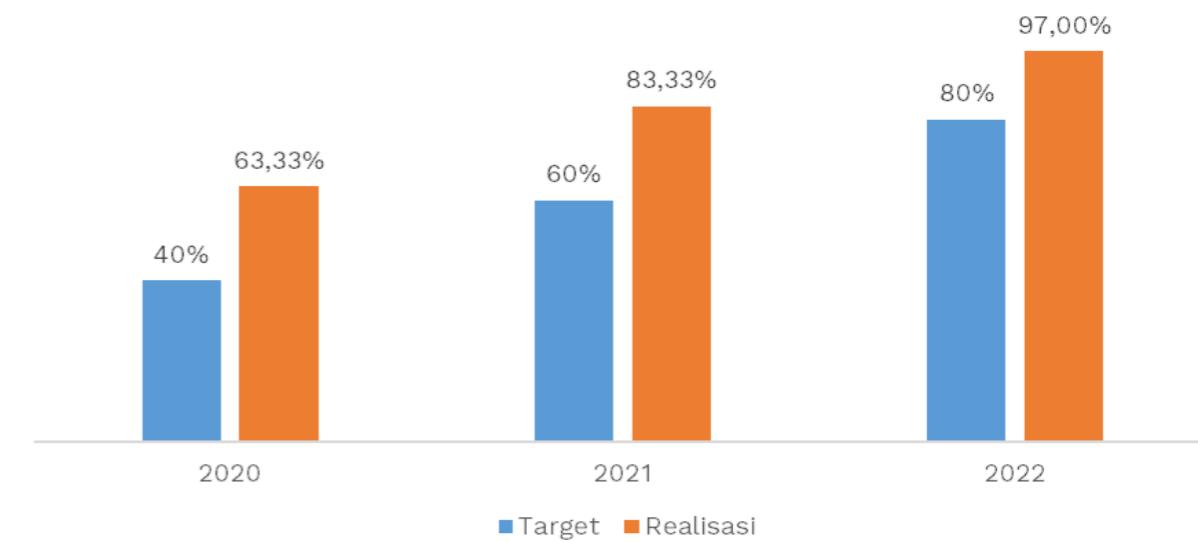
Sehubungan dengan itu, pada tahun 2019 diterbitkan roadmap penerapan data analytic yang mendefinisikan bahwa data analytic dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal meliputi Continuous Audit (CA)/Continuous Monitoring (CM), Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), dan audit TIK terintegrasi. Sesuai dengan roadmap pengembangan data analytic tersebut, jumlah project CA mulai ditargetkan sebagai IKU di tahun 2020 hingga 2023 yang merupakan akhir timeline pada roadmap tersebut.

Di tahun 2022, target IKU pengawasan yang berbasis CA pada masing-masing Inspektorat adalah 4 projects CA atau 80% dari target akhir jumlah project CA tiap Inspektorat di tahun 2023 yaitu 5 projects atau 30 projects keseluruhan di level Itjen. Adapun sepanjang 2022 Itjen telah merealisasikan 27 projects CA, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 45 Realisasi Proyek CA per Inspektorat**

Unit	Project CA
Inspektorat I	1. CM Pengawasan PPN 2. CM Pengawasan Data Pemicu Pengawasan Pajak oleh AR 3. CM Monitoring Akun Piatung Pajak 4. CM Dashboard Pemantauan Restitusi 5. Pengawasan Proses Bisnis Pemeriksaan Pajak (IS -ET 2022)
Inspektorat II	1. CA Pemeriksaan Fisik Barang 2. CA Penetapan Kode HS 3. Pemeriksaan Pabean Ekspor 4. Pengujian Perhitungan Pungutan Ekspor (IS-ET 2022)  <b>CA Proses Penelitian Dokumen Impor (discontinued)</b> <b>CA Status Blokir Importir (discontinued)</b>

Inspektorat III	1. CA Analisis Saldo Kas LK BUN 2. CA Analisis Utang PFK 3. CA Reviu Tagihan BPJS 4. e-Reviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara BA 999.00 5. Monitoring Pasar Sekunder Surat Utang Negara (IS-ET 2022) <b>CA Evaluasi Pinjaman Pemerintah (diserahkan kepada klien)</b>
Inspektorat IV	1. CA Permohonan Lelang (IS-ET 2022) 2. CA Pelaksanaan Lelang 3. CA Pengawasan Pemanfaatan BMN 4. Monitoring Penyelesaian Piutang Negara
Inspektorat V	1. CA Pengawasan TKDD (Dana Desa) 2. CA Pengawasan TKDD (Pemanfaatan DAK Fisik) 3. CA Pengawasan PNBP 4. CA Penerapan RSPP 5. Pengawasan Dana Bantuan Sosial (IS-ET 2022)
Inspektorat VI	1. CA Reviu LK BA 015 (e-Reviu) 2. CA Master Aset Gedung dan Aset Rumah Negara 3. Proses Bisnis Reviu Kebutuhan Aset Tetap pada Kementerian Keuangan 4. Pengawasan Belanja Modal (IS-ET 2022) 5. CA Data Banding SetPP



**Gambar 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit Tahun 2020-2022**

IKU Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit tidak terdapat dalam Kontrak Kinerja Menteri Keuangan, RPJMN maupun target nasional lainnya sehingga capaian atas IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target tingkat kementerian dan nasional.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain:

1. Dibentuknya tim pengembangan penerapan data analytics Inspektorat Jenderal tahun 2022 melalui KEP-40/IJ/2021 tanggal 24 Februari 2022;
2. Pelaksanaan program pengembangan SDM terkait data analytics dalam berbagai bentuk (misal: pelatihan formal, asistensi dan diskusi informal, grooming dll);
3. Tersedianya solusi dan infrastruktur pendukung (a.l. kamus data, tools pengolah data, datamart Itjen, infrastruktur war room Itjen, dsb); dan
4. Sinergi dan kolaborasi antar unit di Inspektorat Jenderal yang melibatkan Inspektorat I – VI sebagai pemilik IKU, Bagian SIP selaku pengelola data (validata) dan pengelola teknologi pendukung, serta Inspektorat VII selaku koordinator penerapan data analytics (yang di dalamnya mencakup penerapan project CA).

Selain itu, terdapat tantangan dalam pemenuhan IKU ini antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan data untuk kegiatan pengawasan terutama kebutuhan pengujian yang bersifat terus menerus. Hal ini dapat berupa perubahan sistem atau struktur data sehingga beberapa projek diputuskan untuk dihentikan atau perlu di-update; dan

Persentase pengawasan yang berbasis continuous audit yang telah dikembangkan hingga tahun 2022 adalah sebesar 97% atau 28 project dari target 30 project 2023. Angka tersebut telah melebihi target yang ada di renstra Itjen 2020-2024 untuk tahun 2022 yaitu sebesar 80% dari target 30 project. Rincian capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 46 Capaian IKU Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit**

Inspektorat Jenderal	Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan 7b-N Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit							
	T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	80%	80%		
Realisasi	-	-	-	-	97%	97%		Max/TLK
Capaian	-	-	-	-	120	120		

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU pada tahun ini mengalami kenaikan dari 83,33% menjadi 97%. Adapun perbandingan realisasi dan target dari tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

2. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi prioritas Inspektorat (termasuk pengembangan CA) yang berdampak pada alokasi sumber daya (SDM) dalam pengembangan dan penerapan CA.

Tercapainya IKU ini menunjukkan kemajuan implementasi transformasi digital proses pengawasan intern Kementerian Keuangan dengan dukungan data analytics. Dengan demikian, Itjen telah berhasil menciptakan/mengembangkan produk/jasa dengan mengacu pada sistem pengawasan yang modern yang dapat memberikan nilai tambah bagi tercapainya tujuan organisasi.

Sesuai Renstra, target Persentase Pengawasan yang Berbasis Continuous Audit tahun 2023 adalah 100%. Koordinasi internal dan klien pengawasan akan ditingkatkan terkait ketersediaan data yang diperlukan dalam kegiatan continuous audit, dengan harapan IKU ini pada 2023 dapat memenuhi target.

#### 7b. Persentase Implementasi PIJJ

Pengawasan Intern Jarak Jauh (PIJJ) merupakan kegiatan Pengawasan Intern di luar lokasi Klien Pengawasan (off-site) atau secara jarak jauh (remote) baik secara penuh ataupun parsial (sebagian dilakukan on-site) yang dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Manajemen Pengawasan Intern (SMPI) berbasis web (Aplikasi TeamMate Plus). IKU ini bertujuan mengukur penerapan PIJJ yang dioperasionalisasikan melalui pemanfaatan SMPI berbasis web. IKU ini diukur dengan menghitung:

1. Jumlah surat tugas assurance (audit, reviu, evaluasi, pemantauan), termasuk survei pendahuluan, pengumpulan data, dalam rangka audit, reviu, evaluasi, pemantauan, yang dilakukan melalui SMPI berbasis Web dibandingkan dengan seluruh surat tugas pengawasan Assurance (audit, reviu, evaluasi, pemantauan) yang diterbitkan baik oleh Pimpinan Itjen/Kemenkeu (Bobot 50%). Catatan: Apabila beberapa ST dibuat dalam 1 project, maka perhitungan tetap menghitung jumlah ST. Misal: ST untuk Survei Pendahuluan dan ST Audit Substantif terdiri dari 2 ST, dapat dibuatkan dalam satu project dengan capaian tetap dihitung 100% ((2/2) x 100%)
2. Jumlah penyelesaian project dalam TeamMate Plus, yang ditandai status closed (Bobot 50%). Realisasi persentase implementasi PIJJ tahun 2022 adalah 99,77% dari target 80% dengan persentase capaian sebesar 120%. Rincian capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 47 Capaian IKU Persentase Implementasi PIJJ Tahun 2022**

Inspektorat Jenderal	Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan						
	7c-N Persentase Implementasi PIJJ						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Realisasi	97,33%	100%	100%	99,57%	99,77%	99,77%	Max/TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target IKU ini merupakan target baru di tahun 2022 sehingga tidak mempunyai data pembanding dari tahun sebelumnya.

#### SASARAN STRATEGIS 8: PENGUATAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG AGILE

Sasaran Strategis ini mengukur kemampuan Itjen sebagai organisasi dalam mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, agar proses bisnis di dalamnya dapat bersifat dinamis, fleksibel, dan agile sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Rincian capaian IKU pada SS ini dapat dilihat pada Tabel 3.48.

**Tabel 3. 48 Capaian IKU SS Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile**

SS 8: Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile		Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja				
8a	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	92%	100%	108,70
8b	Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	4	4	100

#### 8a. Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu

IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu bertujuan untuk mengukur kemampuan Itjen sebagai organisasi dalam mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, agar proses bisnis di dalamnya dapat bersifat dinamis, fleksibel, dan agile sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut, dalam Leaders' Offsite Meeting (LOM) pada 14-15 Januari 2022 telah ditetapkan 22 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 19 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analytics .

Monitoring dan evaluasi kesuksesan implementasi inisiatif program Transformasi Kelembagaan, dilaporkan secara semesteran kepada Menteri Keuangan, namun progres penyelesaiannya dilaporkan tahunan untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Pada tahun 2022, Itjen berperan sebagai UIC Utama pada 5 IS yaitu:

1. IS#1 Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: Collaborative Ways of Working,
2. IS#5 Pemanfaatan Emerging Technologies dalam Kegiatan Pengawasan Itjen,
3. IS#14 Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan KND,
4. IS#16 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared

Service dan Government Platform), dan

5. IS#25 Pengembangan Dashboard profiling Kemenkeu untuk Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal.

Pada tahun 2021, IKU ini bernama "Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan Data Analytics. Pada tahun 2022 ini, IKU ini diubah menjadi Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu yang merupakan IKU cascading dari IKU Kemenkeu-Wide untuk mendukung pelaksanaan program IS Kemenkeu. Berdasarkan nota dinas nomor ND-3/TRBTKP.3/2022 perihal Penyampaian Data Capaian IS Kemenkeu Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2023, realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal sebesar 100% dari target 92% sehingga nilai capaian sebesar 109%. Hal ini menunjukkan Itjen senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kemenkeu. Capaian Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 49 Capaian Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu

Penguatan Tata Kelola yang Agile							
8a-CP Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	23%	46%	46%	69%	92%	92%	
Realisasi	27,60%	53,36%	53,36%	82,8%	100%	100%	Max/TLK
Capaian	120	116	116	120	109%	109%	

Selama 2022, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Implementasi IS Kemenkeu, antara lain

a. IS#5 Pemanfaatan Emerging Technologies dalam Kegiatan Pengawasan Itjen

- pemanfaatan hasil projek CA baru di internal tiap tim pengawasan /Inspektorat, dan
- penyusunan pemanfaatan hasil pengujian memakan waktu panjang karena semakin banyaknya project analisis.

b. IS#14 Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan KND

- pengembangan aplikasi Monev BA BUN, seperti adanya permasalahan security dan banyaknya aplikasi monev yang dimiliki oleh masing-masing PPA BUN.

c. IS#25 Pengembangan Dashboard Profiling Kemenkeu untuk Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal

- Projek DA Inspektorat lain belum terintegrasi ke dalam Dashboard Profiling.

Beberapa hal penting terkait Implementasi IS Kemenkeu yang telah dilakukan oleh Itjen, antara lain:

- a. IS#1 Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: Collaborative Ways of Working
  - Pengembangan aplikasi E-hukdis.
- b. IS#5 Pemanfaatan Emerging Technologies dalam Kegiatan Pengawasan Itjen
  - Hasil seluruh pengujian seluruh project CA/CM telah dimanfaatkan dalam kegiatan pengawasan.
- c. IS#14 Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah Dalam Kepemilikan KND
  - Penetapan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK Nomor 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menkeu Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.
  - Penetapan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PER- 11/IJ/2022 tentang Pedoman Pemanfaatan Aplikasi Sistem Manajemen Pengawasan Intern Berbasis Teammate Plus di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
  - Penyusunan konsep URS Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Pengelolaan BA BUN pada Aplikasi existing yang ada di Itjen yaitu Teammate+.
  - Monitoring Atas Pelaksanaan Anggaran BUN Terkait Ketepatan Sasaran Penyaluran Subsidi Listrik Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada PT PLN (Persero)
  - Pengawasan atas GRC pada 5 SMV Kemenkeu (LPEI, PT Geo Dipa Energi, PT SMI, PT SMF, PT PII)
  - Pelaksanaan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Provinsi DIY.
  - Pelaksanaan pengawasan belanja subsidi non-energi pupuk.
  - Penguatan pengawasan melalui combined assurance bersama dengan DJPK, DJPb, Kemendagri (Itjen Kemendagri dan Ditjen Bina Pemdes), dan Kemendes (Itjen Kemendes, Ditjen PDP, Ditjen BPI, Ditjen PEI) dalam rangka pelaksanaan evaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan Dana Desa serta onsite visit pada 3 Kabupaten di Jawa Timur.
  - Pengawasan PMN atas PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI), PT PAL Indonesia, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW), PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC),

dan PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo)

- d. IS#16 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)
  - Pelaksanaan Quality Assurance Pengembangan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)
- e. IS#25 Pengembangan Dashboard Profiling Kemenkeu untuk Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal
  - Pengintegrasian hasil data analytics ke dalam Dashboard Profiling.
  - Penentuan Metode Risiko (Skoring) Pegawai.
  - Penggunaan Dashboard Profiling oleh Itjen dan pengembangan LInjutan Dashboard Profiling.
  - Penyelesaian kegiatan modeling dan evaluasi data analytics

#### 8b. Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)

Dalam rangka meningkatkan kualitas peran pengawasan intern, Itjen sebagai APIP Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan intern. Kualitas peran pengawasan intern tersebut diukur melalui penilaian atas praktik pengawasan intern dengan menggunakan parameter nilai kapabilitas pengawasan intern/internal audit capability model (IACM). Dalam rangka mengukur tingkat IACM tersebut, Itjen Kemenkeu menggunakan pedoman peningkatan kapabilitas pengawasan intern yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina APIP.

Pada tahun 2022, Itjen telah melakukan self assessment untuk menilai efektivitas dan menentukan level kapabilitas Itjen Kemenkeu. Kegiatan self assessment tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Self Assessment dilaksanakan oleh Inspektorat VII dan hasilnya telah disampaikan melalui ND-542/IJ.8/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan simpulan bahwa Inspektorat Jenderal telah memenuhi pernyataan IACM level 4 secara penuh yang artinya Itjen telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan Itjen terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

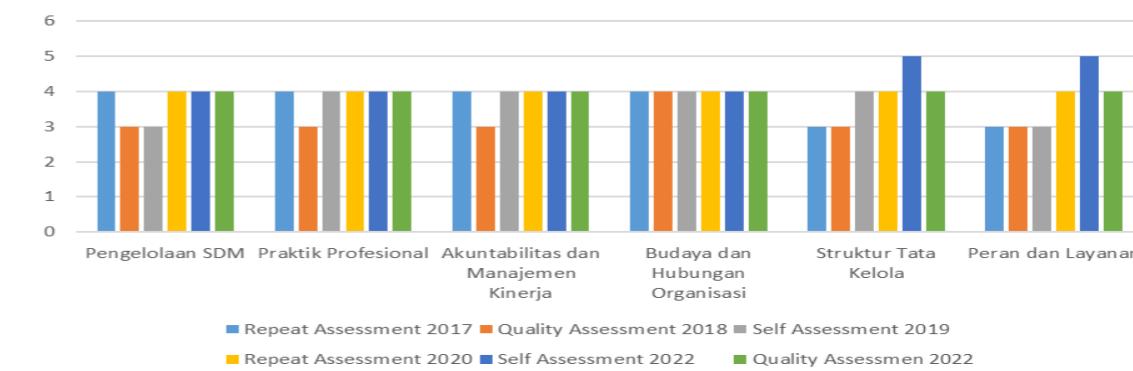
Atas hasil self Assesment Inspektorat Jenderal Kemenkeu, BPKP telah melakukan evaluasi yang disampaikan melalui Surat Kepala BPKP Nomor PE.12.03/S-2063/D1/2022, tanggal 27 Desember 2022, Hal Laporan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level IV Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2022. Adapun perbandingan nilai hasil self assessment Itjen Kemenkeu dan hasil evaluasi BPKP tersebut secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 50 Perbandingan Hasil Self Assessment Kapabilitas Itjen Kemenkeu

Elemen	Itjen		BPKP	
	Level	Score	Level	Score
<b>DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)</b>				
Pengelolaan SDM	4	0,72	4	0,72
1) Topik Perencanaan SDM	4		4	
2) Topik Pengembangan SDM	4		4	
Praktik Profesional	4	0,81	4	0,72
1) Perencanaan Pengawasan	4		4	
2) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	5		4	
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,27	4	0,24
1) Rencana Kerja dan Anggaran APIP	5		4	
2) Pelaksanaan Anggaran APIP	4		4	
3) Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	5		4	
4) Sistem Pengukuran Kinerja APIP	4		4	
Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,26	4	0,24
1) Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	4		4	
2) Hubungan APIP dengan Manajemen	5		4	
3) Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	4		4	
Struktur Tata Kelola	5	0,6	4	0,48
1) Hubungan Pelaporan	5		4	
2) Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	5		4	
3) Mekanisme Pendanaan	5		4	
<b>Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) (40%)</b>				
Peran dan Layanan	5	2	4	1,60
1) Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	5		4	
2) Audit Kinerja (Performance Auditing)	5		4	
3) Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	5		4	
4) Jasa Konsultansi (Consulting Services)	5		4	
<b>Total Score</b>		<b>4,66</b>		<b>4,00</b>
<b>Level</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	

Berikut visualisasi perbandingan hasil penilaian kapabilitas secara mandiri serta hasil QA BPKP:

Gambar 3. 12 Perbandingan Level IACM per Elemen Tahun 2017 s.d. 2022



Mengacu pada manual IKU, pemenuhan nilai IACM tahun 2022 dinilai pemenuhannya oleh tim penilai internal (dhi. Inspektorat VII) sehingga realisasi capaian IKU nilai IACM tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.51 Capaian IKU Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)**

Inspektorat Jenderal	Penguatan Tata Kelola yang Agile						
	8b-N Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	4	4	
Realisasi	-	-	-	-	4	4	
Capaian	-	-	-	-	100%	100%	

Realisasi IKU dengan skor 4 merupakan suatu pencapaian yang besar bagi Itjen Kemenkeu karena memperoleh capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional, di mana kapabilitas APIP di Indonesia diharapkan mencapai kapabilitas (IACM) Level 3. Hal ini juga menunjukkan kapabilitas Itjen sebagai unit internal audit dalam melaksanakan pengawasan yang berkualitas. IKU ini bukan di-cascade dari IKU Kemenkeu-wide (tidak terdapat dalam Kontrak Kinerja Menteri Keuangan) serta tidak terdapat dalam RPJMN ataupun target-target nasional lain sehingga capaianya tidak dapat dibandingkan dengan target tingkat kementerian dan nasional. Realisasi Nilai IACM tersebut juga mencapai target pada Renstra seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.52 Perbandingan Target IKU Nilai IACM dalam Renstra Itjen 2020-2024 dan Kontrak Kinerja Itjen 2022**

Indikator Kinerja	Renstra	Itjen	
	Target	Target	Realisasi
Nilai IACM	4	4	4

Terdapat beberapa praktik positif yang telah dilakukan Itjen dalam rangka memperoleh capaian IACM level 4 tersebut, di antaranya:

1. inovasi dalam pelaksanaan audit ketaatan melalui pelaksanaan audit atas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan keamanan sistem informasi;
2. inovasi dalam pelaksanaan audit kinerja melalui audit TIK terintegrasi dan pengembangan data analytic;
3. inovasi dalam pelaksanaan asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, yang ditunjukkan antara lain dalam:
  - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 322/KMK.09/2021 tentang pengembangan Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan

- Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Integrasi enterprise risk management organisasi Kementerian Keuangan dengan risiko pengelolaan Keuangan Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara;
  - e. Inisiasi Pemanfaatan Emerging Technologies dalam Kegiatan Pengawasan Intern yang juga menjadi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan tahun 2022.
4. pengembangan aplikasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan, antara lain:
    - a. Aplikasi e-hukdis untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hukuman disiplin dari hasil audit investigasi;
    - b. Aplikasi e-Revu Laporan Keuangan sebagai pengembangan dari continuous audit Itjen atas pengujian data-data pembentuk laporan keuangan;
    - c. Aplikasi sistem manajemen pengawasan intern berbasis web untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen.
  5. partisipasi aktif Itjen dalam forum-forum strategis Kementerian Keuangan, di antaranya seperti Komite Pengawasan Perpjakan, Komite Pengawasan terhadap Penyelenggara Asuransi/Jaminan Sosial dan Pengelola Dana Masyarakat Lainnya, Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan.
  6. partisipasi aktif auditor Itjen dalam asosiasi profesi seperti The IIA, ISACA, ACFE, dan AAIPD sebagai pengurus, narasumber utama dalam penyusunan berbagai pedoman, antara lain pedoman Telaah Sejawat, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP), serta pembicara dalam konferensi IIA Indonesia, IIA Indonesian Forum dan lainnya.
  7. Itjen menjadi role model/benchmarking pengembangan kapabilitas bagi APIP lainnya dan luar negeri, di antaranya melalui:
    - a. training/knowledge sharing/studi banding lebih dari 100 Kementerian/Lembaga pada tahun 2021, antara lain terkait Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, Praktik Pengawasan berbasis IT, Telaah Sejawat, Audit Kinerja, Pengelolaan Kegiatan Pengawasan, Sistem Manajemen Pengawasan Intern, dan Audit Pemanfaatan BMN.
    - b. replikasi pengembangan three line model Itjen Kemenkeu oleh APIP K/L Lainnya.
    - c. replikasi aplikasi pengawasan dan pedoman yang disusun oleh Itjen.
- Pada tahun 2023 Itjen akan senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan beberapa elemen untuk meningkatkan kualitas kapabilitas Itjen. Area of improvement yang akan dilakukan oleh Itjen berdasarkan rekomendasi hasil penilaian mandiri tersebut, di antaranya:
1. Elemen Pengelolaan SDM:
    - a. mengembangkan skema/prosedur perencanaan SDM yang lebih adaptif dan agile terhadap kebutuhan dan perubahan lingkungan yang strategis; dan
    - b. memperkuat strategi pengembangan SDM Itjen yang lebih adaptif untuk senantiasa relevan terhadap perkembangan peran strategis Itjen dalam melaksanakan fungsi pengawasan Menteri Keuangan sebagai chief operational officer, chief financial officer, serta

- wakil pemerintah dalam kepemilikan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).
2. Elemen Praktik Profesional: mengembangkan project data analytics yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perencanaan tahunan pengawasan Itjen.
  3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja:
    - a. membangun otomasi sistem pelaksanaan anggaran yang dapat mendukung penyajian informasi pelaksanaan anggaran Itjen secara realtime; dan
    - b. memperkuat pemanfaatan dashboard pengawasan bagi Pimpinan untuk menggambarkan capaian kinerja peran dan layanan Itjen secara realtime.
  4. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi:
    - a. mengembangkan inovasi dan/atau pola baru pengelolaan dan pelaksanaan komunikasi intern, yang dapat diadopsi sebagai best practices pada level Kementerian; dan
    - b. memperkuat strategi combined assurance untuk dapat memastikan cakupan pengawasan yang lebih utuh dan strategis secara efisien.
  5. Elemen Peran dan Layanan: memperkuat dan mengembangkan mekanisme pemberian overall assurance atas GRC Kementerian Keuangan.

Pengelolaan SDM dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu: Pemenuhan Kompetensi SDM, Implementasi Manajemen Talenta, dan Tingkat Pemanfaatan HRIS Kemenkeu.

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM merupakan IKU baru di Inspektorat Jenderal, realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 116,93% dari target 100% sehingga nilai capaian sebesar 116,93. Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 54 Capaian IKU Tingkat Pengelolaan SDM**

Inspektorat	Penguatan Sumber Daya yang Optimal							
	Jenderal	9a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM						
T/R		Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLK	
Realisasi	96,17	89,31	89,31	111,34	111,34	111,34	116,93	
Capaian	96,17%	89,31%	89,31%	111,34%	111,34%		116,93%	

Untuk mendukung pelaksanaan IKU tersebut, Itjen telah melaksanakan berbagai kegiatan, yakni:

1. Kegiatan Assessment Center yang terbagi dalam 26 batch untuk jabatan JFA Madya, JFA Muda, Pejabat Pengawas, JFA Pertama, dan Pelaksana.
2. Penyusunan Alat ukur kompetensi teknis jabatan administrator dan telah disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia.
3. Briefing Asesor Asesmen Teknis Jabatan Administrator 2022 di Lingkungan Inspektorat Jenderal pada tanggal 27 September 2022 (UND-241/IJ.1/2022) dan Sosialisasi Asesi Asesmen Teknis Jabatan Administrator 2022 pada 30 September 2022 (UND-16/IJ.12/2022).
4. Rangkaian kegiatan Manajemen Talenta yang telah disampaikan melalui Laporan Pelaksanaan Manajemen Talenta nomor LAP-24/IJ.1/2022 tanggal 22 Desember 2022 kepada Biro Sumber Daya Manusia selaku pengelola MT Kemenkeu Pusat melalui Nota Dinas nomor ND-3463/IJ.1/2022 pada tanggal 22 Desember 2022.
5. Pemutakhiran e-dosir dengan realisasi 100% pada tanggal 31 Desember 2022 pada website <https://hris.e-prime.kemenkeu.go.id> dan tingkat akurasi data HRIS Kemenkeu.

**Tabel 3. 53 Capaian IKU SS Penguatan Sumber Daya yang Optimal**

SS 9: Penguatan Sumber Daya yang Optimal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9a Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100%	116,93%	116,93
9b Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	91,75%	111,49%	120
9c Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	98,13	102,75

### 9a. Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM bertujuan untuk mengukur SDM Itjen yang memiliki kepemimpinan yang tepat dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan organisasi, serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Pengukuran IKU Tingkat Kualitas

Adapun dalam pelaksanaan IKU tersebut, terdapat kendala dalam pelaksanaan pemutakhiran data pegawai pada HRIS. Salah satu penyebabnya adalah beberapa pegawai masih berpikir bahwa kewajiban pemutakhiran data merupakan kewajiban dari UPSDM, yang menyebabkan basis data pada HRIS kurang akurat karena pemutakhiran hanya dilakukan oleh UPSDM saat terdapat event kepegawaian tertentu (misal kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, UPSDM Itjen melaksanakan beberapa hal yakni:

1. Menyampaikan imbauan secara periodik kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk secara berkesinambungan memastikan informasi dan dokumen kepegawaian masing-masing di HRIS telah sesuai dan mutakhir,

2. Melakukan koordinasi berkala antara UPSDM di Itjen dengan UPSDM Pusat Kemenkeu, dan
3. Melakukan verifikasi usulan penambahan/perubahan dari pegawai dan pemutakhiran terhadap informasi dan dokumen kepegawaian secara berkesinambungan.

### 9b. Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu

Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu diukur melalui 2 (dua) aspek yaitu tingkat implementasi budaya kemenkeu dan tingkat implementasi Learning Organization. Tingkat implementasi budaya kemenkeu merupakan kegiatan penguatan budaya di lingkungan Kemenkeu yang mendukung pola kerja sehingga pegawai dapat menyadari, memahami, dan menerima/menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan efektif berbasis core values ASN dan nilai-nilai Kemenkeu yang perlu dibudayakan untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai. Sedangkan tingkat implementasi Learning Organization merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kemenkeu sebagai learning organisation yaitu organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Rincian realisasi atas IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu pada tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.55 Capaian Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu**

Inspektorat Jenderal	Penguatan Sumber Daya yang Optimal						
	9b-CP Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/KP
Target	-	20%	20%	-	91,75%	91,75%	
Realisasi	-	40%	40%	-	111,49%	111,49%	Max/TLK
Capaian	-	120%	120%	-	120%	120%	

Beberapa hal penting yang telah dilakukan oleh Itjen, antara lain:

1. Telah dilaksanakan internalisasi awal penguatan budaya Kemenkeu meliputi:
  - a. pelaksanaan forum sekretaris terkait budaya Kemenkeu;
  - b. penyampaian masukan/persetujuan kepada Biro SDM terkait budaya Kemenkeu;
  - c. pelaksanaan internalisasi budaya minimal oleh pejabat administrator; dan
  - d. pelaksanaan internalisasi budaya minimal oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

2. Telah dilaksanakan internalisasi lanjutan penguatan budaya Kemenkeu oleh Inspektorat Jenderal meliputi:

- a. Preliminary FGD Pejabat Administrator Q1 & Kick-Off Duta Transformasi Kemenkeu Tahun 2022 terkait dengan Penguatan Integritas
- b. Penguatan peran pengawasan tiga peran Menteri Keuangan sebagai pengguna anggaran (COO), Bendahara Umum Negara (CFO-BUN), dan wakil pemerintah dalam kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) pada Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Itjen Tengah Tahun 2022 (14 Juni 2022)
- c. Irjen Menyapa terkait Peran Aktif Lini Pertama Perkuat Fondasi Integritas
- d. Seminar "Cara APIK Melawan Fraud dan Money Laundering" yang diselenggarakan secara hybrid pada Kantor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 23 September 2022
- e. Transformasi Itjen Kemenkeu Wujudkan Pengawasan Lebih Kuat dalam perayaan HUT 46 Inspektorat Jenderal pada 21 September 2022
- f. Penguatan pengawasan keuangan negara antara Itjen Kemenkeu dan PPATK pada 24 Agustus 2022
3. Telah dilaksanakan internalisasi lanjutan penguatan budaya Kemenkeu oleh Tim Duta Transformasi, meliputi
  - a. Proyek Duta Transformasi Itjen terkait
    - 1) Subsidi PPh DTP dan PNBP Panas Bumi, Kawal Tata Kelola yang Efektif
    - 2) Penguatan Budaya Kemenkeu Implementasi Sistem Manajemen Investigasi
  - b. Proyek Kolaborasi Duta Transformasi Inspektorat Jenderal dengan PAKSI Kemenkeu terkait Internalisasi Nilai-Nilai, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN Kementerian Keuangan melalui webinar dengan tema "Integritas di Tahun Politik".
  4. Telah dilaksanakan tingkat pengukuran kematangan Budaya Kemenkeu meliputi
    - a. penyampaian ND himbauan dari pimpinan kepada seluruh unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal melalui ND-3397/IJ.1/2022 tanggal 15 Desember 2022, dan
    - b. pelaksanaan pengisian survei Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu, dengan nilai realisasi berdasarkan perhitungan nilai capaian ketiga unsur pada ND-1765/SJ/2022 beserta lampirannya.

5. Menyampaikan kepada seluruh unit terkait pembelajaran yang perlu diikuti oleh seluruh pegawai pada awal tahun 2022.
6. Menyampaikan kepada seluruh unit terkait peran yang harus dilaksanakan oleh pimpinan (leader) pada awal tahun 2022.
7. Menyampaikan KMK tentang Learning Organization segera setelah terbit dan mengundang para PIC unit sampel untuk mengikuti sosialisasi tentang Implementasi LO yang diadakan oleh BPPK.
8. Mengidentifikasi dan menjalankan strategi implementasi LO sebagaimana yang diatur dalam KMK.

### 9c. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas pagu neto, keluaran riil, efisiensi dan konsistensi. Pelaksanaan anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenkeu. Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan tahun 2022 masih mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu sebagaimana perhitungan pada tahun 2021.

Realisasi IKU ini adalah sebesar 98,13, yang artinya telah melampaui target sebesar 95,5 sehingga capaiannya adalah 102,8. Pencapaian ini menunjukkan Itjen mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang tersedia sesuai rencana yang telah ditetapkan. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.56.

**Tabel 3. 56 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

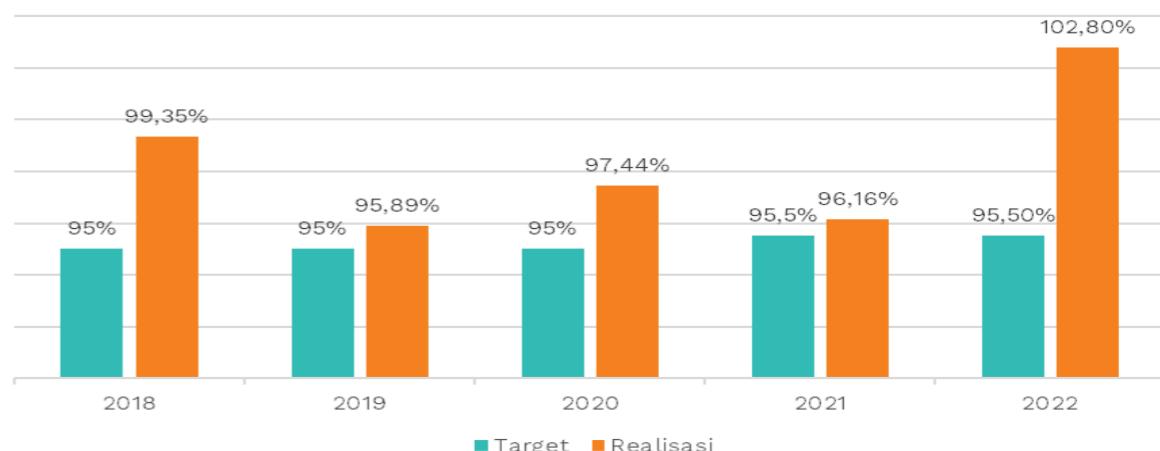
Inspektorat Jenderal	Pengelolaan Keuangan yang Optimal						Pol/KP
	9c-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	
Realisasi	100	100	100	100	98,13	98,13	Max/TLK
Capaian	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	102,8	

Berbagai tantangan dan kendala ditemukan dalam upaya pemenuhan IKU ini. Pada tahun 2022, meskipun pandemi covid belum dinyatakan usai, Itjen dapat meningkatkan capaian penyerapan anggaran lebih tinggi dari tahun 2021. Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata capaian penyerapan anggaran dari mulai triwulan I s.d. IV. Dalam menghadapi kendala tersebut, tindakan dan extra effort yang dilakukan Itjen, diantaranya:

1. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian RO;
2. Mempercepat pembayaran tagihan UP/LS, dengan memperhatikan RPD halaman III DIPA;
3. Menjaga proses administrasi penyelesaian tagihan agar sesuai dengan regulasi;
4. Menjaga indikator lainnya agar memenuhi parameter IKPA;
5. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output; dan

6. Efisiensi anggaran kegiatan melalui optimalisasi revisi POK.

Berikut tabel capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 s.d. 2022.



**Gambar 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

IKU ini merupakan cascade dari KK Menteri Keuangan dan tidak terdapat dalam RPJMN maupun target-target nasional lainnya. Oleh karena itu capaian atas target ini tidak dapat dibandingkan dengan target level kementerian maupun level nasional.

### SASARAN STRATEGIS 10: PENGUATAN EKOSISTEM TIK DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFektif

Sasaran Strategis ini mengukur kemampuan Itjen dalam mendukung Kementerian Keuangan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, SS ini juga mengukur sistem manajemen informasi yang andal yang akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu penyelesaian sistem layanan TIK yang strategis. Rincian capaian SS ini dapat dilihat pada Tabel 3.57.

**Tabel 3. 57 Capaian IKU SS Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif**

SS 10: Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10a	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	90%	100%	111,11
10b	Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu	100%	107,5	107,5
10c	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,84	108,17

#### 10a. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

Penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis (baik yang terdapat dalam IS RBTK maupun non-IS RBTK) tahun 2021 yang telah diselesaikan sesuai norma waktu. Proyek TIK strategis adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan

rencana strategis dan arsitektur TIK Kemenkeu, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan.

Tujuan dari Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK, yaitu untuk mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK melalui ketersediaan sistem layanan TIK dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan TIK dengan penyelesaian proyek strategis TIK yang terdapat dalam IS RBTK maupun yang tidak terdapat dalam IS RBTK.

Pengukuran IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK dilakukan berdasarkan milestone yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 dan di-monitoring melalui Kertas Kerja Proyek Strategis Kemenkeu. Proyek strategis TIK Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 yaitu Pengembangan Dashboard Profiling yang merupakan perangkat pendukung kegiatan pengendalian dan pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan yang berbasis risiko dalam rangka implementasi kerangka kerja integritas melalui kegiatan pencegahan, deteksi, respons, dan monitoring Kemenkeu. Adapun rencana kerja proyek yang telah ditetapkan untuk melaksanakan proyek strategis tersebut sebagai berikut:

1. pemahaman proses bisnis dan identifikasi data serta penyusunan dokumen kebutuhan pengguna (user requirement) aplikasi yang diperlukan;
2. koordinasi kepada para pihak terkait integrasi, penyaluran data, dan hasil dashboard setiap unit
3. analisis terhadap data (data analytics) serta script untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan data yang telah didapatkan
4. deployment hasil data analytics ke dalam dashboard
5. penyusunan kriteria/bobot dalam mengintegrasikan beberapa hasil data analytics untuk penentuan tingkat risiko
6. pemanfaatan dan penggunaan dashboard.

Target IKU ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 87% menjadi 90%, mengacu pada target pada level Kemenkeu-Wide. Dari target yang ditetapkan sebesar 90%, realisasi persentase penyelesaian proyek strategis TIK tahun 2021 diperoleh sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 111,11 (berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Nomor ND-50/IT/2023 tanggal 11 Januari 2023, Hal Laporan Proyek TIK Strategis Kemenkeu Triwulan IV 2022). Hal ini menunjukkan Itjen telah mampu mengelola layanan TIK dengan baik sehingga keandalan sistem manajemen informasi dapat terwujud. Rincian capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58 Tingkat Penyelesaian Proyek Strategis TIK

Inspektorat Jenderal	Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal 10a-CP Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK Itjen							
	T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60	90%	90%		
Realisasi	12,5%	35,9%	35,9%	60,26	100%	100%		
Capaian	125	119,67	119,67	100,43	111,11	111,11		

Dalam pencapaian target IKU, ditemukan beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan dokumen kebutuhan pengguna yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan proses bisnis dan belum adanya kepastian proses bisnis baru yang hendak dibangun dengan aplikasi, sehingga menimbulkan keterlambatan aplikasi yang diselesaikan;
2. Pusintek selaku penyedia data terlambat memberikan akses terhadap application programming interface (API) untuk aplikasi WISE, e-Hukdis, dan ALPHA, sehingga terdapat potensi keterlambatan dalam integrasi dan penyaluran data.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses pencapaian IKU, unit TIK Inspektorat Jenderal melakukan koordinasi secara intens dengan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) selaku pemilik proses bisnis dan Pusintek selaku penyedia data agar rencana kerja dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan dalam penyelesaian Proyek Strategis TIK ini adalah sebagai berikut:

1. pemahaman proses bisnis dan identifikasi data serta penyusunan dokumen kebutuhan pengguna (user requirement) aplikasi yang diperlukan: identifikasi proses bisnis yang dapat dimasukkan ke dalam dashboard, identifikasi sumber data terkait proses bisnis, penyusunan dokumen kebutuhan pengguna (user requirement).
2. koordinasi kepada para pihak terkait integrasi, penyaluran data, dan hasil dashboard unit: koordinasi dengan pihak penyedia data, pengaliran data dan hasil analisis dashboard.
3. analisis terhadap data (data analytics) serta script untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan data yang telah didapatkan: pemahaman data, analisis kualitas data, pembersihan dan transformasi data, data modeling, evaluasi hasil modeling.
4. deployment hasil data analytics ke dalam dashboard: persiapan dari sisi aplikasi, integrasi data ke dalam dashboard.
5. penyusunan kriteria/bobot dalam mengintegrasikan beberapa hasil data analytics untuk penentuan tingkat risiko: pembobotan hasil DA ke dalam tingkat risiko, penentuan profil risiko berdasarkan data yang telah didapatkan, integrasi hasil penilaian ke dalam profil pegawai dan profil kantor.
6. pemanfaatan dan penggunaan dashboard: pemanfaatan oleh Inspektorat Bidang Investigasi,

pemanfaatan dashboard oleh Inspektorat Jenderal.

Sebelumnya, IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK telah dilaksanakan dua kali pada tahun 2020 dan 2021 dengan proyek strategis yang berbeda. Pada tahun 2020, Inspektorat Jenderal mempunyai tiga proyek strategis TIK, yaitu aplikasi dashboard PNBP, aplikasi e-Revu SAKTI, dan aplikasi Pro UKI. Kemudian, pada tahun 2021, Inspektorat Jenderal mempunyai dua proyek strategis TIK, yaitu aplikasi e-Revu LK dan e-Hukdis. Kelima proyek strategis TIK tersebut telah diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga Inspektorat Jenderal telah mendapat realisasi IKU sebesar 100% selama tiga tahun berturut-turut.

**Tabel 3.59 Capaian Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK dalam Renstra**

8a-CP Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Renstra Itjen	85%	100%	87%	100%	90%	100%

Dalam rangka penyempurnaan dashboard profiling, Inspektorat Jenderal kembali menetapkan dashboard profiling sebagai Proyek Strategis TIK untuk tahun 2023 dengan fokus pengembangan pada profiling kantor dan pengukuran tingkat risiko pegawai. Rencana kerja proyek yang telah disusun untuk penajaman adalah sebagai berikut: pemahaman proses bisnis dan identifikasi kebutuhan data, koordinasi terhadap pihak penyedia data, dan pemanfaatan dashboard.

#### 10b. Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 241/KMK.01/2021 tentang Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Tahun 2021-2024, salah satu visi Kemenkeu adalah mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai enabler dan backbone transformasi digital Kemenkeu, serta pendorong modernisasi perekonomian Indonesia. Enabler yang dimaksud adalah TIK yang mampu menciptakan peluang improvement dalam transformasi digital, sedangkan backbone adalah TIK yang menjadi tumpuan yang dapat diandalkan dalam transformasi digital menuju Kemenkeu digital dan mendorong Indonesia digital. Demi mencapai visi tersebut, maka dirumuskan IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem (TIDEE) yang dilaksanakan oleh Kemenkeu Wide, termasuk Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kemenkeu.

Ekosistem digital Kemenkeu merupakan suatu ekosistem TIK yang terdiri dari aplikasi Kemenkeu yang menghubungkan antara pemilik proses bisnis dengan pengguna aplikasi, sehingga mewujudkan peningkatan utilitas aplikasi. Kriteria utilitas aplikasi dilihat dari pertumbuhan data, besaran pengguna aktif, dan counter aplikasi. Jika salah satu kriteria ini mengalami pertumbuhan positif, aplikasi dinyatakan sebagai memiliki utilitas. Realisasi IKU TIDEE Kemenkeu dihitung berdasarkan rata-rata realisasi TIDEE untuk masing-masing aplikasi yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal. Realisasi TIDEE

masing-masing aplikasi adalah:

- 70% apabila aplikasi tidak memiliki utilitas dan pemilik aplikasi tidak melaksanakan penghapusan,
- 90% apabila aplikasi memiliki utilitas dan pemilik aplikasi tidak menyusun dokumen cost benefit analysis (CBA) dari aplikasi,
- 100% apabila aplikasi tidak memiliki utilitas dan ditindak lanjuti dengan penghapusan dan disampaikan kepada Pusintek dengan tembusan ke CIO,
- 100% apabila aplikasi memiliki utilitas dan pemilik aplikasi menyusun dokumen CBA yang disampaikan kepada CIO dengan tembusan ke Pusintek, dan
- 120% apabila penghapusan aplikasi yang tidak memiliki utilitas dilakukan s.d. triwulan II.

Sebagai informasi tambahan, aplikasi yang termasuk ke dalam ruang lingkup IKU TIDEE adalah aplikasi yang termasuk ke dalam daftar layanan hosting colocation Pusintek mulai tahun 2021.

Capaian IKU TIDEE Kemenkeu Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 60 Capaian IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu**

Inspektorat Jenderal	Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	10b-CP Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	30,0	30,0	-	-	100,0	100,0	Max/TLK
Realisasi	-	43,9	43,9	-	-	107,5	107,5	
Capaian	-	120,0%	120,0%	-	-	107,5%	107,5%	

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusintek nomor ND-12/IT/2023 tanggal 4 Januari 2023 hal Penyampaian Notula Rapat Pembahasan IKU Bidang TIK Tahun 2023 dan Realisasi IKU Bidang TIK Tahun 2022, IKU TIDEE Kemenkeu mendapat realisasi sebesar 107,5 pada tahun 2022. Realisasi ini diperoleh dari penghapusan 15 aplikasi yang tidak memiliki utilitas pada semester I, penghapusan 3 aplikasi yang tidak memiliki utilitas pada semester II, dan pembuatan dokumen CBA untuk 22 aplikasi yang masih memiliki utilitas dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3. 61 Rincian Realisasi IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu**

No.	Nama Aplikasi	Tindak Lanjut	Realisasi
1.	Aplikasi MONITA	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
2.	Aplikasi ReCITA	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
3.	Aplikasi Kepegawaian (SiAsni)	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
4.	Aplikasi SIMANIS	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
5.	Aplikasi Pelayanan Bagian Umum (SIAYU)	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100

No.	Nama Aplikasi	Tindak Lanjut	Realisasi
6.	Aplikasi Nikita	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
7.	Aplikasi Repository	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
8.	Profil Bag PK	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
9.	Data Forensik IBI	Dihapuskan pada Semester II ND-3404/IJ.1/2022	100
10.	Profil Bag SIP	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
11.	Profil Bag Umum	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
12.	Profil Bag Peg	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
13.	Aplikasi KATANA	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
14.	Active Directory	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
15.	Wasnal	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
16.	Service Desk	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
17.	Siska	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
18.	Dukungan Pengguna (Linux KMS - KMTV - SMARTIGBOT (Ubuntu Server) - SSO Server - Pola Karir - Manajemen Talenta - SMS Gateway Client for Diklat)	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
19.	Data NIP Pegawai	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
20.	Portal ITJEN	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
21.	TeamWatch	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
22.	OTI+	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
23.	MLS	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
24.	SMART IBI	Dihapuskan pada Semester II ND-3404/IJ.1/2022	100
25.	PKPT Online	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
26.	SIDAWAI	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
27.	PRISMA	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
28.	SIMIKA	Dihapuskan pada Semester II ND-3404/IJ.1/2022	100
29.	Baginda	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
30.	Pojok PUG	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
31.	Perpustakaan ITJEN	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
32.	Live Helper Chat Layanan TI	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120

No.	Nama Aplikasi	Tindak Lanjut	Realisasi
33.	SIMIKO	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
34.	Daftar Peraturan Internal ITJEN	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
35.	KMS Itjen	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
36.	Penomoran Surat ITJEN	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
37.	FAQ Teammate	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
38.	Pemesanan Tiket Pesawat ITJEN	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
39.	TeamCentral	CBA pada ND-3404/IJ.1/2022	100
40.	SIMANIS Mobile	Dihapuskan pada Semester I ND-1817/IJ.1/2022	120
Rata-Rata Realisasi Aplikasi			107,5

Potensi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU TIDEE Kemenkeu adalah adanya aplikasi yang tidak digunakan, tetapi tidak dihapuskan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan untuk penghapusan aplikasi yang sudah digunakan, sehingga berdampak pada pemborosan sumber daya pada aplikasi dengan utilitas rendah.

Untuk mencapai target, unit TIK Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- identifikasi aplikasi yang sudah dinonaktifkan;
- penghapusan atau penonaktifan aplikasi yang tidak digunakan pada Semester I;
- penyampaian daftar aplikasi yang sudah dihapus pada Semester I ke Pusintek melalui ND-1817/IJ.1/2022 tanggal 2 Juli 2022 hal Penyampaian Konfirmasi Penghapusan Aplikasi untuk Indikator Kinerja Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu;
- penyusunan konsep dokumen CBA aplikasi yang masih digunakan;
- pembuatan laporan CBA untuk seluruh aplikasi yang masih digunakan;
- pembahasan laporan CBA dengan pemilik proses bisnis pada tanggal 22 November 2022, sesuai dengan UND-4/IJ.15/2022;
- penyampaian hasil CBA dan daftar aplikasi yang dihapus pada semester II ke Pusintek melalui ND-3404/IJ.1/2022 tanggal 16 Desember 2022 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem.

#### 10c. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada tahun 2021 diberi nama IKU Indeks Efektifitas Komunikasi Publik. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2022. IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mendukung

implementasi salah satu sasaran strategis Kemenkeu dimana organisasi perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan. Dalam pengukuran IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan terdapat 5 (lima) unsur sebagai dasar pengukuran sebagai berikut:

1. Efektivitas Komunikasi Publik
2. Partisipasi Agenda Setting (kolaborasi)
3. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi)
4. Penanganan Isu Negatif
5. Kolaborasi Pendukung Program EKSIS

Penilaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal selaku koordinator kehumasan Kementerian Keuangan. Pada penilaian Semester 1 tahun 2022, Itjen mencapai indeks 3,77 dari target indeks 3,55 atau meraih capaian sebesar 106,29. Sementara pada Semester 2 tahun 2022, Itjen berhasil meningkatkan nilai indeks menjadi 3,84 dari target indeks 3,55 atau meraih capaian sebesar 108,31.

**Tabel 3. 62 Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan**

Inspektorat Jenderal	Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal						Pol/KP
	10c-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	
Realisasi	-	3,77	3,77	-	3,84	3,80	Max/Average
Capaian	-	106,29	106,29	-	108,31	107,04	

Pada 2022, Itjen telah melaksanakan dan menyusun dokumen strategi komunikasi agenda kegiatan yang terbagi ke dalam tiga sub dokumen yaitu Sub-dokumen Event Plant, Sub-dokumen Mass Media Plan, dan Sub-dokumen Media Social Plan yang dijadikan acuan dan sumber data atas penilaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan. Dari hasil perencanaan strategi komunikasi Itjen di tahun 2022, Itjen telah menyusun dan melaksanakan rencana strategi komunikasi untuk 4 kegiatan/event, 7 konten utama media sosial yang diwujudkan ke dalam 93 output konten media sosial, dan dua strategi komunikasi untuk publikasi pada mass media.

Pada tahun 2022, tidak terdapat rekomendasi dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi untuk menangani isu negatif Itjen di media yang perlu ditindaklanjuti, sehingga realisasi dianggap tercapai & mencerminkan reputasi Itjen yang baik di masyarakat luas. Untuk mendukung tercapainya IKU ini dan sasaran kehumasan, tahun 2022 Itjen telah melaksanakan berbagai extra effort yakni:

1. Menyusun dan melaksanakan Dokumen Acuan IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan.
2. Mendukung konten agenda setting mingguan dan harian, melakukan rekap posting konten setiap

hari, dan capaian engagement mingguan pada setiap konten dukungan agenda setting Kemenkeu.

3. Melakukan kerja sama dengan Duta Transformasi Itjen untuk menyusun rencana kolaborasi antara unit teknis, Bagian OAHP, dan BUK terkait publikasi konten kegiatan pengawasan intern.
4. Menggerakkan Army Itjen yang terdiri dari para pegawai muda Itjen untuk ikut mendukung konten Kemenkeu khususnya mengenai isu sensitif seputar pengelolaan keuangan negara.
5. Menggerakkan Employee Advocacy dan para pegawai muda Itjen untuk ikut mendukung konten APBN Kita secara rutin beserta monitoring dan pelaporan aktivasi konten kepada Biro KLI.
6. Menyampaikan permintaan dukungan amplifikasi konten APBN Kita, isu terkini, dan konten harian Itjen kepada seluruh pegawai Itjen melalui broadcast whatsapp dan ND Sekretaris Itjen.
7. Membentuk & mengorganisir LO Kehumasan di setiap Unit Eselon II dan Bagian untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi kehumasan & permintaan dukungan materi publikasi.
8. Senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah partisipan Employee Advocacy melalui monitoring partisipasi dan pelaporan aktivasi pegawai di setiap unit.

## B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, Itjen melaksanakan dua program Kementerian Keuangan, yaitu Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko serta Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran awal Rp76.105.995.000. Pada awal tahun 2022, Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan Automatic Adjustment dan berdampak pada pagu anggaran Itjen berkurang sebesar Rp1.000.000.000. Pada pertengahan tahun 2022, pemusatan gaji satu Kemenkeu mulai diterapkan sehingga pagu belanja pegawai sebesar Rp29.794.729.000 dialihkan ke Setjen. Dengan pengalihan pagu tersebut, pagu Itjen menjadi Rp46.311.268.000

Menjelang akhir tahun 2022, kebutuhan anggaran semakin meningkat karena adanya tugas baru terkait pengawasan BUN sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pengawasan Itjen mendapat penambahan anggaran sebesar Rp2.059.578.000. Itjen kemudian melakukan optimalisasi anggaran dan menggunakan anggaran seefisien mungkin dengan melakukan pemilihan prioritas kegiatan.

Rincian pagu & realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Jenis Belanja	TA 2022		
	Pagu Refocusing IV (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	17.291.851.000	17.060.282.245	98,66
Belanja Barang	29.632.539.000	28.443.617.407	95,98
Belanja Modal	1.446.456.000	1.442.350.232	99,71
Total Belanja	48.370.846.000	46.946.249.884	97,04

Efisiensi anggaran ini dapat dicapai oleh Itjen sebagai hasil dari perubahan pola kerja selama masa pandemi. Pola kerja dengan office automation dan remote auditing mengurangi belanja birokrasi Itjen terutama pada belanja barang. Itjen juga melakukan efisiensi anggaran dalam bentuk:

1. Efisiensi pelaksanaan tugas:
  - a. Pemanfaatan jam kerja secara efektif
  - b. Pemanfaatan sistem aplikasi yang ada dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
  - c. Akselerasi pembangunan sistem aplikasi yang dibutuhkan dalam menunjang otomasi dan efisiensi pelaksanaan tugas.
2. Efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas:
  - a. Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dilakukan secara selektif dan efisien.
  - b. Pembayaran uang perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan maksimal 80% dari SBM.
  - c. Pembayaran Daftar Pengeluaran Riil disesuaikan dengan pengeluaran yang benar-benar terjadi (at cost) dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
  - d. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi sedapat mungkin menggunakan sarana teknologi informasi untuk berkomunikasi antar wilayah
3. Efisiensi pemberian kudapan dan makan siang rapat:
 

Dengan pemberlakuan WFH dan pembatasan WFO, rapat pertemuan dan koordinasi sebagian besar dilakukan secara daring, sehingga penggunaan anggaran untuk kudapan dan makan siang rapat dapat diefisienkan;
4. Efisiensi pemberian honorarium dan jasa profesi:
  - a. Pengurangan jumlah tim kerja atau anggota tim kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022, tim kegiatan yang dibayarkan hanya satu yaitu terkait dengan komite audit.
  - b. Pembayaran hanya diperkenankan bila narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia/pengajar berasal dari kementerian/lembaga lain dan/atau pihak lain, dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/workshop/sarasehan/simposium/lokakarya/focus group discussion dan/atau kegiatan sejenis.
5. Efisiensi sumber daya air, listrik, ATK dan internet:
  - a. Penggunaan air secara efisien;

- b. Penerapan Green Building, dengan mematikan lampu pada area yang tidak terpakai atau menyalakan lampu hanya pada saat dibutuhkan dan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan;
- c. Penggunaan ATK secara efisien dan penggunaan aplikasi online (paperless);
- d. Penggunaan aplikasi Nadine untuk persuratan online (paperless)
- e. Mengutamakan penggunaan jaringan internet yang disediakan Pusintek.

Efisiensi sumber daya air, listrik, ATK, dan internet juga dapat dioptimalkan karena adanya penerapan WFH WFO, pembatasan jumlah pegawai yang melakukan WFO.

#### 6. Efisiensi pengadaan barang/jasa:

- a. Pengadaan alat elektronik yang hemat listrik dan hemat biaya pemeliharaan; dan
- b. Penggunaan inventaris kantor secara bijak sehingga biaya pemeliharaannya berkurang.

Penerapan gerakan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, tidak mengurangi capaian target output dan indikator sasaran program Itjen. Dengan sumber daya keuangan yang ada, Itjen senantiasa mengupayakan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Efisiensi juga dapat diwujudkan dalam pencapaian seluruh Indikator Kinerja Kegiatan yang menunjukkan capaian indikator sesuai atau melebihi target dengan anggaran yang lebih kecil. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja berikut realisasi anggaran untuk tiap indikator terdapat dalam Tabel 3.64.

Tabel 3.64 Realisasi Indikator Kinerja serta Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	IKU	Kinerja		Anggaran	Realisasi Anggaran*
		T	R		
1 Penguatan Integritas, dan Pengawasan Intern yang Ber nilai Tambah	1a-CP Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BUN	4 (skala 4)	4	2.896.215.733	2.806.877.994
	1b-CP Indeks Integritas	91	89,45	960.326.701	927.846.369
	1c-N Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	4,55	4,61	1.137.925.843	1.085.291.446
2 Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal	2a-CP Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85	88,69	1.250.063.568	1.210.628.256
	2b-CP Tingkat Maturitas Penyelegaraan SPIP	4	4,074	532.378.843	513.803.187
	2c-N Indeks Efektivitas UKI	80	92,06	1.550.470.535	1.499.727.682

	Sasaran Strategis	IKU	Kinerja		Anggaran	Realisasi Anggaran*	
			T	R			
3	Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas	3a-N	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan	5	5	2.154.677.208	2.085.966.827
		3b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%	107,89%	1.777.196.637	1.705.495.249
		3c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan konsultasi	4,59	4,55	629.758.043	609.735.334
4	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal	4a-N	Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas	2	2	902.194.593	875.073.802
		4b-N	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti	65%	84,09%	976.157.743	947.327.925
5	Sinergi Pengawasan yang Efektif	5a-CP	Persentase Communiqué G-20 usulan Indonesia yang Disepakati	70%	94,05%	633.628.840	611.870.378
		5b-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92%	96,88%	1.300.299.342	1.258.076.824
6	Penjaminan Pengawasan Pengendalian Intern yang Berkualitas	6a-N	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AIPPI	92	95,89	999.742.540	967.020.847

	Sasaran Strategis	IKU	Kinerja		Anggaran	Realisasi Anggaran*	
			T	R			
7	Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan	7a-N	Jumlah Pedoman Pengawasan	7	9	1.129.459.566	1.092.057.978
		7b-N	Persentase Pengawasan Berbasis Continuous Audit	80%	97%	1.101.759.426	1.064.903.144
		7c-N	Persentase implementasi PIJJ	80%	99,77%	1.001.363.599	967.346.353
8	PePenguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile	8a-CP	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	92%	100%	1.354.933.590	1.277.073.951
		8b-N	Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	4	4	2.001.905.747	1.878.982.160
9	Penguatan Sumber Daya yang Optimal	9a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100	116,93	1.758.434.843	1.656.125.537
		9b-CP	Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	91,75	111,49	1.097.147.510	1.045.757.550
		9c-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	98,13	751.898.570	726.612.548
		10a-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	90%	100%	1.044.067.188	1.004.896.684
10	Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif	10b-CP	Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu	100%	107,5%	792.144.038	767.777.750
		10c-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,84	1.344.844.754	1.299.691.863

Sasaran Strategis	IKU	Kinerja		Anggaran	Realisasi Anggaran*
		T	R		
	TOTAL			31.078.995.000	29.885.967.639

\*) Total anggaran dan realisasi belum termasuk belanja pegawai

## C. Highlight Hasil Pengawasan

Kinerja pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen selama tahun 2022 sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan atas fungsi-fungsi penting Kemenkeu. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan Kemenkeu. Sepanjang tahun 2022, Itjen meningkatkan peran pengawasannya dengan lebih aktif menggalang sinergi dan koordinasi dengan APIP Kementerian/Lembaga bahkan Pemerintah Daerah dalam rangka mengawal pelaksanaan tugas Menteri Keuangan, baik sebagai COO maupun CFO.

Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Itjen sepanjang tahun 2022 mengacu pada perencanaan tahunan pengawasan Itjen sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 233/IJ/2021 tentang Perencanaan Tahunan Pengawasan Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah terakhir dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-64/IJ/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 233/IJ/2021 tentang Perencanaan Tahunan Pengawasan Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022. Beberapa kegiatan pengawasan yang menjadi milestone pendukung capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

- I. Pengawasan atas Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Dengan diterbitkannya PMK-18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan memungkinkan Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan diluar unit existing yang selama ini menjadi bagian dari Kemenkeu, yakni:

No.	Kegiatan	Keterangan
a.	Pengawasan atas Pemberian PMN pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Tim Itjen menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan PMN pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk, antara lain sebagai berikut:  1. Prosedur Penempatan dan Penggunaan Dana PMN pada perusahaan afiliasi (PT JMM, PT JJB, dan PT KWS) belum memadai sehingga berpotensi berisiko: Rekening penampungan dana PMN pada PT JMM dapat digunakan untuk transaksi operasional lainnya, PT JJB dan PT KWS dapat menggunakan rekening operasional untuk menampung dana PMN, Penggunaan dana PMN oleh perusahaan afiliasi PT ADHI tidak sesuai dengan kajian penambahan PMN. 2. Ketidaksesuaian Rencana Penggunaan PMN pada PT ADHI, Perusahaan Afiliasi, dan Kajian Penambahan PMN. 3. Belum terdapat mekanisme pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana PMN yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal pada perusahaan afiliasi PT ADHI yang menerima dana PMN. 4. Terdapat risiko tidak terpenuhinya tambahan kewajiban setoran modal PT JMM sebesar Rp1,416 Triliun akibat perubahan kepemilikan PT ADHI pada PT JMM. 5. Keterlambatan pembebasan lahan dan progres pekerjaan konstruksi Tahap I pada proyek ruas tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulon Progo.  Atas permasalahan yang ditemukan, Tim Itjen akan melakukan beberapa kegiatan kedepannya antara lain: Pendalaman data dan informasi perubahan kontrak turnkey menjadi progres penyelesaian, Melakukan analisis & konfirmasi kepastian pembangunan Water Treatment Plant terkait penyelesaian bendungan Karian & Conveying Pipeline dengan Ditjen Cipta Karya KemenPUPR & PT KWS, dan Merumuskan konsep temuan dan rekomendasi hasil analisis data dan informasi.

<p>b. Pengawasan atas Pemberian PMN pada PT Waskita Karya.</p>	<p>PT Waskita Karya telah menerima PMN di tahun 2021 senilai Rp7,9 T untuk penyelesaian ruas tol yang dilaksanakan oleh anak perusahaan. Dari hasil pengawasan, Tim Itjen menemukan beberapa permasalahan pengelolaan PMN pada PT Waskita Karya, antara lain sebagai berikut: Kontrak kinerja dengan anak perusahaan tidak dibuat, SOP penarikan &amp; penggunaan dana PMN dari PT Waskita Karya ke anak perusahaan belum memadai untuk penyelesaian 7 ruas tol, dan Keterlambatan penerbitan obligasi dan sukuk tahun 2022 mengganggu rencana keuangan termasuk pendanaan proyek.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Tim Itjen merekomendasikan PT Waskita Karya untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: Menyusun kontrak kinerja dengan anak perusahaan, Memperbaiki SOP penggunaan dana PMN pada anak perusahaan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dan Memenuhi dokumen persyaratan dan membahas secara intensif dengan OJK dan pihak penjamin (DJPPR dan PT PII) untuk percepatan penerbitan obligasi dan sukuk.</p>	<p>d. Pengawasan atas Pemberian PMN pada PT Hutama Karya</p>	<p>PT Hutama Karya telah menerima PMN sebesar Rp25,2 T (tahun 2021) dan sebesar Rp23,85 T (tahun 2022). Dari pengawasan yang telah dilaksanakan, Tim Itjen menemukan beberapa permasalahan pengelolaan PMN pada PT Hutama Karya, antara lain: Proses pengusulan dan perencanaan penggunaan PMN tidak didukung dengan rincian biaya investasi sehingga kelayakan perencanaan sulit dinilai dan monitoring tidak secara optimal, Terdapat pembebanan Biaya Umum Kantor Pusat (BUKP) beban gaji direksi/pegawai, umum, &amp; pemasaran Rp40,8 M pada dana PMN namun belum mendapat persetujuan komisaris &amp; pemegang saham, dan Perumusan definisi, tujuan dan formula KPI Akumulasi Panjang Ekuivalen Ruas Tol Terbangun &amp; pelaporan KPI belum memadai.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Tim Itjen merekomendasikan PT Hutama Karya untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: Menyusun dokumen rencana penggunaan PMN 2021 serta usulan dan rencana penggunaan PMN 2022 sesuai rincian biaya investasi beserta uraian biaya di dokumen PPJT, Meminta persetujuan komisaris &amp; pemegang saham terkait pembebanan BUKP yang berasal dari dana PMN, dan Merevisi/melengkapi uraian glossary KPI &amp; menambahkan rumusan trajectory capaian periodik triwulanan, &amp; menyusun prosedur penyusunan, pemantauan, &amp; pelaporan KPI PMN.</p>
<p>c. Pengawasan atas Pemberian PMN pada PT KAI</p>	<p>PT KAI telah menerima PMN sebesar Rp2,6 T (tahun 2021), dari hasil pengawasan Tim Itjen ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan PMN pada PT KAI, antara lain sebagai berikut: Terdapat kelebihan PMN tahun 2021 sebesar Rp1,916T untuk pembiayaan cost overrun LRT Jabodebek; dan Penyelesaian Proyek LRT Jabodebek dan Penyerapan Dana PMN berjalan lambat</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Tim Itjen merekomendasikan PT KAI untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: Berkonsultasi dengan DJKN dan KemenBUMN untuk pengembalian kelebihan PMN, dan Mengambil langkah strategis dengan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub untuk mendorong PT Adhi Karya menyelesaikan proyek.</p>		<h2>II. Penguatan Budaya Integritas</h2> <p>Salah satu komitmen Kemenkeu untuk menjaga dan memperbaiki pengelolaan anggaran adalah dengan penguatan budaya integritas. Hal ini sejalan dengan KMK-91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang salah satu poinya adalah penguatan budaya organisasi Kemenkeu. Salah satu budaya organisasi yang menjadi concern utama adalah budaya integritas, baik dalam pengelolaan anggaran maupun kinerja. Pada tahun 2022, Itjen semakin menggiatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan budaya integritas, antara lain:</p>

No.	Kegiatan	Keterangan	
a.	Survei Penilaian Integritas 2022	<p>Dalam rangka mengukur budaya integritas, sejak tahun 2016 dilakukan penilaian budaya integritas melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak tahun 2018, Kemenkeu d.h.i Itjen diberikan kepercayaan oleh KPK untuk melaksanakan SPI secara mandiri dengan supervisi KPK. Secara umum, SPI melibatkan dua tipe responden, yakni. Responden internal (pegawai Kemenkeu); dan Responden eksternal (pengguna layanan Kemenkeu).</p> <p>Dimensi komponen Penilaian Internal terdiri dari Perdagangan Pengaruh, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan SDM, Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, Sosialisasi Antikorupsi dan Transparansi. Adapun dimensi komponen Penilaian Eksternal terdiri dari Upaya Pencegahan Korupsi, Transparansi dan Keadilan Layanan, dan Integritas Pegawai. Sedangkan dimensi faktor koreksi terdiri dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), Investigasi, Pengkondisian dan Informasi APH.</p> <p>Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik. Indeks tersebut merupakan gabungan dari komponen penilaian internal, komponen penilaian eksternal, komponen FGD dan dikurangi faktor koreksi.</p> <p>Pada tahun 2022, Indeks Integritas Itjen berdasarkan hasil survei adalah sebesar 91,04 namun terdapat pengurangan dari faktor koreksi (dikarenakan masih ditemukan kejadian pelanggaran integritas) sehingga nilai akhir indeks menjadi sebesar 89,45.</p>	c. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
b.	Koordinasi Pencegahan serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas Kegiatan Sosialisasi/ Internalisasi oleh Unit Eselon I, LNSW, dan BLU	<p>Dalam rangka implementasi KMK-323/KMK.09/2021 dan untuk mewujudkan peran aktif Lini Pertama, Lini Kedua, dan Lini Ketiga, Itjen mengimbau UE I/II/III, LNSW, dan BLU untuk melaksanakan sosialisasi antikorupsi. Inspektorat Jenderal telah menyusun Pedoman Sosialisasi Antikorupsi yang berisikan tata cara pelaksanaan sosialisasi dengan menyertakan 7 (tujuh) pilihan tema, yaitu: 1) Benturan Kepentingan; 2) Pengendalian Gratifikasi; 3) Whistleblowing System; 4) Kerangka Kerja Integritas; 5) Budaya Antikorupsi; 6) Kode Etik Kementerian Keuangan; dan/atau 7) Bijak Bermedia Sosial.</p> <p>Itjen juga meminta komitmen seluruh pimpinan unit untuk menjadi pembawa materi sosialisasi. Hal ini merupakan bentuk konkret implementasi tone-at-the-top agar pesan antikorupsi dapat dengan tegas ditangkap oleh jajaran pegawai. Selain itu, Itjen juga melaksanakan monev atas pelaksanaan sosialisasi antikorupsi tersebut.</p> <p>Di samping kegiatan sosialisasi pada unit kerja, Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal selaku Lini Ketiga juga tetap melaksanakan pembekalan nilai integritas. Pembekalan nilai integritas tersebut, antara lain dilaksanakan pada kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru PKN STAN, Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan, dan dukungan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBK/WBBM).</p>	Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi telah menyusun KMK Nomor 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. KMK ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka penguatan integritas dan peningkatan budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. IBI melakukan penyusunan hal yang perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan:

Tabel 3.65 Usulan Pengaturan yang perlu diatur lebih lanjut pada PMK 227/PMK.09/2021

No	Pasal dlm PMK 227/PMK.09/2021	Uraian
1	Pasal 5 ayat (8)	Format SK penetapan UPG
2	Pasal 8 ayat (6)	Format laporan gratifikasi
3	Pasal 9 ayat (4)	Kondisi tertentu dan mekanisme penyerahan objek gratifikasi kepada UPG unit kerja
4	Pasal 18 ayat (4)	Mekanisme penyampaian hasil pelaksanaan rencana kerja triwulan
5	Pasal 19 ayat (2)	Penyusunan dan pemantauan atas identifikasi titik rawan praktik gratifikasi
6	Pasal 20 ayat (4)	Pemantauan atas pengendalian gratifikasi
7	Pasal 21 ayat (4)	Evaluasi atas pengendalian gratifikasi
8	Pasal 22 ayat (3)	Laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi

Hal - hal mendasar yang diatur dalam KMK adalah sebagai berikut: Penegasan komitmen pimpinan yang bertanggungjawab atas implementasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang sejalan dengan Kerangka Kerja Integritas, Kondisi tertentu dan mekanisme penyerahan objek gratifikasi kepada UPG unit kerja, Dalam hal objek gratifikasi dinyatakan dikelola instansi, maka UPG unit kerja menyerahkan kepada unit yang melaksanakan fungsi penatausahaan BMN pada unit kerja untuk dikelola lebih lanjut UPG Tingkat II dan UPG Tingkat I melakukan verifikasi dan kompilasi atas realisasi rencana kerja untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian realisasi rencana kerja. Komponen dalam kegiatan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi, pemantauan dan evaluasi atas pengendalian gratifikasi. Contoh format dalam setiap tahapan untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian keuangan.

<p>d. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)</p> <p>Dalam penyelenggaraan peringatan Hakordia tahun 2022, Itjen berkolaborasi dengan seluruh Unit Eselon I, LNSW, dan BLU/Special Mission Vehicles (SMV) untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan Road to Hakordia, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 16 webinar/sharing session dengan tema integritas;</li> <li>2) Lelang gratifikasi sebagai tindak lanjut pelaporan gratifikasi dan bagian dari pencegahan korupsi;</li> <li>3) Edukasi generasi muda di tingkat SD s.d. SMA melalui kurikulum antikorupsi pada Kementerian Keuangan Mengajar ke-7 tahun 2022;</li> <li>4) Lima lomba bertemakan integritas yaitu cipta puisi, jingle antikorupsi, call for paper bertemakan good governance dalam pencegahan fraud, film, dan video animasi edukatif;</li> <li>5) e-Quiz untuk mengukur pemahaman antikorupsi; dan</li> <li>6) Kampanye Antikorupsi melalui kegiatan funbike oleh Komunitas Sepeda Kementerian Keuangan.</li> </ul> <p>Selanjutnya, sebagai penutup rangkaian kegiatan peringatan Hakordia, sebagai koordinator pelaksana kegiatan Hakordia di lingkungan Kementerian Keuangan, Itjen melaksanakan kegiatan Puncak Peringatan Hakordia Tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda II, yang menghadirkan Menteri Keuangan sebagai Keynote Speaker serta tiga narasumber Speech Series yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.</p> <p>Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan Penyuluhan Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas (Paksi-API) Danarakca Kementerian Keuangan dan pemberian penghargaan kepada perwakilan unit kerja penerima anugerah WBK/WBBM.</p>	<p>e. Pelaporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi</p>	<p>Itjen d.h.i IBI sebagai pengelola pelaporan harta kekayaan di lingkungan Kemenkeu melakukan penyusunan KMK Nomor 388/KMK.09/2022 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.09/2017 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu tujuan penyusunan KMK tersebut karena adanya pencabutan ketentuan terkait penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan perlu adanya penguatan payung hukum terhadap integrasi data Laporan Harta Kekayaan (LHK) antara aplikasi E-LHKPN KPK dan ALPHA Kemenkeu. Pokok-pokok KMK tersebut adalah sebagai berikut: Tata kelola pelaporan harta kekayaan sehubungan dengan implementasi integrasi antara Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pemotongan proses bisnis dengan Unit Kepatuhan Internal dalam hal pemanfaatan data laporan harta kekayaan, Penyempurnaan ketentuan mengenai analisis data, Pengaturan mengenai penggunaan data LHK secara terbatas disertai aspek kerahasiaan; dan Penegasan mengenai sanksi berupa hukuman disiplin PNS bagi (Pejabat/ pegawai yang melanggar ketentuan penyampaian LHK; dan/ atau Pejabat/ pegawai yang tidak menjaga kerahasiaan LHK.)</p>
---	--	---

f. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor	<p>Kemenkeu melakukan pemberahan tata kelola pengaduan dengan menambahkan saluran pengaduan berbasis web dan mengintegrasikan seluruh saluran pengaduan dan monitoring atas penanganannya melalui WISE. WISE menjadi backbone tool dalam proses deteksi dalam implementasi Kerangka Kerja Integritas yang mengintegrasikan seluruh sistem pengaduan pelanggaran di Kemenkeu dan dapat dimanfaatkan oleh Lini Pertama, Lini Kedua, dan Lini Ketiga.</p> <p>Rekomendasi Kajian Mandiri tentang Upaya Pemberian Perlindungan Bagi Pelapor WBS Kemenkeu yaitu perlu adanya payung hukum sistem perlindungan pelapor dalam whistleblowing system baik, didukung dengan rekomendasi pada Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Tata Kelola Saluran Pengaduan WBS Tahun 2022 yang dirasa perlu menyusun PMK yang melengkapi aturan sebelumnya seperti integrasi saluran pengaduan dan perlindungan pelapor. Selain itu, pada hasil assessment KPK terhadap pengelolaan WBS di Kemenkeu sesuai surat nomor B/1588/PM.00.00/30-35/03/2021 juga merekomendasikan bahwa pembuatan ketentuan yang mengatur perlindungan pelapor diperlukan.</p> <p>Kebijakan ini bertujuan memberikan rasa aman kepada setiap pelapor terhadap pelaporan pelanggaran yang disampaikannya dan mendorong peran serta baik masyarakat umum maupun pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran disiplin kode etik di lingkungan Kemenkeu. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.09/2022 dengan peraturan sebelumnya antara lain: Simplifikasi peraturan dan ketentuan pelaksanaan atas tata cara pelaporan dan pengelolaan pelaporan pelanggaran, Perlindungan Pelapor, Hak dan Kewajiban bagi Pelapor dan Pengelola, Pola hubungan dan koordinasi antar pengelola dan pihak lain; dan Integrasi data pengaduan.</p>
---	---

### III. Pengawasan Kebijakan Fiskal

Pengawasan atas kebijakan fiskal yang dilakukan dilakukan Itjen tahun 2022 diantaranya meliputi kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Keterangan
a.	Pengawasan atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal	<p>Berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPK atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Nomor 50.d/LHP/XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, diketahui Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal. Namun, masih terdapat 10 kriteria yang masih bernilai basic yaitu Pilar 2 Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, Pilar 3 Analisis &amp; Manajemen Risiko Fiskal &amp; Pilar 4 Manajemen Pendapatan Sumber Daya.</p> <p>Atas hal tersebut, Tim Itjen merekomendasikan kepada Pimpinan Badan Kebijakan Fiskal untuk mengoordinir para PIC di seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan untuk memfokuskan perbaikan pada 10 (sepuluh) kriteria yang masih bernilai basic yaitu pada Pilar 2 Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, Pilar 3 Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal dan Pilar 4 Manajemen Pendapatan Sumber Daya, termasuk mengoptimalkan pelaksanaan SOP Link Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Auditor Eksternal dan sinergi Bersama.</p>
b.	Monitoring Persiapan & Penyelegaraan Pertemuan Finance Track Presidensi G20	<p>Sebagai bentuk kontribusi dan dukungan penyelenggaran pertemuan Finance Track Presidensi G20, Tim Itjen telah melaksanakan monitoring atas persiapan dan penyelenggaraan event tersebut dengan hasil monitoring sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana semula Pertemuan Finance Track Presidensi G20 terdiri dari 27 meeting dengan pembagian: 13 events dilaksanakan oleh Kemenkeu, dan 14 events dilaksanakan oleh BI.</li> <li>2. Pertemuan yang dibayai oleh Kementerian Keuangan sebagai host Finance Track Presidensi G20 yaitu sebanyak 42 event yang terdiri dari 19 main event, 21 side event, dan 2 kegiatan supporting/publikasi. Dengan demikian terdapat penambahan event yang disebabkan kondisi pandemi covid-19 yang berangsurn membaik di tahun 2022, dan meningkatnya permintaan agenda dari delegasi dan organisasi internasional yang cukup tinggi kepada Presiden Indonesia.</li> <li>3. Event FT s.d. November 2022 terdiri dari: pertemuan setingkat Menteri (Finance Ministers and Central Bank Governors), pertemuan setingkat Deputi (Finance and Central Bank Deputies), pertemuan setingkat Working Groups, Join Meetings (Kemenkes, Kementan, Sherpa), dan side event lainnya yg dilaksanaan secara offline, online, atau hybrid.</li> <li>4. Penyerapan anggaran G20 Kemenkeu s.d bulan November adalah Rp61,5 miliar dari total pagu Rp72,5 miliar atau sebesar 84,82%. Tiga pos anggaran dengan realisasi terbesar secara berturut-turut adalah Layanan Acara (Rp22,5 miliar), IT AV (Rp11 miliar) dan transportasi (Rp4,4 miliar).</li> <li>5. Berdasarkan hasil survei, delegasi sangat mengapresiasi layanan yg sangat baik oleh Kementerian Keuangan (skor 8,69 dari skala 10), khususnya layanan airport hospitality dan liaison officer.</li> </ol>

c.	Pengawasan atas TKDD	<p>Pada tahun 2022, salah satu pengawasan yang dilaksanakan yaitu terkait penyusunan regulasi turunan UU HKPD, adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergi dan Kolaborasi dalam Penyusunan RPP Turunan UU HKPD, melalui Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Dirjen PK Nomor ND-172/IJ/2022 tanggal 16 Juni 2022.</li> <li>2. Penyampaian Masukan dalam Penyusunan Regulasi terkait Transfer ke Daerah Turunan UU HKPD, melalui Nota Dinas Inspektur V kepada Direktur DTU dan Direktur DTK DJPK Nomor ND-871/IJ.6/2022 tanggal 25 November 2022 dan ND-901/IJ.6/2022 tanggal 12 Desember 2022.</li> <li>3. Rapat pembahasan peraturan turunan UU HKPD diantaranya RPP KUP-DRD, RPP DBH Sawit, RPP TKD, RPMK DAU Indikator Kinerja, RPMK DAK Non Fisik, RPMK Omnibus Law, RPMK Pengelolaan Dana Desa.</li> <li>4. Klausul "Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Inspektorat Jenderal sebagai bahan masukan dalam melakukan pengawasan atas kegiatan Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD" telah diakomodasi pada Pasal 45 ayat (6) RPMK tentang Penge- lolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.</li> </ol> <p>Selain itu Tim Itjen juga memberikan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan regulasi turunan UU HKPD pada setiap tingkat hierar-ki Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan keselarasan dan perlu diharmonisasikan dengan regulasi khusus yang berlaku.</li> <li>2. Penyusunan regulasi turunan UU HKPD tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh unit teknis terkait, antara lain unit teknis yang menjalankan tugas dan fungsi penyusunan kebijakan di bidang perencanaan, pen- ganggaran, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.</li> <li>3. Perumusan ketentuan dan pelaksanaan pengawasan perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam PMK Nomor 18/PMK.09/2022.</li> <li>4. Klausul mengenai penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri Keuangan c.q Inspektorat Jenderal perlu diimplementasikan pada setiap perumusan PMK untuk setiap jenis Transfer ke Daerah turunan UU HKPD untuk keselarasan regulasi.</li> </ol>
----	----------------------	---

#### IV. Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara

Sebagai APIP Kemenkeu, Itjen juga turut serta berperan dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara. Sebagai bentuk pengawalan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara, di tahun 2022 Itjen telah melakukan pengawasan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, dan PNBP. Pengawasan tersebut di antaranya meliputi Pengawasan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Keterangan
a.	Pengawasan atas Pembaruan Sistem Administrasi Perpaja-kan (PSAP)	<p>Berdasarkan pengawasan atas Pembaruan Sistem Administrasi Perpaja-kan (PSAP) di tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan dan isu yang menjadi temuan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviu rekomposisi kontrak tahun jamak: Rekomposisi kontrak tahun jamak (MYC) disetujui Menkeu.</li> <li>2. Reviu change proposal: Ketentuan pembayaran tetap didorong untuk dilaksanakan sesuai kontrak.</li> <li>3. Pemantauan pengadaan hardware &amp; Data Center: Seluruh risiko pengadaan dan pelaksanaan kontrak telah dimitigasi dengan pengendalian yang memadai</li> <li>4. Terkait dengan Audit TI atas migrasi data ditemukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hadoop Besar End of Support (EoS) pada Desember 2020 dan tidak akan diperpanjang ekstensi support-nya setelah 31 Desember 2022</li> <li>b. Database transisi tidak dilakukan backup</li> <li>c. Pengendalian akses fisik ke ruang kerja vendor di Gedung Marie Muhammad Lantai 24 kurang memadai</li> <li>d. Pengamanan perangkat yang dapat mengakses database transisi kurang memadai</li> <li>e. Matriks akses pengguna database transisi tidak disusun</li> <li>f. Reviu terhadap log akses dan aktivitas pada database transisi tidak dilakukan secara berkala</li> </ul> </li> <li>5. Pengawasan atas tata kelola pelaksanaan kontrak PSIAP 2022 terdapat beberapa temuan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan sub-deliverable syste development completion and unit testing report perlu memperhatikan defect hasil functional unit testing yang belum diperbaiki</li> <li>b. Perubahan project planning terkait jadwal pekerjaan tahap build dan support perlu dipastikan didukung dengan pertimbangan yang memadai</li> <li>c. Kustomisasi COTS perlu memperhatikan batasan pada spesifikasi teknis/KAK</li> </ul> </li> </ol> <p>Atas permasalahan di atas, untuk kedepannya diharapkan sinergi pengawasan lintas Inspektorat atas implementasi PSAP, yang difokuskan pada pelaksanaan kontrak dan pemenuhan business readiness assessment (BRA).</p>

<p>b. Pengawasan atas kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan</p>	<p>Berdasarkan atas kegiatan pengawasan atas kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, terdapat beberapa isu yang menjadi temuan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelaahan usul pemeriksaan bukti permulaan kurang memadai sehingga hasil penelaahan usulan pemeriksaan bukti permulaan kurang dapat diandalkan</li> <li>2. Pelaksanaan prosedur formal pemeriksaan bukti permulaan belum sepenuhnya sesuai sehingga terdapat risiko DJP kalah saat praperadilan.</li> <li>3. Pengujian dalam rangka perhitungan KPPN kurang memadai sehingga nilai KPPN tidak dapat diyakini.</li> <li>4. Penggalian Informasi Bahan Bukti/Keterangan Kurang Memadai sehingga pihak yang terlibat dalam TPP tidak diproses secara hukum; indikasi TPP dan/atau potensi pajak lain yang tidak ditindaklanjuti dengan pengawasan/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau simpulan yang diambil (termasuk perhitungan KPPN) tidak dapat diyakini telah sesuai ketentuan.</li> <li>5. Pelaksanaan penghentian penyidikan (44A) belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga terdapat risiko KPPN tidak terpulihkan.</li> </ol> <p>Atas permasalahan tersebut, Itjen memberikan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyempurnaan tata kelola penelaahan.</li> <li>2. Melakukan penyempurnaan petunjuk teknis pemeriksaan bukti permulaan sehingga terwujud tertib administrasi pelaksanaan kegiatan bukperdik .</li> <li>3. Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan prosedur teknis berupa langkah-langkah pengujian yang harus dilakukan pemeriksa bukti permulaan untuk memperoleh nilai KPPN.</li> </ol>	<p>c. Pengawasan atas Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis data/informasi terkait konsultan pajak dan kuasa wajib pajak, dalam pelaksanaan pengawasan atas konsultan pajak dan kuasa wajib pajak terdapat beberapa kegiatan dan isu yang menjadi temuan dan perlu mendapat perhatian yaitu: Belum ada payung hukum sebagai landasan tata kelola Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak, dan Substansi regulasi yang mengatur tentang pengawasan dan pemberian sanksi bagi Konsultan Pajak perlu dievaluasi hal ini disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Selama periode 2016 s.d. 2022 tidak tercatat adanya pengenaan sanksi karena adanya ketidakpatuhan terhadap kode etik/standar profesi/ peraturan dan/atau adanya tindak pidana perpjakan, walaupun selama periode itu banyak kasus-kasus perpjakan yang terkait dengan Konsultan Pajak</li> <li>b. Sanksi yang diberikan kepada konsultan pajak lebih bersifat administratif (teguran, pembekuan, atau pencabutan), walaupun sesuai Pasal 43 UU KUP dimungkinkan adanya sanksi berupa pidana kurungan/ penjara dan denda Untuk itu Inspektorat I merekomendasikan perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi Konsultan Pajak eksisting ,yang substansinya antara lain mencakup: 1) Ruang lingkup, fungsi, dan kewenangan Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak, serta lembaga/ institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan; 2)Kualifikasi, persyaratan, dan/atau kompetensi yang harus dimiliki oleh Konsultan Pajak &amp; Kuasa WP; 3) Standar, kode etik, dan mekanisme pengawasan yang memadai atas setiap pelaksanaan tugas Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak;</li> </ol> <p>Atas temuan belum adanya payung hukum sebagai landasan tata kelola Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.01/2022 tentang Konsultan Pajak. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan menjadi landasan dalam tata kelola konsultan pajak.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Itjen merekomendasikan bahwa perlu dilakukan penyesuaian regulasi Konsultan Pajak eksisting, yang substansinya antara lain: a) Ruang lingkup, fungsi, dan kewenangan Konsultan Pajak dan Kuasa WP, serta lembaga/institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan; b) Kualifikasi, persyaratan, dan/atau kompetensi yang harus dimiliki oleh Konsultan Pajak dan Kuasa WP; c) Standar, kode etik, dan mekanisme pengawasan yang memadai atas setiap tugas Konsultan Pajak dan Kuasa WP.</p>
---	--	---	--

<p>d. Perizinan Bongkar dan Timbun di Luar Kawasan Pabean</p> <p>Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pengawasan atas pelayanan perizinan pembongkaran dan/atau penimbunan di luar kawasan pabean pada KPPBC TMP B Balikpapan dan KPPBC TMP Merak. Pengawasan dilakukan atas pelaksanaan pelayanan dan pemberian izin, penelitian lapangan, pengawasan/pemeriksaan fisik barang, serta pemantauan saldo barang impor yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai DJBC atas kegiatan Pembongkaran dan/atau Penimbunan di Luar Kawasan Pabean.</p> <p>Berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa masih terdapat kelemahan yang ditemukan yaitu kegiatan pelayanan dan pengawasan izin pembongkaran serta barang yang ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS belum didukung aplikasi yang memadai, dan pengaturan ketentuan pelayanan perizinan dan pengawasan pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan pabean belum optimal.</p> <p>Salah satunya adalah pejabat/pegawai DJBC tidak harus melakukan pengawasan atas pembongkaran karena interpretasi kata dalam ketentuan.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Itjen merekomendasikan untuk melakukan percepatan pengembangan aplikasi dengan fitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengajuan permohonan perizinan pembongkaran di luar kawasan pabean oleh pengangkut,</li> <li>2. perekaman SKP terkait laporan hasil penelitian lapangan beserta foto dan/atau denah tempat Pembongkaran oleh Pejabat BC serta laporan hasil pengawasan pembongkaran (BCL 1.2) oleh Pejabat BC,</li> <li>3. pengajuan permohonan penimbunan oleh importir dan perizinan penimbunan oleh importir,</li> <li>4. perekaman SKP terkait laporan hasil penelitian lapangan beserta foto dan/atau denah tempat penimbunan oleh Pejabat BC serta laporan hasil pengawasan penimbunan (BCL 1.2) oleh Pejabat BC, dan</li> <li>5. pengajuan daftar timbun oleh importir dan dashboard realtime atas saldo barang impor yang ditimbun yang belum diselesaikan dan pengendalian atas masa penimbunan 30 hari sejak terbitnya surat izin penimbunan.</li> </ol>	<p>e. Audit atas Kegiatan Pengawasan dan Pelayanan Ekspor dan Impor Barang untuk Dipakai dengan Menggunakan Data Analytics</p> <p>Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit atas Kegiatan Pengawasan dan Pelayanan Ekspor dan Impor Barang untuk Dipakai dengan Menggunakan Data Analytics pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022. Audit menghasilkan simpulan meliputi: 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) belum terekonsiliasi dengan Outward Manifest, 2) Eksportir tidak menyelesaikan proses kepabeanan ekspor atas PEB yang ditetapkan dilakukan pemeriksaan fisik, 3) Importasi dengan jenis barang yang sama dengan Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) namun ditetapkan dengan kode HS dan tarif Bea Masuk yang berbeda, 4) Penelitian dokumen oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen melebihi 30 hari, 5) Tidak dilakukan prosedur tambahan atas keterlambatan penyampaian Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB), 6) Pengendalian dalam proses penunjukan pejabat fungsional pemeriksa dokumen pada CEISA Impor belum memadai, serta 7) Kelemahan pengendalian CEISA Impor dalam status penjaluran yang menerbitkan respon surat pemberitahuan jalur merah atas PIB dengan status jalur hijau.</p> <p>Atas simpulan tersebut, Itjen menyampaikan rekomendasi: a) Mengembangkan pengendalian pada CEISA Outward Manifest, b) Menambahkan menu pada CEISA Ekspor berupa menu monitoring 48 atas PEB yang belum terekonsiliasi dengan outward manifest; c) Menambah menu pada CEISA Outward Manifest berupa menu monitoring kewajiban dan ketepatan waktu penyampaian outward manifest oleh pengangkut; d) Menyusun mekanisme konfirmasi status rekonsiliasi kepada eksportir/PPJK, konsolidator, dan pengangkut; menyejajarkan pengendalian berupa penolakan bila pengajuan PEB datanya sama; e) Melakukan pengembangan CEISA dengan mengakomodasi poses bisnis penelitian ulang dan pendistribusian akses hasil penelitian ulang ke Kantor Pelayanan; f) Menginstruksikan Kanwil menyampaikan NHPU ke Kantor Pelayanan sebagai bahan referensi penelitian dokumen sampai CEISA 4.0 telah mengakomodasi proses bisnis tersebut; g) Melakukan pengembangan CEISA agar Kepala Kantor dan Seksi KI mendapatkan akses monitoring atas penyelesaian penelitian dokumen PIB; menambahkan flag dan catatan tentang alasan dilakukan penelitian ulang terhadap PIB yang sudah melebihi 30 hari; h) Mengatur pengenaan sanksi layanan atas keterlambatan penyampaian PKB; mengatur proses redistribusi dokumen kepada PPFD/Pemeriksa Dokumen; penambahan fitur pengendalian atas perekaman Absensi Pegawai Harian, log/audit trail aktivasi dan/atau deaktivasi Pemeriksa Dokumen pada CEISA 4.0; serta i) Meneliti permasalahan CEISA Impor yang menerbitkan respon SPJM atas dokumen PIB dengan status jalur hijau.</p>
---	---

f.	Audit Kinerja Pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada DJA	<p>Dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Tahunan Pengawasan Intern (PTPI) Inspektorat Jenderal Tahun 2022 terkait Area Pengawasan Utama Audit Kinerja Pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada DJA, Itjen dhi. Inspektorat V telah melakukan: 1) Penyusunan RCM dan evaluasi SPI atas pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada DJA, 2) Perumusan kriteria penilaian efektivitas pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada DJA, 3) Pelaksanaan Audit Rinci dan Penyusunan Policy Recommendation.</p> <p>Berdasarkan hasil penyusunan RCM dan evaluasi SPI atas pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada DJA dapat dikemukakan hal-hal yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil identifikasi risiko yang dituangkan dalam RCM yakni:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Probis Perencanaan; Terdapat 13 risiko yang teridentifikasi dengan rincian level risiko: 3 risiko sangat tinggi, 4 risiko tinggi, 4 risiko sedang, dan 2 risiko rendah.</li> <li>b. Probis Pelaksanaan; Terdapat 27 risiko yang teridentifikasi dengan rincian level risiko: 3 risiko sangat tinggi, 10 risiko tinggi, 10 risiko sedang, dan 4 risiko rendah.</li> <li>c. Probis Pertanggungjawaban/Pelaporan; Terdapat 6 risiko dengan rincian level risiko: 4 risiko tinggi dan 2 risiko sedang.</li> <li>d. Probis Pengawasan; Terdapat 11 risiko yang teridentifikasi dengan rincian level risiko: 1 risiko sangat tinggi, 6 risiko tinggi, dan 4 risiko sedang.</li> </ol> </li> <li>2. Pengendalian utama pada tingkat entitas dan aktivitas atas pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada DJA telah dilaksanakan secara memadai. Evaluasi SPI pada tingkat entitas menggunakan hasil Laporan Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) Tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi (KIMRA) DJA. EPITE DJA Tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 98,00% atau keandalan pengendalian intern tingkat entitas termasuk dalam kategori tinggi. Nilai EPITE DJA Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan nilai EPITE DJA Tahun 2019 yang mendapatkan nilai sebesar 90,00%. Namun demikian, masih terdapat unsur pengendalian yang perlu perbaikan secara berkelanjutan sehingga terwujud pengendalian intern tingkat entitas yang ideal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Unsur pengendalian yang perlu perbaikan yaitu kesesuaian jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja dengan analisis beban kerja.</li> </ol>
----	--	---

No.	Kegiatan	Keterangan
a.	Pengawasan atas Transfer ke Daerah	<p>Pada tahun 2022, Itjen telah melakukan pengawasan terhadap Dana Desa pada 5 Kab. Di Jabar dan 2 Kab. Di Jateng, adapun hasil pengawasan Itjen adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa, yaitu berupa pembangunan balai desa/kantor desa dengan Dana Desa sebesar Rp7,02 M pada 44 desa di 4 kabupaten yang dalam aturan tidak diperbolehkan;</li> <li>2. Penyaluran BLT Desa kepada orang/keluarga yang sama lebih dari satu kali dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial lainnya sebanyak 7.231 KPM (uji petik pada 5 kabupaten di Jawa Barat);</li> <li>3. Penggunaan Dana Desa TA 2021 (uji petik pada 6 desa) yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp3,99 M (30,62% dari total Rp13,03 M); dan</li> <li>4. Pelaporan realisasi Dana Desa kepada KPPN sebagai syarat salur Dana Desa tahun berikutnya, yang tidak sesuai dengan realisasi output di lapangan</li> </ol> <p>Atas permasalahan tersebut, Itjen telah merekomendasikan kepada pemda terkait untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menetapkan regulasi/SOP dalam proses verifikasi dan validasi data keluarga miskin KPM BLT;</li> <li>2. Melakukan pembinaan kepada perangkat desa untuk peningkatan kompetensi dan pemahaman atas pengelolaan aset dan keuangan desa; dan</li> <li>3. Melakukan monev terhadap kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan dokumen pendukungnya serta realisasi faktual penggunaan Dana Desa.</li> </ol>

## V. Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara

Sebagai bentuk pengawalan atas pelaksanaan belanja negara, pada tahun 2022 Itjen telah melakukan pengawasan diantaranya:

<p>b. Pengawasan atas Belanja Subsidi Energi Listrik</p> <p>Atas hasil pengawasan atas belanja subsidi energi listrik masih terdapat permasalahan dalam penyaluran subsidi listrik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran subsidi listrik belum sepenuhnya tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, Indikasinya adalah kondisi fisik rumah tinggal pelanggan subsidi listrik tampak memenuhi kriteria rumah tangga mampu (di antaranya terlihat dari lantai keramik, bahan dinding, dan bentuk/besar rumah), berdasarkan hasil sampling melalui on site ke pelanggan ditemukan 10 pelanggan dari 30 pelanggan (33%) pada PLN UID Jawa timur dan 30 pelanggan dari 80 pelanggan (37.5%) pada PLN UID Bali.</li> <li>2. Penyaluran subsidi listrik belum sepenuhnya sesuai (In-line) dengan DTKS, setidaknya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 21.516 data DTKS merupakan pelanggan rumah tangga mampu 900 VA RTM dan 1300 VA atau lebih pada PLN UID Jawa Timur</li> <li>b. 102 data DTKS merupakan pelanggan rumah tangga mampu 900 VA RTM atau lebih pada PLN UID Bali</li> <li>c. 52.657 data DTKS namun statusnya belum berlistrik/menyalur pada PLN UID Jawa Timur dan 1.295 data DTKS namun statusnya belum berlistrik/menyalur pada PLN UID Bali</li> <li>d. 162 pelanggan yang berstatus rumah merupakan Rumah Dinas atau Sewa/Kontrak pada PLN UID Bali</li> </ol> </li> </ol> <p>Hal lain yang perlu menjadi perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dilakukannya pencocokan/pemadanan data atas DTKS yang ter-update</li> <li>2. Implementasi dan verifikasi data pelanggan subsidi rumah tangga daya 450 VA dengan fitur foto kondisi rumah, belum dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan</li> </ol> <p>Direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait (Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, dan PT PLN) mengenai tata kelola dan mekanisme penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dikaitkan dengan DTKS, serta tetap melakukan validasi dan verifikasi lapangan yang meluas dan cermat terkait kondisi pelanggan di lapangan.</p>	<p>c. Pengawasan Belanja Subsidi Non Energi-Pupuk</p> <p>Atas pengawasan belanja subsidi non energi-pupuk pada Kementerian Pertanian Tim Itjen menemukan beberapa permasalahan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil data analytics atas data aplikasi e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), masih ditemukan anomali data yang diambil dari 17.229.131 petani (atas 25,58 juta ton kebutuhan pupuk), berupa ketidakwajaran usia petani sebanyak 422.684 petani (2,45%); kode daerah NIK terindikasi tidak valid sebanyak 45.154 petani (0,26%); kode bulan dan tanggal lahir NIK terindikasi tidak valid sebanyak 2.771 petani (0,02%); serta kepemilikan lahan di atas 2 hektar sebanyak 9.017 petani (0,05%).</li> <li>2. Ekosistem aplikasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kementerian Pertanian belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik pada aplikasi PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC) dan aplikasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha terkait.</li> <li>3. Masih terdapat kelemahan pengendalian dalam aplikasi e-RDKK yang berpotensi terjadinya penggunaan data lahan yang sama oleh pemilik/penyewa/petani penggarap lahan dan risiko pemecahan data lahan dengan luas lebih dari dua hektar.</li> </ol> <p>Kepada Kementerian Pertanian Tim Itjen merekomendasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan clearance data aplikasi e-RDKK secara berkesinambungan;</li> <li>2. Mengintegrasikan sistem pengendalian pupuk bersubsidi dengan sistem lainnya, terutama interkoneksi kepada sistem perbankan dan data pertanahan nasional; dan</li> <li>3. Memperkuat pengendalian aplikasi pada e-RDKK, dengan menggunakan data Kartu Keluarga dan identitas tanah.</li> </ol>									
<p>VI. Pengawasan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Reviu PIPK dan LK BUN</td> <td>Atas kegiatan reviu PIPK dan LK BUN tahun 2022, dilakukan kegiatan yakni: 1) Reviu PIPK dan LKBUN TA 2021 dan Semester I TA 2022 (LKBUN dan LKPP 2021 memperoleh opini WTP), 2) Melakukan telaah LKBUN Triwulan III dalam rangka mengidentifikasi risiko atas LK 2022, 3) Pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, LKBUN, dan LHP Kinerja/DTT, dan 4) Penelaahan atas RCM PIPK BUN 2022.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Atas hasil pengawasan pada kegiatan tersebut, Tim Itjen merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: a) Penyajian dan pengungkapan informasi secara lengkap dan sistematis pada LKBUN tahun 2022, termasuk terkait program PC-PEN, b) Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LK BUN lama atau lintas K/L maupun LKPP, c) Masukan akun signifikan dan pengendalian pelaporan keuangan BUN yang diharapkan dapat mendukung penyelesaian rekomendasi BPK.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Keterangan	a.	Reviu PIPK dan LK BUN	Atas kegiatan reviu PIPK dan LK BUN tahun 2022, dilakukan kegiatan yakni: 1) Reviu PIPK dan LKBUN TA 2021 dan Semester I TA 2022 (LKBUN dan LKPP 2021 memperoleh opini WTP), 2) Melakukan telaah LKBUN Triwulan III dalam rangka mengidentifikasi risiko atas LK 2022, 3) Pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, LKBUN, dan LHP Kinerja/DTT, dan 4) Penelaahan atas RCM PIPK BUN 2022.			Atas hasil pengawasan pada kegiatan tersebut, Tim Itjen merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: a) Penyajian dan pengungkapan informasi secara lengkap dan sistematis pada LKBUN tahun 2022, termasuk terkait program PC-PEN, b) Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LK BUN lama atau lintas K/L maupun LKPP, c) Masukan akun signifikan dan pengendalian pelaporan keuangan BUN yang diharapkan dapat mendukung penyelesaian rekomendasi BPK.	
No.	Kegiatan	Keterangan								
a.	Reviu PIPK dan LK BUN	Atas kegiatan reviu PIPK dan LK BUN tahun 2022, dilakukan kegiatan yakni: 1) Reviu PIPK dan LKBUN TA 2021 dan Semester I TA 2022 (LKBUN dan LKPP 2021 memperoleh opini WTP), 2) Melakukan telaah LKBUN Triwulan III dalam rangka mengidentifikasi risiko atas LK 2022, 3) Pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, LKBUN, dan LHP Kinerja/DTT, dan 4) Penelaahan atas RCM PIPK BUN 2022.								
		Atas hasil pengawasan pada kegiatan tersebut, Tim Itjen merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: a) Penyajian dan pengungkapan informasi secara lengkap dan sistematis pada LKBUN tahun 2022, termasuk terkait program PC-PEN, b) Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LK BUN lama atau lintas K/L maupun LKPP, c) Masukan akun signifikan dan pengendalian pelaporan keuangan BUN yang diharapkan dapat mendukung penyelesaian rekomendasi BPK.								

b. Penjaminan BUMN	<p>Pada tahun 2022, tim Itjen melakukan Monev atas Pinjaman dan/atau Obligasi serta Sukuk yang mendapat dukungan Penjaminan Pemerintah dan on site visit pada 16 Proyek PT Waskita Karya yang diterminasi oleh Pemilik Proyek pada tahun 2021. Hasil Monev atas Penjaminan Pinjaman dan Obligasi/Sukuk PT Waskita Karya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Waskita Karya selaku kontraktor berpotensi tidak Dapat Mendapatkan Penerimaan Senilai Rp7,2T dari PT Waskita Sriwijaya Tol (Owner) atas Penyelesaian 7 Proyek Underlying Obligasi yang Dijamin Pemerintah</li> <li>2. Dari target 31 Proyek, progress penyelesaian proyek s.d Oktober 2022 mencapai 41,94% (13 Proyek), namun 18 proyek (58,06%) belum selesai</li> <li>3. Realisasi penarikan pinjaman atas kredit yang mendapat penjaminan belum sesuai rencana sehingga terdapat potensi inefisiensi penggunaan pinjaman</li> <li>4. Terdapat potensi pendapatan Rp1,8 Triliun (piutang usaha/tagihan bruto) yang belum dapat direalisasikan oleh Pemilik Proyek</li> <li>5. Terdapat Inkonsistensi Pencatatan Terhadap Nilai Pengakuan Piutang dan Potensi Penerimaan atas 16 Proyek yang Diterminasi</li> <li>6. Financial Model Belum menyesuaikan kondisi Ter-update</li> </ol>
--------------------	---

c. Sertifikasi BMN Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres capaian sertifikasi BMN Tanah tahun 2022 per tanggal 6 Desember 2022 adalah sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian target nominatif sertifikasi BMN tanah mencapai 98,41% atau sejumlah 23.359 dari target 23.737 bidang tanah.</li> <li>b. Penyelesaian target tanah Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) mencapai 105,91% atau sejumlah 9.425 dari target 8.899 bidang tanah.</li> <li>c. Terdapat 19 K/L dengan capaian masih di bawah 80% dan 8 KL dengan capaian di atas 80% dari total 54 K/L.</li> <li>d. KemenPUPR merupakan K/L dengan target terbanyak yaitu sebesar 20.387 bidang tanah dengan capaian penyelesaian sebesar 104,4% atau sebanyak 21.289 bidang tanah.</li> </ol> </li> <li>2. Progres capaian sertifikasi BMN Tanah tahun 2022 per tanggal 6 Desember 2022 adalah sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyelesaian target nominatif sertifikasi BMN tanah mencapai 98,41% atau sejumlah 23.359 dari target 23.737 bidang tanah.</li> <li>b) Penyelesaian target tanah Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) mencapai 105,91% atau sejumlah 9.425 dari target 8.899 bidang tanah.</li> <li>c) Terdapat 19 K/L dengan capaian masih di bawah 80% dan 8 KL dengan capaian di atas 80% dari total 54 K/L.</li> <li>d) KemenPUPR merupakan K/L dengan target terbanyak yaitu sebesar 20.387 bidang tanah dengan capaian penyelesaian sebesar 104,4% atau sebanyak 21.289 bidang tanah.</li> </ol> </li> <li>3. Kendala/Permasalahan K/L dalam Pelaksanaan Sertifikasi BMN tanah meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satker belum mengajukan permohonan pensertifikatan ke Kantor Pertanahan</li> <li>b. Satker belum melengkapi kekurangan dokumen yang dibutuhkan (antara lain: alas hak, surat penguasaan fisik, akta pelepasan hak)</li> <li>c. K/L belum/kurang menyediakan anggaran untuk kebutuhan pendampingan sertifikasi BMN tanah</li> <li>d. Jumlah SDM pada satker kurang</li> <li>e. Satker belum memasang patok Atas kendala/permasalahan tersebut DJKN secara periodik melakukan rapat koordinasi dengan K/L dan BPN</li> </ol> </li> </ol>

d. Monev Creative Financing & Pembiayaan IKN

1. Telah dilakukan monev pemberian fasilitas dukungan pemerintah atas proyek KPBU pada Dit.PDPPI, DJPPR.
2. Pelaksanaan on-site visit pemberian dukungan pemerintah dengan sample proyek KPBU Jalintim Riau dan SPAM Pekanbaru.
3. Telah dilakukan pemantauan penyusunan PMK Kekhususan KPBU IKN

Isu strategis :

1. Pemberian dukungan pemerintah
  - a. Perlu guidance untuk mengurangi asimetrik informasi antara pengusul proyek dengan pemberi fasilitas untuk menjaga akuntabilitas dan fairness fasilitas yang diberikan.
  - b. perlu disusun rumusan perhitungan penentuan biaya hasil keluaran yang baku
2. Karakteristik proyek KPBU sangat beragam dengan multi stakeholders. Komunikasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan merupakan salah satu aspek kritis agar pelaksanaan kegiatan proyek dapat berjalan secara paralel sesuai dengan lini masa yang telah direncanakan.
3. Tata kelola pemberian fasilitas pada proyek KPBU khusus IKN melalui pengawalan RPMK.

Next step :

1. Koordinasi dengan Dit. PDPPI terkait pengendalian risiko pemberian dukungan pemerintah.
2. Analisa risiko proyek KPBU yang didukung pemerintah per jenis proyek dan per sektor.
3. Audit kinerja terkait pengelolaan pemberian dukungan pemerintah pada proyek KPBU.
4. Monitoring atas progres penyusunan kerangka regulasi mekanisme khusus KPBU IKN.

## VII. Pengawasan Dukungan Manajemen

No.	Kegiatan	Keterangan
a.	Pengawasan PUG	
1.	Telah ditetapkan Pedoman Pengawasan PUG dalam Peraturan Inspektor Jenderal nomor PER-8/IJ/2022	
2.	Reviu Gender Budget Statement Kementerian Keuangan TA 2023: a) Analisis situasi belum menggambarkan secara jelas mengenai persoalan kesenjangan gender, b) Rencana aksi masih perlu dilakukan penajaman untuk dapat menjawab isu gender, c) Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan GBS (tidak dilakukan pada saat penyusunan Renja, tetapi pada saat penyusunan RKA Pagu Anggaran dan/atau Pagu Alokasi Anggaran)	
3.	Hasil pemantauan implementasi PUG, antara lain: a) Terdapat beberapa Satker yang belum menyediakan sarana dan prasarana responsif gender seperti ruang ramah anak, ruang tunggu dan loket layanan prioritas, b) Terdapat prasyarat PUG berdasarkan KMK Nomor 807/KMK.01/2018 yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain kebijakan yang responsif gender, data terpilih, alat analisis, dan partisipasi masyarakat, c) Terdapat kegiatan responsif gender yang dilaksanakan satker namun belum disusun GBS dan dilakukan tagging dalam penganggarannya antara lain yaitu implementasi pencegahan dan dukungan penanganan pelecehan seksual.	
4.	Itjen Kemenkeu telah melaksanakan sharing knowledge terkait PUG antara lain kepada Kementerian PPA, BPPK Kemenkeu, Inspektorat KLHK, Inspektorat Kota Bandar Lampung.	

### Rekomendasi

1. Reviu Gender Budget Statement Kementerian Keuangan TA 2023: a) Peningkatan pemahaman pejabat/pegawai dalam melakukan analisis isu kesenjangan gender berdasarkan Gender Analysis Pathway (GAP), peran Kelompok Kerja/Tim PUG di Unit Eselon I, b) Penajaman rencana aksi dalam dokumen GBS, c) Peningkatan ketepatan waktu penyusunan dokumen GBS
2. Rekomendasi Perbaikan Implementasi PUG di Lingkungan Kemenkeu TA 2022: a) Penyediaan sarana dan prasarana responsif gender yang disesuaikan dengan prioritas Satker, b) Pelaksanaan upaya pemenuhan Tujuh Prasyarat PUG, c) Pengembangan kegiatan responsif gender sesuai dengan bidang kerja masing-masing Satker.

b. Koordinasi & Pembinaan Tugas dan Fungsi UKI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas Pengendalian Intern Unit Eselon I Tahun 2021:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 10 UEI yaitu Setjen, DJA, DJBC, DJPb, DJPK, DJPPR, BKF, BPPK, Itjen, dan LNSW, mendapatkan simpulan efektif (tidak ada kelemahan signifikan dan kelemahan material).</li> <li>b. 2 UEI yaitu DJP dan DJKN, mendapatkan simpulan efektif dengan pengecualian (terdapat satu atau lebih kelemahan signifikan namun apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material)</li> </ol> </li> <li>2. Hasil perkembangan penguatan UKI: Tahun 2021 UKI UE-I telah menyusun FRS untuk 99 proses bisnis yang dinilai berpotensi terjadi fraud.</li> <li>3. Pelaksanaan Rakor UKI secara triwulan dan Rakorwil UKI di Lampung</li> <li>4. Pemetaan Tugas dan Fungsi UKI berbasis risiko</li> <li>5. Pengembangan aplikasi PRO UKI untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UKI terkait pemantauan pengendalian intern.</li> </ol> <p>Rekomendasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan ketentuan yang mengatur secara universal terkait manajemen risiko dan pemantauan pengendalian intern untuk mendukung integrasi antar keduanya. Ketentuan tersebut dapat berupa omnibus peraturan manajemen risiko dan pemantauan pengendalian intern.</li> <li>2. Kegiatan pemetaan tugas dan fungsi UKI perlu koordinasi yang lebih kuat baik dengan UKI maupun pihak lain yang berkepentingan.</li> </ol>	d. Penguatan Tata Kelola Pengawasan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Itjen telah melakukan kajian terkait dengan penguatan tata kelola Komwasjak untuk mewujudkan eksosistem pengawasan perpajakan yang terintegrasi</li> <li>2. Kajian tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan pengaturan pada Rancangan PMK (RPMK) Komwasjak</li> <li>3. Dalam proses penyusunan RPMK, Itjen berkoordinasi dengan UE 1 terkait, yaitu BKF, DJP, DJBC, dan Setjen</li> <li>4. Substansi Penguatan Tata Kelola Komwasjak dalam RPMK meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Komwasjak sebagai alat Menteri Keuangan (Menteri) untuk menjalankan peran pengawasan pada level strategis;</li> <li>b. Tata kerja yang mengatur pola hubungan Komwasjak dengan Unit Eselon I terkait terkait penanganan pengaduan perpajakan maupun aparatur Kementerian Keuangan;</li> <li>c. penetapan dan penunjukan, komposisi, serta mekanisme seleksi anggota Komwasjak;</li> <li>d. kode etik anggota Komwasjak yang berisi kewajiban serta larangan;</li> <li>e. penetapan target kinerja anggota Komwasjak dan evaluasi kinerja Komwasjak oleh Menteri;</li> <li>f. kewajiban pelaporan kepada Menteri</li> </ol> </li> </ol>
c. Penguatan Integritas melalui Pemeriksaan Mendadak (Sadak)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pemeriksaan mendadak (Sadak) untuk memperkuat upaya pencegahan fraud</li> <li>2. Evaluasi kebijakan dan implementasi pelaksanaan Sadak tahun 2022</li> <li>3. Penyusunan konsep penyempurnaan pedoman Sadak untuk menyeraskan dengan kegiatan investigasi</li> </ol> <p>Langkah selanjutnya: Implementasi Sadak atas proses bisnis berisiko tinggi untuk tahun 2023</p>		<h3>VII. Program Transformasi Pengawasan Itjen</h3> <p>Pada tahun 2022, Itjen, sesuai dengan mandat pengawasan yang diberikan oleh Menteri Keuangan dalam PMK 18/2022, juga melakukan Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN), penjaminan, subsidi, dan transfer ke daerah, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam menjaga dan memitigasi risiko fiskal. Adanya PMK 18/2022 memperluas cakupan pengawasan pengelolaan keuangan negara, yang dapat mencakup 87 Kementerian/Lembaga, 78 BUMN, 38 provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 74.961 Desa, yang mendapatkan dana BUN. Untuk meng-cover pengawasan pengelolaan keuangan negara yang sangat luas tersebut, Itjen mengembangkan konsep combined assurance sebagai salah satu strategi penguatan sinergi dan kolaborasi antara Itjen dengan manajemen (first line), unit kepatuhan internal (second line), dan APIP K/L/D dan SPI BUMN/BLU (third line) untuk mewujudkan pengawasan keuangan negara yang komprehensif dan terintegrasi.</p> <p>Adanya penguatan lingkup pengawasan tersebut juga memberikan tantangan baru dalam penguatan integritas. Pada tahun 2022, agenda penguatan integritas yang dicanangkan oleh Itjen diharapkan dapat dilaksanakan dengan tiga strategi utama. Strategi pertama adalah dengan menguatkan peran dan fungsi investigasi oleh Itjen. Strategi ini meliputi penguatan aspek proses bisnis investigasi, sumber daya manusia, serta optimalisasi iii teknologi informasi dalam kegiatan investigasi. Strategi kedua adalah implementasikan kerangka kerja integritas (KKI) dengan efektif dan efisien serta menguatkan sistem pengendalian intern (SPI) yang selama ini telah diterapkan di Kemenkeu. Ketiga, melaksanakan pemeriksaan mendadak (Sadak) atau surprise audit sebagai inisiatif pencegahan fraud yang infrastrukturnya telah diatur dalam Peraturan Inspektor Jenderal Nomor PER-1/IJ/2022.</p>

Dari aspek organisasi, adanya PMK 18/2022 menjadi driver dalam pengembangan desain organisasi Itjen yang fit dan agile. Pada tahun 2022, transformasi organisasi dimulai dengan identifikasi pain point dan penyusunan target operating model untuk perumusan desain organisasi Itjen. Arah pengembangan organisasi ke depan juga akan diselaraskan dengan arah perkembangan organisasi Kementerian Keuangan. Di samping itu, transformasi organisasi juga meliputi penguatan aspek dukungan anggaran untuk kegiatan pengawasan dimana pada tahun 2022 telah dirumuskan serangkaian action plan terkait pemanfaatan standar biaya keluaran dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta otomasi dalam proses pertanggungjawaban anggaran.

Dari aspek sumber daya manusia, transformasi diarahkan pada empat area utama, yaitu: pengembangan SDM Itjen yang kompeten, perwujudan SDM Itjen sebagai leaders factory dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara, pengembangan pengelolaan SDM yang modern, serta pembentukan growth mindset bagi auditor. Adapun beberapa inisiatif yang telah dilakukan untuk mendukung implementasi area tersebut diantaranya: penguatan kompetensi auditor dari aspek governance, risk, and control, fiskal/APBN, dan data analytic, peningkatan awareness dan engagement auditor, peningkatan soft competency, pembentukan learning organization, pengembangan tata kerja community of practice, pembentukan fungsi career counseling, otomasi pengelolaan SDM, dan penerapan datadriven HR management.

Dari aspek teknologi, Itjen juga terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan melalui optimalisasi data analytic serta pengembangan konsep sistem informasi pengawasan keuangan negara yang terintegrasi. Pada tahun 2022, Itjen me-revisit roadmap pengembangan data analytic untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal serta best practices pemanfaatan data analytic dalam pengawasan. Itjen juga mulai menginisiasi desain "Sistem Inti Pengawasan Keuangan Negara" sebagai backbone system yang akan mengonsolidasikan dan mengintegrasikan data, analisis, hasil pengawasan, serta business intelligence untuk memberikan dukungan bagi jajaran pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam konteks pengawasan.

## D. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Evaluasi terhadap SAKIP Itjen, baik dari pihak eksternal maupun internal, menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi hasil (result governance oriented) dan peningkatan kinerja yang lebih berorientasi outcome (outcome oriented). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Itjen tahun 2021, bahwa implementasi AKIP di Itjen sudah memenuhi kualifikasi PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021, sehingga tidak ada rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Namun, selama tahun 2022, Itjen melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut.

### 1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kinerja Bulanan

Terdapat rekomendasi dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi 2021, pada komponen pengelolaan kinerja, agar Kementerian Keuangan melaksanakan dialog kinerja setiap bulan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada level unit Eselon I, Itjen melakukan dialog

kinerja setiap bulan pada rapat Board of Inspectors (BOI). Pada rapat tersebut dilakukan pembahasan pemutakhiran kinerja dan risiko Itjen.

### 2. Penyesuaian atas Renstra Itjen tahun 2020-2024

Renstra Itjen Tahun 2020-2024 belum secara memadai menyajikan indikator kinerja kegiatan dan target sebagai penjabaran dari Program Itjen. Hal ini disebabkan disebabkan kondisi transisi implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada saat penyusunan Rencana Strategis 2021-2024. Dalam lampiran Renstra Inspektorat Jenderal periode tahun 2020-2024, matriks kinerja dan pendanaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tahun 2020 dan tahun 2021-2024. Untuk tahun 2020, Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan telah sepenuhnya lengkap karena baik Renja, maupun Perencanaan Kinerja Itjen masih mengacu pada program sebelum diimplementasikannya RSPP. Sedangkan untuk periode tahun 2021-2024 penentuan khususnya indikator kinerja masih dalam proses pembahasan pada saat penyusunan Renstra tingkat Eselon I. Atas hal tersebut, Itjen telah melengkapi indikator kinerja kegiatan beserta target pada matriks pendanaan dan kinerja untuk program Itjen tahun 2021-2024 dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

## BAB IV | BRANDING PENGAWASAN ITJEN



- A. Inovasi Pengawasan
- B. Penghargaan/Apresiasi
- C. Knowledge Sharing
- D. Kontribusi pada Profesi dan Organisasi Lain



## A. Inovasi Pengawasan

Selama tahun 2022, Itjen mengembangkan inovasi pengawasan, di antaranya:

### 1. Pengembangan Dashboard Impor - Ekspor

Pada tahun 2022 Inspektorat Jenderal d.h.i Inspektorat II melakukan inovasi pengembangan dashboard impor - ekspor sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur II Nomor ND-574/IJ.3/2022 tanggal 15 November 2022 hal penyampaian SQL Script dan Tableau Workbook dalam Rangka Deployment Dashboard Impor-Ekspor Inspektorat II pada Infrastruktur Sistem Layanan Data Kemenkeu. Kategori inovasi yaitu digitalisasi/berbasis teknologi informasi, dengan pengelompokan inovasi sebagai proses bisnis 57 manajemen yang terdiri dari manajemen strategis, pengendalian dan pengawasan intern, serta manajemen pengetahuan. Dashboard Impor-Ekspor Inspektorat Jenderal merupakan langkah kongkret dalam menyediakan visualisasi dan tools monitoring guna membantu manajemen dan auditor melakukan pengawasan secara berkala atas data impor dan ekspor yang telah dialirkan ke Inspektorat II.

Mengingat perkembangan yang cepat dalam kegiatan pengawasan, dashboard tersebut masih terus dikembangkan mengikuti perkembangan dan permasalahan yang ditemukan saat dilakukan pengawasan. Tools yang digunakan dalam inovasi ini yaitu Microsoft SQL Server (telah disediakan oleh organisasi), Tableau Server (telah disediakan oleh organisasi), Visual Studio Code (Open Source), dan Tableau Desktop (disediakan oleh Inspektur II).

Inovasi ini diimplementasikan pada lingkup unit eselon I, II, dan III atau unit non eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan unit eselon I, II, dan III. Dashboard dapat diakses menggunakan jaringan/vpn Kemenkeu dengan menggunakan user yang telah diberikan akses oleh Bagian Sistem Informasi Pengawasan.

### 2. Pemeriksaan Mendadak (SADAK) Pengembalian Pendahuluan dan Restitusi pada Inspektorat non Investigasi

Pada tahun 2022 Inspektorat Jenderal d.h.i Inspektorat II melakukan inovasi pengembangan dashboard impor - ekspor sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur II Nomor ND-574/IJ.3/2022 tanggal 15 November 2022 hal penyampaian SQL Script dan Tableau Workbook dalam Rangka Deployment Dashboard Impor-Ekspor Inspektorat II pada Infrastruktur Sistem Layanan Data Kemenkeu. Dalam rangka upaya pencegahan fraud dan atas arahan dari Inspektur Jenderal, pada tahun 2022 Inspektorat I mulai melaksanakan inovasi dalam bentuk pemeriksaan mendadak (SADAK) terhadap mitra kerja pengawasan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan SADAK merupakan suatu inovasi baru di lingkungan unit Inspektorat non Investigasi, diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat mencegah terjadinya kerugian negara sedini mungkin. Kegiatan SADAK tersebut di-

awali dengan dilakukan analisis data atas transaksi pembayaran/pengembalian pajak di Kantor-kantor Pelayanan Pajak. Kegiatan selanjutnya adalah analisis data untuk menemukan adanya anomali dalam transaksi-transaksi perpajakan. Tujuan dari kegiatan SADAK adalah untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi adanya ketidakpatuhan bahkan hal-hal yang menjurus ke tindakan fraud dalam proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Inspektorat I memetakan objek KPP yang menjadi sumber dari anomali data tersebut dan mempersiapkan tim untuk melakukan SADAK. Pada tahap I SADAK, Inspektorat I melakukan analisa data sebagai bahan SADAK terhadap probis restitusi pajak dengan indikasi terdapat restitusi ganda. Setelah dilakukan SADAK hasilnya terdapat tiga KPP terbukti melakukan restitusi lebih dari satu kali masa pajak, Tim Itjen merekomendasikan kepada KPP dimaksud untuk mengembalikan restitusi ganda. Sampai dengan 31 Desember 2022 WP melalui KPP-KPP tersebut telah mengembalikan senilai Rp 1.194.187.155. Pada tahap II SADAK Inspektorat I mengembangkan basis data tidak hanya terkait dengan restitusi namun juga pengembalian pendahuluan yang diberikan tahun 2021 sampai dengan Juni 2022.

### 3. Aplikasi E-Hukdis

Data hukuman disiplin (hukdis) merupakan informasi yang digunakan oleh manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan promosi, mutasi, manajemen talenta, maupun keputusan lainnya. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan database hukuman disiplin yang lengkap dan terintegrasi. Akan tetapi, kondisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa belum terdapat kesamaan basis data hukdis yang dimiliki oleh Biro SDM di Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal, maupun Unit Eselon I. Hal ini terjadi karena belum adanya keseragaman perlakuan dari unit kerja dalam pengadministrasian hukdis dan belum adanya suatu platform tunggal yang digunakan dalam pemrosesan pemeriksaan dan penjatuhan hukdis.

Dengan mempertimbangkan pentingnya tata kelola hukdis sebagai upaya penegakan disiplin PNS, masifnya jumlah rekomendasi hukdis yang dihasilkan, serta sebagai alat bantu pelaksanaan pendokumentasiannya keputusan hukdis sebagaimana diamanatkan pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021, maka Inspektorat Bidang Investigasi telah mengembangkan aplikasi E-HUKDIS sebagai sebuah platform terintegrasi pengelolaan hukuman disiplin PNS yang dapat digunakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dasar penggunaan Aplikasi E-HUKDIS adalah Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/MK.9/2021 tentang Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Hukuman Disiplin E-HUKDIS dalam Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa Aplikasi E-HUKDIS digunakan seluruh atasan langsung meliputi Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pejabat Tinggi Pratama, dan Pejabat Tinggi Madya dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukdis. Implementasi aplikasi E-HUKDIS dan hasil

pemantauan serta evaluasi atas penjatuhan hukuman disiplin juga dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Launching Aplikasi E-HUKDIS telah dilakukan pada 18 November 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada Unit Kepegawaian dan UKI Unit Eselon I.

Aplikasi e-HUKDIS dapat diakses melalui alamat <https://e-HUKDIS.kemenkeu.go.id> dengan menggunakan username dan password akun e-performance. Aplikasi E-HUKDIS sebagai solusi digital manajemen hukdis memiliki fitur dan memberikan nilai tambah sebagai berikut:

- Menggunakan data HRIS sehingga meminimalisasi risiko kesalahan administrasi.
- Menghasilkan dashboard pimpinan yang memuat rekapitulasi statistik hukdis untuk proses pengambilan keputusan (promosi/mutasi).
- Memiliki fitur untuk memonitor progres pelaksanaan pemeriksaan hukdis dan bisa digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck.
- Menghasilkan data tunggal pengelolaan hukdis yang dapat digunakan untuk menganalisis modus, sebaran geografis, atau kelompok umur pelaku pelanggar disiplin pegawai sehingga kebijakan penegakan disiplin menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, di tahun 2023, pengembangan aplikasi akan dilanjutkan dengan optimalisasi proses input untuk kemudahan penggunaan aplikasi oleh user, efisiensi proses pemeriksaan dengan mengurangi keterlibatan pihak dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin, optimalisasi pemanfaatan data aplikasi E-HUKDIS, dan pengintegrasian aplikasi E-HUKDIS dengan aplikasi lain.

#### 4. Penajaman Dashboard Profiling

Sehubungan dengan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber data dan informasi di Kemenkeu dalam upaya pencegahan fraud dan penyediaan informasi yang cepat, akurat, relevan dan bermanfaat bagi stakeholder dalam rangka pengambilan keputusan terkait pengawasan, Inspektorat Bidang Investigasi sedang menyusun inisiatif Penajaman Dashboard Profiling (PDP). PDP merupakan program peningkatan kapabilitas Dashboard Profiling dalam bentuk user interface terintegrasi yang bersumber dari sumber daya Kemenkeu dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai tulang punggung pelaksanaan Kerangka Kerja Integritas dan pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu.

PDP menyediakan perangkat pendukung kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal serta implementasi Kerangka Kerja Integritas melalui kegiatan pencegahan, deteksi, respon, dan monitoring Kementerian Keuangan dalam bentuk Dashboard Profiling (kantor dan pegawai). Perangkat tersebut juga dapat digunakan dalam penelusuran rekam jejak integritas, bahan pertimbangan pada saat proses mutasi dan promosi, manajemen talenta serta kebutuhan lainnya oleh pihak-pihak: Unit Kerja pada Kemenkeu, Unit Kepatuhan Internal pada Kemenkeu, dan Inspektorat Jenderal. Sumber data dan informasi yang akan digunakan dalam PDP terdiri dari dashboard kantor dan dashboard pegawai yang antara lain bersumber dari:

- a) Dashboard kantor (hasil audit itjen, profil pegawai, data pengaduan, DA Itjen, risk management, pengendalian intern, persepsi integritas, belanja, penerimaan, data WP dan importir, data AHU);
- b) Dashboard pegawai (CV pegawai, keterlibatan kasus, hukuman disiplin, transaksi keuangan, pelaporan harta, informasi intelijen, data pengaduan, performance pegawai, profiling UKI, data Dukcapil, data imigrasi, analisis DA).

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pengembangan Dashboard Profiling adalah:

- a. Pembuatan user requirement aplikasi Dashboard Pegawai dan Kantor.
- b. Permintaan API data HRIS, ALPHA, WISE dan e-Performance kepada Pusintek, Biro SDM dan Bagian KKH.
- c. Koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat VII dan Pusintek.
- d. Pengembangan aplikasi.
- e. Pengujian aplikasi dan User Acceptance Test (UAT).

Selanjutnya, PDP akan dilanjutkan dengan pengembangan dan integrasi data internal/eksternal dalam rangka memperkaya informasi yang akan disajikan kepada stakeholder, koordinasi dengan unit eselon I lainnya terkait integrasi data dan pemanfaatan aplikasi dashboard, dan penyusunan peraturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi dashboard.

#### 5. Outlier Data Alpha

Sehubungan dengan upaya peningkatan validitas data Alpha sehingga dapat digunakan untuk kegiatan profiling dan pengambilan keputusan pimpinan dalam penempatan pejabat/pegawai, Inspektorat Bidang Investigasi membuat project data analytics outlier data Alpha. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka project analisis outlier data alpha antara lain:

- a) Business Understanding: mempelajari proses pengelolaan dan administrasi data Alpha.
- b) Data Understanding: memperoleh data utama (Alpha) serta data pendukung lainnya berupa data HRIS. Mempelajari data secara umum dan melihat kualitas data yang didapatkan.
- c) Data Preparation: melakukan pembersihan data yang tidak sesuai dengan standar atau kewajaran serta melakukan transformasi data apabila diperlukan.
- d) Modelling: menerapkan metode statistik (normality z-test, dbscan, dan PCA) untuk data yang telah dibersihkan. Hasil dari modeling berupa outlier berdasarkan single variable dan multi variable.
- e) Evaluation: evaluasi terhadap hasil modelling dengan pengecekan terhadap MeanAbsolute Error (MAE) untuk membuktikan bahwa list yang dihasilkan memang merupakan outlier.

Hasil analisis ini menunjukkan data laporan harta kekayaan pegawai yang merupakan outlier/anomali apabila dibandingkan dengan jabatan dan unit kerja yang sama. Selanjutnya, hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta para pegawai memperbaiki data Alpha yang salah pada saat pengisian, melakukan konfirmasi data Alpha terhadap pegawai yang masuk ke dalam outlier dengan single variable dan mengusulkan outlier multi variable sebagai salah satu parameter penambah risiko pada saat perhitungan risiko pegawai di Dashboard Profiling dan/atau kegiatan profiling.

## B.Penghargaan/Apresiasi Prestasi

Pada tahun 2022, Itjen memperoleh penghargaan serta apresiasi atas prestasi yang telah dicapai antara lain penghargaan terhadap majalah Auditoria Itjen, dan Kearsipan.

### 1. Auditoria

Pada tahun 2022, Majalah Internal Inspektorat Jenderal Auditoria kembali meraih penghargaan di ajang Public Relations Indonesia Award (PRIA). Kali ini edisi ke-65 meraih Gold Winner pada kategori Kementerian Sub Kategori E-Magazine. Selain itu, Auditoria kembali menyabet piala dengan gelar Gold Winner dalam InHouse Magazine Awards (InMA) 2022. Tim Auditoria menerima penghargaan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2022 di Jogja National Museum, Yogyakarta.

### 2. Kehumasan

Berdasarkan hasil monev yang dilakukan tahun 2022, 6 (enam) PPID Tingkat I Kemenkeu mendapat kategori "informatif" yang merupakan kategori terbaik di dalam keterbukaan informasi publik. PPID Tingkat I Inspektorat Jenderal menjadi salah satu yang mendapat kategori "informatif". Hal ini menjadi pencapaian tersendiri bagi Inspektorat Jenderal Kemenkeu karena sebelumnya mendapat kategori "menuju informatif".

### 3. Penyuluhan Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas (PAKSI-API) Penganugerahan Predikat WBK WBBM

Dalam acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang dilaksanakan Itjen Kemenkeu pada 13 Desember 2022 juga dilakukan pengukuhan penyuluhan anti korupsi dan ahli pembangun integritas (PAKSI-API) dan penganugerahan predikat WBK WBBM.

Kementerian Keuangan memiliki komunitas antikorupsi yakni Penyuluhan Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang tergabung dalam forum PAKSI API DANA RAKCA dan beranggotakan 412 PAKSI yang berasal dari seluruh unit Eselon I Kemenkeu dan 3 orang API yang seluruhnya telah tersertifikasi oleh LSP KPK. PAKSI API DANA RAKCA telah melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada kelompok sasaran baik internal maupun eksternal Kemenkeu. Dengan mengeusung berbagai tema seperti integritas dan anti korupsi, PAKSI API DANA RAKCA berkontribusi, berkolaborasi, dan bersinergi mengawal keuangan negara agar digunakan secara tepat, efisien, dan berdampak luas kepada perekonomian.

Kementerian Keuangan juga menjadi institusi yang concern terhadap integritas organisasi melalui ZI-WBK/WBBM. Sejak terbitnya PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 dan SE MenPANRB No. 15 Tahun 2022, Kemenkeu diberikan kewenangan melaksanakan Evaluasi ZI WBK/WBBM secara Mandiri. Tahun ini terdapat 269 unit kerja yang ditetapkan berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM yaitu 186 unit kerja memperoleh predikat WBK dan 83 unit kerja memperoleh predikat WBBM.

## C.Knowledge Sharing

Sepanjang tahun 2022, Itjen tercatat telah menerima kunjungan studi banding dari berbagai K/L/Pemda. Kunjungan-kunjungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Daftar Studi Banding dari K/L/Pemda Selama Tahun 2022**

No.	K/L/Pemda	Topik Studi Banding
1	Itjen Kementerian Perindustrian	Penerapan TABK
2	Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Audit SDM
3	Itjen Kementerian Perhubungan	Konsep Open Space
4	Itjen Kementerian ESDM	Pengawasan PNBP
5	Pemerintah Bangladesh	Audit Internal
6	Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian TKPMR
7	Komnas HAM	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
8	Inspektorat KPK	CACM dan e-Revu LK
9	Bawaslu	Pengelolaan Pengaduan/WISE
10	Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat	Pengelolaan Pengaduan/WISE
11	Itjen Kementerian Kesehatan	Transformasi Pengawasan

No.	K/L/Pemda	Topik Studi Banding
12	Sekretariat Jenderal DPR RI	Sistem Manajemen Pengawasan Intern
13	Kunjungan Kerja DFAT Australia	Transformasi Pengawasan
14	Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Pelaporan Harta Kekayaan
15	Inspektorat dan Biro Keuangan BPOM	e-Revu LK
16	Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Pengawasan TIK
17	Itjen Kementerian PUPR	Audit Investigasi
18	Itjen Kementerian KLHK	Pengawasan PUG
19	Itjen Kementerian Agama	Kearsipan
20	SPI Universitas Brawijaya	Audit Berbasis TI
21	SPI Universitas Indonesia	Risk Based Audit, Data Analytics, IACM
22	Inspektorat Kota Bandar Lampung	Implementasi PUG

Selain studi banding, Itjen juga membagikan pengetahuan terkait berbagai topik, seperti pengawalan Program PC-PEN, Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIP), pelaksanaan reviu perbaikan penilaian kembali BMN, dan topik lainnya yang berkaitan dengan pengawasan intern.

Nama	Jabatan
Ika Istakariana	Anggota Komite Pengembangan Profesi
Murdiono	Anggota Komite Pengembangan Profesi

Selain aktif dalam organisasi profesi AAPI, beberapa pegawai Itjen juga terdaftar dalam keanggotaan organisasi profesi lain yaitu The Institute of Internal Auditors (IIA) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada tahun 2022, tercatat kontribusi dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional IIA yang diselenggarakan pada tanggal 12-13 Oktober 2022;
2. Inspektur VII menjadi pembicara dalam Profesional Auditor Forum yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2022;
3. Pertemuan Kerjasama Itjen Kemenkeu dengan IIA yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2022; dan
4. Prospek kerjasama pengembangan kapasitas dan peran aktif auditor Itjen dengan ISACA Indonesia Chapter yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2022.

Pegawai-pegawai Itjen yang tergabung dalam IIA dan IAI sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Pegawai Itjen Sebagai Anggota IIA dan IAI

Nama	Keanggotaan	Nama	Keanggotaan
Peter Umar	IIA dan IAI	Jimmi Lapotulo	IAI
Nursevianto Tahier	IIA dan IAI	Iwan Kurniawan	IAI
Toni Widhyanto	IIA dan IAI	Belis Siswanto	IAI
Tri Achmadi	IIA dan IAI	Dedhi Suharto	IAI
Gomgom Parluhutan Sianturi	IIA dan IAI	Untung Dwiyono	IAI
Moh. Ali Rahmani	IIA dan IAI	Anugrah Nurfauzi	IAI
Yogi Ishwara	IIA dan IAI	Muhammad Thoriq	IAI
Emir Fahreza Zarnedi	IIA dan IAI	Siti Fadliyah	IAI
Ade Virgiawan	IIA	Ahmad Sholeh	IAI
Agung Nugroho	IIA	Agus Sarwodi	IAI
Agus Wahyu Hartanto	IIA	Arief Rofiqi	IAI
Ahmad Ghufron	IIA	Armanzah	IAI
Alvan Chaqiqi	IIA	Sri Sukesi	IAI
Andhika Suryawan Jati	IIA	Muhaimin Zikri	IAI
Andi Kahar	IIA	Ade Saepuloh	IAI
Andreas Syaloom Kurniawan	IIA	Bonifacio Nugroho Wicaksono	IAI
Arfan Sahrul Ramadhan	IIA	Hendrawan Yoesianto	IAI
Arief Anwar Hidayat	IIA	Subagyo	IAI
Arief Ismail	IIA	Roberth Gonijaya	IAI

Tabel 4. 2 Pegawai Itjen dalam Kepengurusan AAPI

Nama	Jabatan
Agus Arbiyanto	Anggota Komite Kode Etik
Mardiyantoso Eddy Tarman	Anggota Komite Kode Etik
Sunu Soebroto	Anggota Komite Standar Audit
Asrulzani Muhamad	Anggota Komite Standar Audit
Robert Gonijaya	Anggota Komite Telaah Sejawat
Nursevianto Tahier	Anggota Komite Telaah Sejawat
Devi Nurmalaasari	Anggota Komite Telaah Sejawat

## D.Kontribusi pada Profesi dan Organisasi Lain

Itjen telah berkontribusi secara aktif dalam pengembangan organisasi profesi yang dilakukan melalui wadah AAPI, khususnya pada komite. Kontribusi pengembangan profesi yang dilakukan diwujudkan diantaranya melalui:

1. Penataan database keanggotaan AAPI;
2. Pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal ke Inspektorat Utama BRIN; dan
3. Pelaksanaan Quality Control Telaah Sejawat Ekstern.

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum AAPI Nomor KEP-2/AAPI/DPN/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Periode Tahun 2021 - 2024, pegawai Itjen yang menjadi pengurus dalam Komite AAPI dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Nama	Keanggotaan	Nama	Keanggotaan
Arif Beta Hendriyanto	IIA	Anne Akbari Nurfiana	IAI
		Housemelia Chrisanty	
		Afiat	
Blessius Altrafino	IIA	Linda Sortauli Malau	IAI
Caya Marissatiara Pesidya-rani	IIA	Guindra Pramudi Nu-graha	IAI
Chindy Chresna Agung Bu-jana	IIA		IAI
		Airvian Trisakti	
Danang Wahyu Pratomo	IIA	Maya Damayanti	IAI
Datyo Afriyadi	IIA	Imam Chairadi	IAI
David Wungkana	IIA	Adi Gunadi Surachmat	IAI
Delfina Yuniati	IIA	Fery Perdiansyah	IAI
Denis Yudosusilo	IIA	Achmad Fauzi	IAI
Dewi Rahmawati	IIA	Arief Anwar Hidayat	IAI
Diana Laurencia	IIA	Alexander Zulkarnain	IAI
Dicka Ichsan Prabantoro	IIA	Nur Imroatun Sholihat	IIA
Dodi Khan Marpaung	IIA	Murdiono	IIA
Eko Heru Laksono	IIA	Novia Ramadhan	IIA
Frengky Amstrong Om-pusunggu	IIA	Nur Ma'ruf	IIA
Gandhi Anwar Sani	IIA	Nur Cahyo Ari Wibowo	IIA
Gladys Nieke Prafitri Rach-manda	IIA	Ose Puji Nurhayat	IIA
Gresika Bunga Sylvana	IIA	Rahmawati Setyaningsih	IIA
Gustian Wiwaha	IIA	Reza Ahmada	IIA
Happy Arga Sapta Wijaya	IIA	Reza Darmawan	IIA
Heru Susanto	IIA	Riza Faiz Ahmad	IIA
Huda Sukmawan	IIA	Sadhitya Pratomo	IIA
Iis Setiani	IIA	Sigit Pramono	IIA
Ika Istakariana	IIA	Surya Primazis	IIA
Januarti Tiurmaida	IIA	Tri Juli Astuti Sihombing	IIA
Jarvik Fuad Rizky	IIA	Vini Estrawan	IIA
Johanes Don Bosco Widodo			
Lestarianto	IIA	Wahyudin Sam	IIA
Khairuddin Safa`at	IIA	Weky Budiman	IIA
Kristian Danang Purnomo	IIA	Wika Wahyu Firmansyah	IIA
		Putra	
Lilik Supri Nur Hanaf	IIA	Willy David Morison	IIA
		Manik	
Meinar Mayanti Panjaitan	IIA	Zahro Fathoni	IIA
Mochammad Gilang Ramad-han	IIA		

terdapat 12 unit di mana pegawai Itjen melaksanakan penugasan tersebut dengan rincian seperti pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Daftar Unit Penugasan Pegawai Itjen

No.	Unit Penugasan
1	PT Karabha Digdaya
2	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3	Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
4	Badan Layanan Umum Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
5	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
6	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
7	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
8	PT Barata Indonesia (Persero)
9	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
10	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
11	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
12	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

Selain aktif dalam organisasi profesi seperti AAPI, IIA, dan IAI, beberapa pegawai juga aktif dalam penugasan di luar Itjen, baik di Perseroan Terbatas, Lembaga, maupun BLU. Setidaknya

## BAB V | PENUTUP



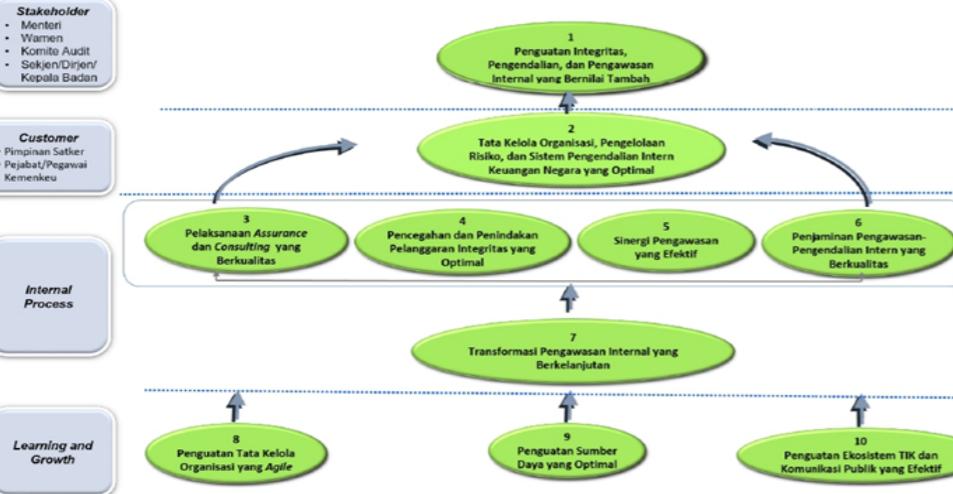
Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi dan kinerja Itjen dalam tahun anggaran 2022 atas perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun. Hal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian kinerja Itjen tahun 2022 telah sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Itjen akan terus berupaya menjalankan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja melalui pencapaian kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Untuk mendukung hal tersebut, di tahun 2023 Itjen melakukan penyempurnaan atas peta strategis agar dapat lebih menggambarkan peran serta kegiatan yang dilakukan Itjen sebagai pengawas intern Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja Itjen tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Itjen dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kemenkeu. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kemenkeu yang akan berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.

Akhir kata, Itjen menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terlibat baik dari seluruh Unit Eselon I terkait maupun pejabat/pegawai Itjen yang turut membantu mewujudkan capaian Sasaran Strategis Itjen di tahun 2022.

## LAMPIRAN

 <p><b>KONTRAK KINERJA NOMOR: 9/KK/2022 INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2022</b></p> <p><b>Pernyataan Kesanggupan</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagai Inspektur Jenderal, saya akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.</li> <li>2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.</li> <li>3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol> <p><b>Peta Strategi</b></p>  <p>The Strategic Map illustrates the relationship between four stakeholder groups and ten performance indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stakeholder:</b> Wamen, Komite Audit, Sekjen/Diren/ Kepala Badan</li> <li><b>Customer:</b> Pimpinan Satker, Pejabat/Pegawai Kemenkeu</li> <li><b>Internal Process:</b> Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal, Sinergi Pengawasan yang Efektif, Penjaminan Pengawasan-Pengendalian Intern yang Berkualitas, Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan</li> <li><b>Learning and Growth:</b> Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile, Penguatan Sumber Daya yang Optimal, Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif</li> </ul> <p>Indicators (1-10) are interconnected by arrows indicating flow and dependency:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Integritas, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah</li> <li>2. Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal</li> <li>3. Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas</li> <li>4. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal</li> <li>5. Sinergi Pengawasan yang Efektif</li> <li>6. Penjaminan Pengawasan-Pengendalian Intern yang Berkualitas</li> <li>7. Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan</li> <li>8. Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile</li> <li>9. Penguatan Sumber Daya yang Optimal</li> <li>10. Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif</li> </ul> <p><small>Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022</small></p>
---

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</b> <b>INSPEKTUR JENDERAL</b> <b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b>				
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penguatan Integritas, Pengendalian, dan Pengawasan Intern yang Bernilai Tambah	1a-CP	Rata-Rata Indeks Opini BPK atas LK BA 15 dan LK BUN	4 (WTP)
		1b-CP	Indeks Integritas	91
		1c-N	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	4,55
2.	Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal	2a-CP	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85
		2b-CP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4
		2c-N	Indeks Efektivitas UKI	80
3.	Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas	3a-N	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	5
		3b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%
		3c-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi	4,59
4.	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal	4a-N	Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas	2
		4b-N	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti	65%
5.	Sinergi Pengawasan yang Efektif	5a-CP	Persentase Communiqué G-20 usulan Indonesia yang Disepakati	70%
		5b-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92%
6.	Penjaminan Pengawasan-Pengendalian Intern yang Berkualitas	6a-N	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AIPI	92
7.	Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan	7a-N	Jumlah Pedoman Pengawasan	7
		7b-N	Persentase Pengawasan Berbasis Continuous Audit	80%
		7c-N	Persentase implementasi PIJJ	80%
8.	Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile	8a-CP	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	92%
		8b-N	Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	4
9.	Penguatan Sumber Daya yang Optimal	9a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100
		9b-CP	Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	91,75%
		9c-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5
10.	Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif	10a-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	90%
		10b-CP	Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu	100%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10c-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55

**Program** **Anggaran**

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp306.994.000  
2. Program Dukungan Manajemen Rp75.799.003.000

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sri Mulyani Indrawati

Inspektur Jenderal



Ditandatangani Secara Elektronik  
Awan Nurmawan Nuh

**RINCIAN TARGET KINERJA  
INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1 Penguatan Integritas, Pengendalian, dan Pengawasan Intern yang Bernilai Tambah</b>								
1a-CP	Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BUN	-	4	4	-	4	-	4 (skala 4)
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	91	91
1c-N	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	-	-	-	-	-	4,55	4,55
<b>2 Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal</b>								
2a-CP	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	85	85
2b-CP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	4	4
2c-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	80	80
<b>3 Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas</b>								
3a-N	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	-	-	-	-	-	5	5
3b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	97%	97%
3c-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi	-	-	-	-	-	4,59	4,59
<b>4 Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal</b>								
4a-N	Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas	-	-	-	-	-	2	2
4b-N	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
<b>5 Sinergi Pengawasan yang Efektif</b>								

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase <i>Communique</i> G-20 usulan Indonesia yang Disepakati	-	70%	70%	-	70%	70%	70%
5b-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	-	30%	30%	-	30%	92%	92%
<b>6 Penjaminan Pengawasan-Pengendalian Intern yang Berkualitas</b>								
6a-N	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAPI	-	-	-	-	-	92	92
<b>7 Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan</b>								
7a-N	Jumlah Pedoman Pengawasan	1	2	2	4	4	7	7
7b-N	Persentase Pengawasan yang Berbasis <i>Continuous Audit</i>	60%	60%	60%	60%	60%	80%	80%
7c-N	Persentase implementasi PIJJ	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>8 Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile</b>								
8a-CP	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
8b-N	Nilai <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	-	-	-	-	-	4	4
<b>9 Penguatan Sumber Daya yang Optimal</b>								
9a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-CP	Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	91,75 %	91,75%
9c-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
<b>10 Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif</b>								
10a-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	90%	90%
10b-CP	Tingkat Implementasi <i>Digital Enabling Ecosystem</i> Kemenkeu	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
10c-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



ditandatangani Secara Elektronik  
Awan Nurmawan Nuh

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



## Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN  
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Awan Nurmawan Nuh	NAMA	Sri Mulyani
NIP	19680926 199310 1 001	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama / IV/e	PANGKAT/GOL RUANG	-
JABATAN	Inspektor Jenderal	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Inspektorat Jenderal	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

### A. KINERJA UTAMA

1.	Penguatan Integritas, Pengendalian dan Pengawasan Intern yang Bernilai Tambah	IKU 1.1 Rata-rata Indeks Opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BUN	4 (WTP)
		IKU 1.2 Indeks Integritas	91
		IKU 1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	4,55
2.	Tata Kelola Organisasi, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Negara yang Optimal	IKU 2.1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	85
		IKU 2.2 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4
		IKU 2.3 Indeks Efektivitas UKI	80
3.	Pelaksanaan Assurance dan Consulting yang Berkualitas	IKU 3.1 Jumlah Rekomendas Hasil Pengawasan	5
		IKU 3.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%
		IKU 3.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultansi	4,36
4.	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas yang Optimal	IKU 4.1 Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Integritas	2
		IKU 4.2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	65%
5.	Sinergi Pengawasan yang Efektif	IKU 5.1 Persentase <i>Communique G</i> 20 usulan Indonesia yang Disepakati	70%
		IKU 5.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92%
6.	Penjaminan Pengawasan-Pengendalian Intern yang Berkualitas	IKU 6.1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AIPI	92
7.	Transformasi Pengawasan Internal yang Berkelanjutan	IKU 7.1 Jumlah Pedoman Pengawasan	7
		IKU 7.2 Persentase Pengawasan yang Berbasis <i>Continuous Audit</i>	80%
		IKU 7.3 Persentase implementasi PIJJ	80%
8.	Penguatan Tata Kelola Organisasi yang Agile	IKU 8.1 Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	92%
		IKU 8.2 Nilai <i>Internal Audit Capability</i>	4

		Modei (IACM)	
9.	Penguatan Sumber Daya yang Optimal	IKU 9.1 Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100%
		IKU 9.2 Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	91,75%
		IKU 9.3 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
10.	Penguatan Ekosistem TIK dan Komunikasi Publik yang Efektif	IKU 10.1 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	90%
		IKU 10.2 Tingkat Implementasi <i>Digital Enabling Ecosystem</i> Kemenkeu	100%
		IKU 10.3 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55

### B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Awan Nurmawan Nuh  
NIP 196809261993101001

Jakarta, 1 Januari 2022  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sri Mulyani Indrawati

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



## Lampiran 2 Sertifikasi Pegawai Itjen



Selain 20 Certifikasi tersebut, terdapat total 57 jenis sertifikasi internasional / nasional yang dimiliki pegawai Itjen, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sertifikasi Kehilhan	Jenis	Jumlah	
1	PA	Chartered Accountant	Internasional	39
2	CFE	Certified Fraud Examiner	Internasional	23
3	CIA	Certified Internal Auditor	Internasional	17
4	CISA	Certified Information Systems Auditor	Internasional	16
5	CPA	Certified Legal Auditor	Nasional	16
6	CRMP	Certified Risk Management Professional	Nasional	11
7	CRMO	Certified Risk Management Officer	Nasional	9
8	CITPE	Certified IT Procurement Expert	Nasional	9
9	CFRA	Certified Forensic Auditor	Nasional	8
10	ITIL	Information Technology Infrastructure Library 4 Certification	Internasional	7
11	GRCI	Governance Risk Control Professional	Nasional	7
12	CAPP	Certified Governance Professional	Internasional	6
13	GRCA	Governance Risk and Control Auditor	Internasional	6
14	COB	Certified e-Business Professional	Internasional	5
15	CCSA	Certified Control Self Assessment	Internasional	5
16	APF A	APM Akuntansi Permonitan A	Nasional	5
17	CSCP	Certified Customs Practitioner	Nasional	5
18	CHRM	Certified Human Resource Management Professional	Internasional	5
19	CSCP	Certified Strategy Execution Professional	Nasional	4
20	CEH	Certified Ethical Hacker	Internasional	4
21	CEHDX	Certified in Electronic Privacy	Internasional	4
22	CHFI	Computer Hacking Forensic Investigator	Internasional	4
23	OCIA	Oracle Certified Associate	Internasional	4
24	CCNA	Cisco Certified Network Associate	Internasional	3
25	PCNP	PC Council Certified Secure Programmer	Internasional	3

No	Sertifikasi Kehilhan	Jenis	Jumlah	
26	CAFM	Certified Associate in Project Management	Internasional	3
27	APM A	APM Akuntansi Permonitan A	Nasional	3
28	CpSp	Certified Public-private Partnerships Professional	Internasional	2
29	CODP	Certified Organization Development Practitioner	Internasional	2
30	CDCP	Certified Data Centre Professional	Internasional	2
31	CGAP	Certified Government Auditing Professional	Internasional	2
32	CHRA	Certified Human Resources Analyst	Internasional	2
33	PCAP	Certified Associate in Python Programming	Internasional	2
34	CGEIT	Certified in the Governance of Enterprise Information Technology	Internasional	2
35	QIA	Qualified Internal Auditor	Nasional	2
36	CPA	Certified Public Accountant	Internasional	2
37	QGIA	Qualified Government Internal Auditor	Nasional	2
38	CIO	Chief Information Officer	Internasional	2
39	CPM	Certified Project Manager	Internasional	2
40	-	Oracle Training and Certification	Internasional	2
41	MPSA	Microsoft Office Specialist	Internasional	2
42	CHRM	Certified Human Resources Manager	Internasional	2
43	CRM	Certified Risk Analyst	Internasional	2
44	CISM	Certified Information Security Manager	Internasional	2
45	EnCe	Encasednbsp;Certifiednbsp;Examiner	Internasional	2
46	CDPSE	Certified Data Privacy Solutions Engineer	Internasional	2
47	CHRP	Certified Human Resources Professional	Internasional	2
48	CAP	Certified Accounting and Audit Professional	Internasional	2
49	CACP	Certified in Audit Committee Practices	Internasional	2
50	CRGP	Certified Risk Governance Professional	Nasional	2
51	CISSP	Certified Information Systems Security Professional	Internasional	2
52	CCSA	CCSA Certified CyberOps Associate	Internasional	2
53	QMHO	Qualified Risk Management Officer	Internasional	2
54	CERG	Certified in Enterprise Risk Governance	Internasional	2
55	QRGP	Qualified Risk Governance Professional	Internasional	2
56	CRISC	Certified in Risk and Information Systems Control	Internasional	2
57	CDAA	Certificate in Data Analytics	Internasional	2
<b>Total Pegawai</b>			<b>274</b>	

Total Pegawai Itjen yang memiliki sertifikasi sebanyak 149 pegawai (sebagian besar memiliki lebih dari satu jenis sertifikasi)

Lampiran 3 Informasi Kinerja dan Anggaran Itjen Tahun 2022

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORG : (02) Inspektorat Jenderal  
SATUAN KERJA : (117155) INSPEKTORAT JENDERAL  
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

**BAGIAN-A**

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.02.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		2,329,141,000		2,329,141,000
01	<b>Sasaran Program :</b> Pengelolaan kas, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel				
01.04	<b>Indikator Kinerja Program :</b> Indeks Opini BPK atas LKPP dan LK BUN - Itjen <b>Kas Negara yang Memadai dan Risiko Keuangan Negara yang Terkendali</b> <b>Indikator Output Program</b> Indeks opini BPK atas LK BUN - Itjen <b>Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara</b>				
4811			2,329,141,000	2,329,141,000	
01	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> Percentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang				
02	Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN				
4811.FAH	<b>Pengelolaan Keuangan Negara [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT</b> <b>Indikator KRO</b>	1.00 Laporan	2,329,141,000	2,329,141,000	
100	<b>Rekomendasi Hasil Pengawasan BA BUN</b> <b>Indikator RO</b>	1.00 Rekomendasi	2,329,141,000	2,329,141,000	
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan BA BUN				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORG : (02) Inspektorat Jenderal  
SATUAN KERJA : (117155) INSPEKTORAT JENDERAL  
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

**BAGIAN-A**

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.02.WA	Program Dukungan Manajemen				
01	<b>Sasaran Program :</b> Organisasi dan SDM yang Optimal				
01.19	<b>Indikator Kinerja Program :</b> Tingkat implementasi learning organization - Kementerian Keuangan (ITJEN)				
	<b>Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia</b>				
	<b>Indikator Output Program</b>				
	Indeks integritas - Itjen				
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi - ITJEN				
02	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				
02.12	<b>Indikator Kinerja Program :</b> Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (ITJEN)				
	<b>Sistem Teknologi Informasi Keuangan</b>				
	<b>Indikator Output Program</b>				
	Percentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK - ITJEN				
	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah				
03	<b>Indikator Kinerja Program :</b>				
03.07	Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (ITJEN)				
03.09	Indeks Opini BPK atas LK BA 15 (ITJEN)				
	<b>Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi</b>				
	<b>Indikator Output Program</b>				
	Indeks Integritas - ITJEN				
	Indeks Opini BPK atas LK BA 15 - ITJEN				
4738	<b>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</b>				
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Percentase kualitas pelaksanaan anggaran				
4738.CAN	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]</b> 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT				
	<b>Indikator KRO</b>				
100	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				
	<b>Indikator RO</b>				
4738.EBA	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]</b> 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT				
	<b>Indikator KRO</b>				
100	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit				
	<b>Indikator RO</b>				
01	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit				
101	Dukungan Pimpinan dan Protokoler				
	<b>Indikator RO</b>				
	1.00 Dokumen				
	56,679,000				
	12.00 Bulan Layanan				
	2,742,179,000				
	15,348,161,000				
	56,679,000				
	2,742,179,000				
	16,857,011,000				
	16,857,011,000				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG : (02) Inspektorat Jenderal  
 SATUAN KERJA : (117155) INSPEKTORAT JENDERAL  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Jumlah Dukungan Pimpinan dan Protokoler				
102	Kerumahtanggaan	12.00 Bulan Layanan	107,380,000		107,380,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Kerumahtanggaan				
103	Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	32.00 Laporan	44,876,000		44,876,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	12.00 Bulan Layanan	12,397,047,000		12,397,047,000
994	Layanan Perkantoran				
	Indikator RO				
01	Jumlah Layanan Perkantoran	440.00 Unit	848,411,000		848,411,000
4738.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT				
	Indikator KRO				
101	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	138.00 unit	701,050,000		701,050,000
	Indikator RO				
102	Gedung/Bangunan	302.00 m <sup>2</sup>	147,361,000		147,361,000
	Indikator RO				
01	Gedung/Bangunan	5.00 Dokumen	57,444,000		57,444,000
4738.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT				
	Indikator KRO				
100	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1.00 Dokumen	4,394,000		4,394,000
	Indikator RO				
101	Dokumen Perbendaharaan Unit	1.00 Dokumen	1,860,000		1,860,000
	Indikator RO				
102	Laporan Keuangan Unit	2.00 Laporan	36,347,000		36,347,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Laporan Keuangan Unit	1.00 Dokumen	14,843,000		14,843,000
103	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit				
	Indikator RO				
4739	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		405,258,000		405,258,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Indeks efektivitas komunikasi publik				
4739.BMB	Komunikasi Publik [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT	72.00 layanan	405,258,000		405,258,000
	Indikator KRO				
100	Layanan Kepustakaan	12.00 Bulan Layanan	57,176,000		57,176,000
	Indikator RO				

Halaman : 3

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG : (02) Inspektorat Jenderal  
 SATUAN KERJA : (117155) INSPEKTORAT JENDERAL  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Layanan Kepustakaan				
101	Publikasi Media Cetak	60.00 Cetak	348,082,000		348,082,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Publikasi Media Cetak				
4740	Pengelolaan Organisasi dan SDM	19,518,181,000			19,518,181,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi				
4740.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT	4.00 Rekomendasi Kebijakan	470,108,000		470,108,000
	Indikator KRO				
100	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	4.00 Rekomendasi Kebijakan	470,108,000		470,108,000
	Indikator RO				
4740.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT	1,097.00 Layanan	17,389,079,000		17,389,079,000
	Indikator KRO				
100	Administrasi Kepegawaian	707.00 Pegawai	23,662,000		23,662,000
	Indikator RO				
01	Administrasi Kepegawaian	378.00 Pejabat Fungsional	73,566,000		73,566,000
101	Pengelolaan Jafung				
	Indikator RO				
01	Pengelolaan Jafung	12.00 Bulan Layanan	17,291,851,000		17,291,851,000
994	Layanan Perkantoran				
	Indikator RO				
01	Jumlah Bulan Layanan Gaji dan Tunjangan				
4740.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT	712.00 Orang	1,620,740,000		1,620,740,000
	Indikator KRO				
100	Pengembangan SDM	712.00 Pegawai	1,620,740,000		1,620,740,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Pengembangan SDM				
4740.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT	1.00 Dokumen	38,254,000		38,254,000
	Indikator KRO				
100	Laporan Penilaian Integritas	1.00 Laporan	38,254,000		38,254,000
	Indikator RO				
01	Laporan Penilaian Integritas				
4741	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	9,198,347,000			9,198,347,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Indeks Efektivitas UKI				
02	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG : (02) Inspektorat Jenderal  
 SATUAN KERJA : (117155) INSPEKTORAT JENDERAL  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

## BAGIAN-A

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG : (02) Inspektorat Jenderal  
 SATUAN KERJA : (117155) INSPEKTORAT JENDERAL  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4741.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT <i>Indikator KRO</i>	1.00 Layanan	600,000		600,000
100	Rekomendasi Kepatuhan Internal <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	600,000		600,000
01	Jumlah Rekomendasi Kepatuhan Internal				
4741.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT <i>Indikator KRO</i>	1.00 Orang	44,000		44,000
100	Laporan Hasil Verifikasi Kekayaan Pegawai <i>Indikator RO</i>	1.00 Laporan	44,000		44,000
10	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi Kekayaan Pegawai				
4741.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT <i>Indikator KRO</i>	12.00 Dokumen	9,197,703,000		9,197,703,000
100	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	198,964,000		198,964,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal				
101	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	2,042,727,000		2,042,727,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara				
102	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	715,704,000		715,704,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara				
103	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	1,626,240,000		1,626,240,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko				
104	Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	2,388,373,000		2,388,373,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L				
105	Rekomendasi Hasil Pengawasan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	415,706,000		415,706,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan				
106	Rekomendasi Hasil Penindakan <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	669,996,000		669,996,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Penindakan				
107	Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	588,519,000		588,519,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN				
108	Hasil Pengawasan Saber Pungli Kementerian Keuangan <i>Indikator RO</i>	1.00 Dokumen	182,450,000		182,450,000
01	Hasil Pengawasan Saber Pungli Kementerian Keuangan				

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
109	Rekomendasi atas Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Piutang Pemberian Pinjaman <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	155,527,000		155,527,000
01	Jumlah Rekomendasi atas Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Piutang Pemberian Pinjaman				
110	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemuliharaan Ekonomi Nasional <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	59,033,000		59,033,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemuliharaan Ekonomi Nasional				
111	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Kemenkeu, KL, TKDD (DAK), dan Pemda <i>Indikator RO</i>	1.00 Rekomendasi	154,464,000		154,464,000
01	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Kemenkeu, KL, TKDD (DAK), dan Pemda				
4742	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi <i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>	62,908,000			62,908,000
01	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK Sistem Informasi Pemerintahan [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT <i>Indikator KRO</i>	1.00 Sistem Informasi	62,908,000		62,908,000
100	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem <i>Indikator RO</i>	1.00 Sistem	62,908,000		62,908,000
01	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem				

Jakarta Pusat, 23 November 2022

PROGRAM/KEGIATAN/KRO	KODE	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	PAGU*	REALISASI**
KRO	4738.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			Rp15.348.161.000	Rp14.752.286.433
RO	01 EBA.100	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	1	4	Rp56.679.000	Rp52.616.000
	02 EBA.101	Dukungan Pimpinan dan Protokoler	12	12	Rp2.742.179.000	Rp2.660.930.061
	03 EBA.102	Kerumahtanggaan	12	12	Rp107.380.000	Rp97.665.400
	04 EBA.103	Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	32	36	Rp44.876.000	Rp -
	05 EBA.994	Layanan Perkantoran	12	12	Rp12.397.047.000	Rp11.941.074.972
KRO	4738.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			Rp848.411.000	Rp845.257.582
	01 EBB.101	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	138	138	Rp701.050.000	Rp697.898.380
	01 EBB.102	Gedung/Bangunan	302	302	Rp147.361.000	Rp147.359.202

PROGRAM/KEGIATAN/KRO	KODE	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	PAGU*	REALISASI**
KRO	4740.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			Rp17.389.079.000	Rp17.145.418.695
RO	01 EBA.100	Administrasi Kepegawaian	707	707	Rp23.662.000	Rp15.998.700
	02 EBA.101	Pengelolaan Jafung	378	410	Rp73.566.000	Rp69.137.750
	03 EBA.994	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	12	12	Rp17.291.851.000	Rp17.060.282.245
	4740.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			Rp1.620.740.000	Rp1.526.725.339
RO	01 EBC.100	Pengembangan SDM	712	712	Rp1.620.740.000	Rp1.526.725.339
KRO	4740.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Rp38.254.000	Rp37.297.958
RO	01 EBD.100	Laporan Penilaian Integritas	1	2	Rp38.254.000	Rp37.297.958
KEGIATAN	4741	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			Rp9.198.347.000	Rp8.932.074.532
PROGRAM/KEGIATAN/KRO	KODE	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	PAGU*	REALISASI**

PROGRAM/KEGIATAN/KRO	KODE	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	PAGU*	REALISASI**
KRO	4738.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Rp57.444.000	Rp39.256.939
RO	01 EBD.100	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1	2	Rp9.938.000	Rp5.872.200
	02 EBD.101	Dokumen Perbendaharaan Unit	1	2	Rp1.860.000	Rp -
	03 EBD.102	Laporan Keuangan Unit	2	4	Rp30.803.000	Rp25.859.639
	04 EBD.103	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	1	2	Rp14.843.000	Rp7.525.100
KEGIATAN	4739	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik			Rp405.258.000	Rp381.628.145
KRO	4739.BMB	Komunikasi Publik			Rp405.258.000	Rp381.628.145
RO	01 BMB.100	Layanan Kepustakaan	12	12	Rp57.176.000	Rp52.289.205
	02 BMB.101	Publikasi Media Cetak	60	167	Rp348.082.000	Rp329.338.940
KEGIATAN	4740	Pengelolaan Organisasi dan SDM			Rp19.518.181.000	Rp19.095.991.828
KRO	4740.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			Rp470.108.000	Rp386.549.836
PROGRAM/KEGIATAN/KRO	KODE	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	

PROGRAM/KEGIATAN/KRO	KODE	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	
			TARGET	CAPAIAN	PAGU*	REALISASI**
KRO	4741.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			Rp600.000	Rp550.000
RO	01 EBA.100	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1	1	Rp600.000	Rp550.000
	4741.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			Rp44.000	Rp -
	01 EBC.100	Laporan Hasil Verifikasi Kekayaan Pegawai	1	2	Rp44.000	Rp -
	4741.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Rp9.197.703.000	Rp8.931.524.532
	01 EBD.100	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal	1	2	Rp198.964.000	Rp198.140.813
	02 EBD.101	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara	1	2	Rp2.049.937.000	Rp2.022.867.851
	03 EBD.102	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara	1	2	Rp722.064.000	Rp714.413.391
	04 EBD.103	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	1	2	Rp1.626.240.000	Rp1.558.066.935

#### Lampiran 4 Galeri Kegiatan Itjen Tahun 2022

	05 EBD.104	Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L	1	2	Rp2.345.873.000	Rp2.259.659.637
	06 EBD.105	Rekomendasi Hasil Pengawasan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan	1	2	Rp450.706.000	Rp428.049.276
	07 EBD.106	Rekomendasi Hasil Penindakan	1	2	Rp713.391.000	Rp699.532.346
	08 EBD.107	Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN	1	2	Rp560.694.000	Rp543.864.515
	09 EBD.108	Hasil Pengawasan Saber Pungli Kementerian Keuangan	1	2	Rp166.880.000	Rp164.387.642
	10 EBD.109	Rekomendasi atas Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Piutang Pemberian Pinjaman	1	2	Rp155.527.000	Rp155.526.311



Pra Rakerpim Akhir Tahun



Rakerpim Tahun 2022



Workshop Proses Bisnis dan Tata Kelola Subsidi PPh DTP dan PPNB Perbaikan Bumi



Sosialisasi Anti Korupsi DJFO Gember



Webinar Kesehatan Mengenal Autisme



Webinar Integritas Tahun Politik



Pelatihan dan Pengembangan Calon Pemuda Pemudi Dengan



Pelatihan Stress Management

	11 EBD.110	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional	1	2	Rp59.033.000	Rp56.403.263
	12 EBD.111	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Kemenkeu, K/L, TKDD (DAK), dan Pemda	1	2	Rp148.394.000	Rp130.612.552
KEGIATAN	4742	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi			Rp62.908.000	Rp52.375.300
KRO	4742.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan			Rp62.908.000	Rp52.375.300
RO	01 FAB.100	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	1	1	Rp62.908.000	Rp52.375.300

## GLOSARIUM



Rakerpim Itjen Akhir Tahun 2022



Audit TIK Itjen Kemenkumham



Audit Investigasi PUPR



Stuba KL IK



Stuba Daerah Lampung



Hari Anti Korupsi



Pra Rakerpim Akhir I

AAPI	: Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
AIPI	: Auditor Intern Pemerintah Indonesia
ALPHA	: Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan
AOC	: Agent of Change
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	: Aparat Penegak Hukum
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ATK	: Alat Tulis Kantor
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BCP	: Business Continuity Plan
BDK	: Balai Diklat Keuangan
BIA	: Business Impact Analysis
Biro KLI	: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BMTP	: Bea Masuk Tindakan Pengamanan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPNT	: Bantuan Pemerintah Non-Tunai
BPPK	: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPUM	: Banpres Produktif Usaha Mikro
BST	: Bansos Tunai
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CA/CM	: Continous Audit/Continous Monitoring
CFO	: Chief Financial Officer

COO	: Chief Operating Officer	IIA	: The Institute of Internal Auditors
CTO	: Central Transformation Officer	IK	: Indikator Kinerja
DA	: Data Analytic	IKN	: Ibu Kota Negara
DAMS	: Daily Activity Monitoring System	IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
DAU	: Dana Alokasi Umum	IKU	: Indikator Kinerja Utama
DBH	: Dana Bagi Hasil	InMA	: The 10th Indonesia Inhouse Magazine
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	IS	: Implementasi Strategis
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran	IS RBTK	: Implementasi Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	JKM	: Jaminan Kematian
DJPB	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	K/L	: Kementerian/Lembaga
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	KANWIL	: Kantor Wilayah
DMM-CMMI	: Data Maturity Model – Capability Maturity Model Integration	KB	: Kawasan Berikat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat	KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
DSB	: Daftar Sasaran Besar	KITSDA	: Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur
EA	: Enterprise Architecture	KK	: Kontrak Kinerja
EBT	: Energi Baru Terbarukan	KKI	: Kerangka Kerja Integritas
EIS	: Ethical Integrity Scale	KKP	: Kartu Kredit Pemerintah
e-LMS	: e-Learning Management System	KKPIP	: Kerangka Konsepual Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia
ET	: Emerging Technologies	KND	: Kekayaan Negara yang Dipisahkan
FGD	: Focus Group Discussion	KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
FTZ	: Free Trade Zone	KPBU	: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
FWS	: Flexible Workin Space	KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
GRC	: Governance Risk and Control	KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
HAKORDIA	: Hari Anti Korupsi Sedunia	KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
HET	: Harga Eceran Tertinggi	KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
HKPD	: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	KPPBC TMP	: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
IACM	: Internal Audit Capability Model	KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia	KPTIK-BMN	: Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi-Barang Milik Negara
IBI	: Inspektorat Bidang Investigasi	KRO	: Klasifikasi Rincian Output
ICV	: Internalisasi Corporate Value	KSKK	: Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan

KUR	: Kredit Usaha Rakyat	PCO	: Professional Congress Organizer
LAKI	: Laporan Audit Kearsipan Internal	PC-PEN	: Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
LED	: Loss Event Database	PDP	: Penajaman Dashboard Profiling
LHAC	: Laporan Hasil Assessment Center	PDTT	: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
LHKASN	: Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	PIC	: Person In Charge
LIAC	: Laporan Individual Assessment Center	PIJJ	: Pengawasan Intern Jarak jauh
LK	: Laporan Keuangan	PIPK	: Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
LK BA 15	: Laporan Keuangan Bagian Angaran 15	PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
LK BA BUN	: Laporan Keuangan Bagian Angaran Bendahara Umum Negara	PKA	: Program Kerja Audit
LKE	: Lembar Kerja Evaluasi	PKED	: Pemantauan Kode Etik dan Disiplin
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	PKH	: Program Keluarga Harapan
LNSW	: Lembaga National Single Window	PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
LO	: Learning Organization	PKS	: Perjanjian Kerja Sama
LP2P	: Laporan Pajak-Pajak Pribadi	PLB	: Fasilitas Pusat Logistik Berikat
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	PLIS	: Perceived Leader Integrity Scale
LPG	: Liquefied Petroleum Gas	PMN	: Penyertaan Modal Negara
LS	: Langsung	PPMRB	: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MAE	: Mean Absolute Error	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
MFWP	: Master File Wajib Pajak	PNS/ASN	: Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara
MK	: Menteri Keuangan	POA	: Performance Outcome Area
MKL	: Manajemen Keberlangsungan Layanan	PP	: Peraturan Pemerintah
MP	: Major Project	PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
NIK	: Nomor Induk Kependudukan	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
NKO	: Nilai Kinerja Organisasi	PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
NLE	: National Logistic Ecosystem	PSIAP	: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan	PULBAKET	: Pengumpulan Bahan dan Keterangan
OTSUS	: Otonomi Khusus	RCM	: Risk Control Matrix
OTT	: Operasi Tangkap Tangan	RDK	: Rapat Dalam Kantor
PBI	: Penerima Bantuan Iuran	RENJA	: Rencana Kerja
PBJ	: Pengadaan Barang dan Jasa	RENSTRA	: Rencana Strategis
PBPU	: Pekerja Bukan Penerima Upah	RKA K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

RKD	: Rekening Kas Desa	TLDDP	: Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah	TLHP	: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah	TLK	: Take Last Known
RSPP	: Redessain Sistem Perencanaan dan Penganggaran	TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
SAIPI	: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia	TNI/POLRI	: Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	TPTD	: Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi	TUP	: Tambahan Uang Persediaan
SAT	: Sistem Analisis Data dan Informasi Terintegrasi	UAKBUN	: Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia	UAP BUN	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara
SEB	: Surat Edaran Bersama	UAT	: User Acceptance Test
Set.PP	: Sekretariat Pengadilan Pajak	UE I	: Unit Eselon I
SI	: System Integrator	UIC	: Unit In Charge
SIAP/CTAS	: Sistem Inti Administrasi Perpajakan/Core Tax Administration System	UKI	: Unit Kepatuhan Internal
SIMAN	: Sistem Informasi Manajemen Aset Negara	UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
SLDK	: Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan	UP	: Uang Persediaan
SMPI	: Sistem Manajemen Pengawasan Intern	UPG	: Unit Pengendali Gratifikasi
SOP	: Standard Operating Procedure	UPR	: Unit Pemilik Risiko
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	UU	: Undang-Undang
SPI	: Sistem Pengendalian Internal	VPN	: Virtual Private Network
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	WASDAL	: Pengawasan dan Pengendalian
SPP	: Surat Penetapan Pabean	WFH	: Work From Home
SPT	: Surat Pemberitahuan	WISE	: Whistleblowing System
SS	: Sasaran Strategis	WMK	: Wakil Menteri Keuangan
TABK	: Teknik Audit Berbantuan Komputer	WP	: Wajib Pajak
TADAT	: Tax Administration Diagnostic Assessment Tool	WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
THT	: Tabungan Hari Tua		
TI	: Teknologi Informasi		
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi		
TK	: Transformasi Kelembagaan		
TKDD	: Transfer ke Daerah dan Dana Desa		
TKPI	: Tata Kelola Pengawasan Internal		
TKPMR	: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko		

**Pengarah: Bambang Karuliahasto**

**Tim Penyusun:**

Agus Arbiyanto, Yayak Adijatmiko, Tina Safitri,  
Irham Fuadi, Devi Kartika S, Rena Monika, Nurfida  
Fitri R, Hanik Ummu Sulaim, Nisa Aulia Aziza.

**Kontributor:**

Prisma Nurul Aulia, Andina Rizqi Aulia, Dwi  
Putranto A, Alfiani Mazidatul Karimah, Khoirul  
Anam, Anetta Virgiola, Anisah Nadiah Faadhilah,  
Ardi Subarkah, Ali ikbal, Muhammad Ihsan dan  
rekan-rekan lainnya.

**Foto: Subbagian Kehumasan dan Protokoler**

